

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK WARUNG
GOTONG ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (E-WARONG KUBE
PKH) DI KOTA MALANG**

**(Studi Pada E-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan E-Warong KUBE
PKH Tanjungrejo Bersatu)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ABRAHAM C R N

NIM 125030107111066



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2019

MOTTO

“Karena Masa Depan Sungguh Ada dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”

(Amsal 23:18)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Elektronik Warung Gotong Royong
Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
(E-Warong KUBE PKH) di Kota Malang (Studi pada Dinas
Sosial Kota Malang)

Disusun Oleh : Abraham C R N

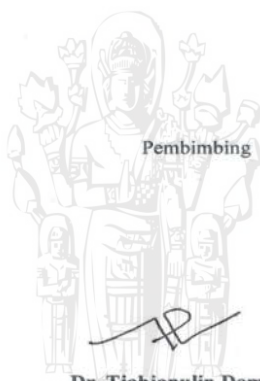
NIM : 125030107111066

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 31 Desember 2018

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Pembimbing

Dr. Tiahianulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Februari 2019
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Abraham CRN
Judul : Implementasi Program Elektronik Warung Gotong
Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
(e-Warong KUBE PKH) di Kota Malang
(Studi Pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera
dan e-Warong KUBE PKH Tanjungsrejo Bersatu)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota


Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D
NIP. 19691205 200501 1 003

Anggota


Trisnawati, S.Sos, M.AP
NIP. 19800307 200801 2 012

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dijadikan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 25 Januari 2019



Nama : Abraham C R N

NIM : 12503010711106

RINGKASAN

Abraham CRN, 2018, **Implementasi Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) di Kota Malang** (Studi Pada E-Warong KUBE PKH dan E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu), Dr. Tjahjanulin Domai, MS, 217 Halaman + xxiii

Penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan penulis dalam implementasi program elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan (e-Warong KUBE PKH) di Kota Malang. Kemiskinan masih menjadi permasalahan di Indonesia. Langkah Pemerintah Indonesia dalam usaha pengentasan kemiskinan adalah dengan membuat program e-Warong KUBE PKH. Program tersebut merupakan program aksi dari kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui e-Warong KUBE PKH. Kota Malang merupakan kota pertama di Indonesia tempat diluncurkannya program tersebut. Pertama peneliti ingin meneliti bagaimanakah implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu). Kedua apa saja hambatan dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori model kesesuaian oleh David C. Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 11) dengan melihat kesesuaian antara elemen program, pelaksanaan program dan kelompok sasaran. Metode analisis yang digunakan adalah metode interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Dalam penelitian ini terdapat empat tahapan penelitian, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program e-Warong di dua e-Warong yang ada di Kota Malang belum optimal. Ketidakoptimalan tersebut disebabkan ketidaksesuaian pada elemen pelaksanaan program. Kesesuaian ditemukan pada elemen program dan elemen kelompok sasaran. Sumberdaya lain penunjang keberhasilan program sudah tersedia. Kondisi sosial masyarakat terkait implementasi program adalah mendukung dan kondisi ekonomi kelompok masyarakat penerima bantuan BPSU melalui e-Warong KUBE PKH sudah tepat. Hambatan implementasi program e-Warong didapati dilingkungan Dinas Sosial Kota Malang, Bank BNI dan e-Warong. Saran peneliti yakni: (i) Segera dilakukan pengangkatan Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial oleh Pemerintah Kota Malang. (ii) Bank BNI harus meningkatkan pengawasan terhadap sistem perbankannya, komunikasi petugas ABB ke pengurus dan penyelia e-Warong juga perlu ditingkatkan. (iii) Perlu dilakukan sosialisasi lanjutan terkait peraturan program e-Warong KUBE PKH kepada pengurus dan penyelia e-Warong KUBE PKH di Kota Malang agar permasalahan yang ada di e-Warong bisa diminimalisir.

Kata Kunci: Implementasi , Program, E-Warong KUBE PKH, Kota Malang

SUMMARY

Abraham CRN, 2018, **Implementation of Electronic Program Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) in Malang City** (Study of E-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera and E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu), Dr. Tjahjanulin Domai, MS, 216 Pages + xxiii

This research was conducted on the basis of the curiosity of authors in the implementation of electronic program warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan (e-Warong KUBE PKH) in Malang city. Poverty is still a problem in Indonesia. The steps of the Indonesian Government in efforts to alleviate poverty are by making KUBE PKH e-Warong program. The program is an action program from the Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2016 concerning Business Development Assistance Through KUBE PKH e-Warong. Malang City is the first city in Indonesia where the program was launched. First, the researchers wanted to examine how the implementation of the KUBE PKH e-Warong program in Malang City. Second, what are the obstacles in the implementation of the KUBE PKH e-Warong program in Malang City.

This type of research used in writing this essay is a type of descriptive research with a qualitative approach. The researcher used the conformity model theory by David C. Korten (in Akib and Tarigan, 2008: 11) by looking at the compatibility between program elements, program implementation and target groups. The analytical method used is the interactive method of Miles, Huberman, and Saldana. In this study there are four stages of research, namely data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the KUBE PKH e-Warong program in Malang City had been implemented but was not optimal. The optimization is due to a mismatch on the elements of program implementation. Suitability is found in the program elements and target group elements. Other resources that support the success of the program are available. The social condition of the community regarding the implementation of the program is supportive and the economic conditions of the community groups receiving BPSU assistance through the PKH e-Warong PKH are appropriate. The obstacles to implementing the e-Warong program are found in the Malang City Social Service Office, BNI Bank and e-Warong. Researcher's suggestions are: (i) Immediately carried out the appointment of Head of PFM and Social Empowerment by Malang City Government. (ii) Bank BNI must increase supervision of its banking system, communication of ABB officers to administrators and supervisors of e-Warong also needs to be improved. (iii) Further information is needed regarding the regulation of the PKH e-Warong KUBE program to the management and supervisors of the KUBE PKH e-Warong in Malang so that the problems in e-Warong can be minimized.

Keywords: Implementation, Program, e-Warong, KUBE PKH, Malang City

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini Kepada :

- 1. Kedua Orangtua saya yang tersayang dan tercinta Bapak Tigor Napitupulu dan Ibu Rysmaida Siagian yang sabar menunggu dan selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil dalam proses penyelesaian skripsi ini.**
- 2. Kepada empat saudara saya Abang Effendy Napitupulu, Kakak Tessalonika Napitupulu, Abang Musa Napitupulu dan juga Kakak Debora Napitupulu.**
- 3. Teman-teman saya satu kostan di MT.Haryono No 2 D Andri Silaban, Timotius Lubis, Chandra Sitio, Frans Manurung, Joe Paskah Sihite, Daniel Simatupang, Samuel, Fernando Nababan, Ismail Sibarani, Hendri Rajaguguk yang sudah memberikan dukungan.**
- 4. Teman-teman dan adik-adik PMK IMMANUEL Universitas Brawijaya**
- 5. Abang, Kakak, Adik dan Teman-Teman dari GMKI Cabang Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang sudah memberikan dukungan.**
- 6. Pihak-pihak lain yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan KuasaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Program Elektronik Warunng Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) di Kota Malang (Studi Pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu)**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dan kritikan yang membangun bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam segala hal.
6. Ibu Sumarti, Mba Hesti, Mba Labudda MH, Mas Fauzi, Pak Naisanto, Mas Rahmat Prayudi,, Ibu Sri Widya Y, Ibu Wahyu Puji Astuti dan Mba Eka Aprilia Hani selaku pembimbing di lapangan yang selalu memberi bantuan berupa masukan dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada seluruh pegawai dan staff Dinas Sosial Kota Malang dan tak lupa juga kepada seluruh pengurus e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dan Maju Sejahtera yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sekaligus membantu penulis dalam mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 29 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Administrasi publik	17
1. Pengertian dan Konsep Administrasi publik.....	17
B. Konsep Implementasi	18
1. Pengertian Implementai	18
C. Model-Model Implementasi Program.....	20
D. Konsep <i>Electronic Government</i>.....	24
1. Pengertian <i>e-Government</i>	24
2. Tujuan <i>e- Government</i>	27
3. Manfaat <i>e-Government</i>	29
4. Klasifikasi <i>e-Government</i>	29
5. Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan <i>e-Government</i>	30
E. Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH)	31
1. Pengertian E-Warong KUBE PKH.....	31
2. Dasar Hukum Program e-Warong KUBE PKH.....	32
3. Tujuan dan Sejarah Program e-Warong KUBE PKH	32
4. Rancangan Program e-Warong KUBE PKH.....	34

5. Kriteria dan Persyaratan.....	38
6. Pendanaan Program e-Warong KUBE PKH.....	40
7. Pihak-Pihak Terlibat Dalam Pelaksanaan Program e-Warong KUBE PKH	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Jenis Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Instrumen Penelitian	55
G. Validitas Data.....	56
H. Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum	62
1. Gambaran Umum Kota Malang	62
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang.....	69
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	98
1. Implementasi Program E-Warong KUBE PKH di Kota Malang (Studi Pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).....	98
a) Elemen Program.....	99
b) Elemen Pelaksanaan Program	116
c) Elemen Kelompok Sasaran	147
d) Sumberdaya	155
e) Kondisi Ekonomi dan Sosial	164
2. Hambatan Dalam Implementasi Program E-Warong KUBE PKH.....	170
a) Hambatan Dilingkungan Dinas Sosial Kota Malang	170
b) Hambatan Dilingkungan Bank BNL.....	172
c) Hambatan Dilingkungan e-Warong Kube PKH.....	173
C. Pembahasan	176
1. Implementasi Program E-Warong KUBE PKH di Kota Malang (Studi pada E-Warong KUBE PKH Maju Bersama dan E-Warong KUBE PKH Tanjung Bersama).....	176
a) Elemen Program.....	177
b) Elemen Pelaksanaan Program.....	183
c) Elemen Kelompok Sasaran.....	195

d) Sumberdaya	198
e) Kondisi Ekonomi dan Sosial	201
2. Hambatan Dalam Implementasi Program	
E-Warong KUBE PKH.....	202
a) Hambatan Dilingkungan Dinas Sosial	
Kota Malang	203
b) Hambatan Dilingkungan Bank BNI.....	203
c) Hambatan Dilingkungan e-Warong	
Kube PKH.....	204
BAB V PENUTUP	206
1. Kesimpulan	206
2. Saran	211
DAFTAR PUSTAKA	212



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1.	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2017.....	2
Tabel 2.	Luas Kecamatan dan Presentase Terhadap Luas Kota.....	64
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Kota Malang dan Rasio Menurut Kecamatan...	66
Tabel 4.	Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Malang.....	76
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Malang	164



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1.	Pola Hubungan Kemensos-KMIS-E –Warong-PKH – Bank Distributor.....	9
Gambar 2.	Model Kesesuaian David C. Korten	23
Gambar 3	Logo E-Warong KUBE PKH.....	32
Gambar 4.	Alur Analisis Data Kualitatif	61
Gambar 5.	Peta Kota Malang.....	63
Gambar 6.	Produk-Produk KPM yang Dijual Untuk KPM dan Masyarakat Umum Oleh Pengurus e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera	108
Gambar 7.	Produk-Produk KPM dan KUBE yang Dipasarkan oleh e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera.....	108
Gambar 8.	Pamflet Kegiatan E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.....	110
Gambar 9.	Produk-Produk KPM yang Dijual Untuk KPM dan Masyarakat Umum Oleh Pengurus e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.....	110
Gambar 10.	Kegiatan <i>Delivery Order</i> Oleh Pengurus e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu Saat Pencairan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) Untuk KPM di Jln. Kasin Jaya, Kota Malang	110
Gambar 11.	Produk KUBE yang Dipasarkan Oleh E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.....	111
Gambar 12.	Struk Pengambilan Bantuan Sosial Non Tunai.....	111
Gambar 13.	Kunjungan Petugas ABB Bank BNI Didampingi Penyelia ke e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera.....	120

Gambar 14.	E-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera.....	153
Gambar 15.	E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Rejo	153
Gambar 16.	Lokasi e-Warong KUBE PKH Tanjung Rejo Bersatu	156
Gambar 17.	Lokasi e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera.....	157
Gambar 18.	Mesin <i>Electronic Data Capture (EDC)</i> dan Kartu Keluarga Sejahtera.....	158



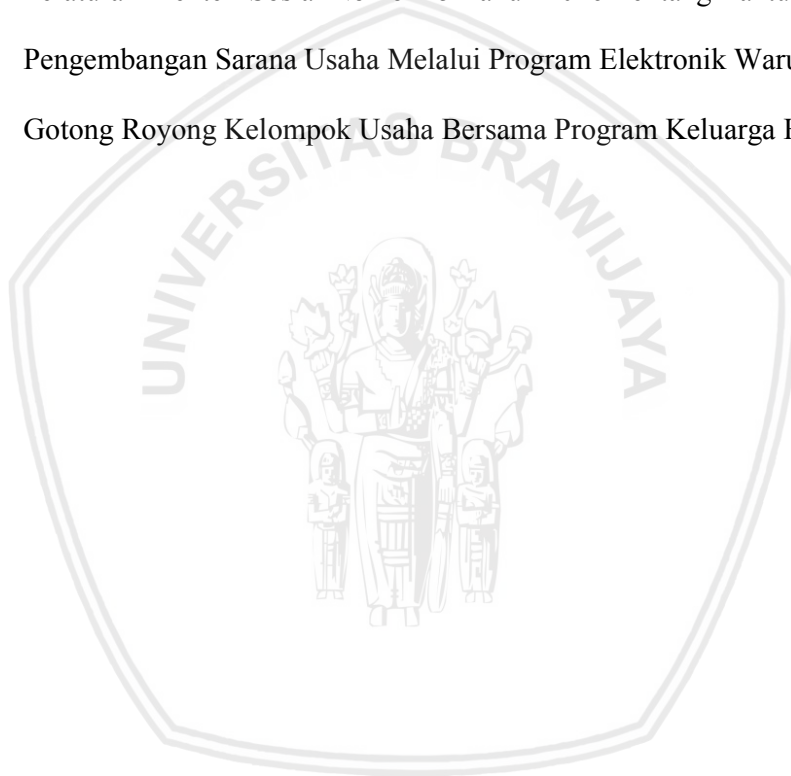
DAFTAR BAGAN

No	Judul	Halaman
	Bagan 1. Struktur Dinas Sosial Kota Malang.....	75
	Bagan 2. Struktur Kepengurusan Kube Jasa di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.....	122
	Bagan 3. Struktur Kepengurusan Kube Jasa di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera.....	123



DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Judul |
|----|--|
| 1. | Pedoman Wawancara. |
| 2. | Dokumentasi Wawancara. |
| 3. | Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian. |
| 4. | Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan.
Pengembangan Sarana Usaha Melalui Program Elektronik Warung
Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. |



DAFTAR SINGKATAN

A

ABB	<i>Asistance Branchless Banking</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ATM	Anjungan Tunai Mandiri

B

Bansos	Bantuan Sosial
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bimtek	Bimbingan Teknis
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistika
BPSU	Bantuan Pengembangan Sarana Usaha
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BNI	Bank Negara Indonesia
Bulog	Badan Urusan Logistik

D

Dinsos	Dinas Sosial
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditjen	Direktorat Jenderal

E

EDC	<i>Electronic Data Capture</i> (Perekam Data Elektronik)
<i>E-Government</i>	<i>Electronic Government</i>
<i>E-Payment</i>	<i>Electronic Payment</i> (Pembayaran Elektronik)
E-Warong KUBE PKH	Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

G

G2B	<i>Government to Business</i>
G2C	<i>Government to Citizens</i>
G2E	<i>Government to Employees</i>
G2G	<i>Government to Government</i>

H

Himbara	Himpunan Bank Milik Negara
HP	<i>HandPhone</i> (Telepon Genggam)

I

ICT	<i>Information and Communication Technology</i>
Inpres	Instruksi Presiden

J

Jl	Jalan
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	Petunjuk Teknik

K

Kabid	Kepala Bidang
Kasi	Kepala Seksi
KCU	Kantor Cabang Utama
Kemenkop dan UKM Menengah	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemenko PMK RI	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kemensos	Kementerian Sosial
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
KMIS	Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan
Korkot	Koordinator Kota
Korteks	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
KUR	Kredit Usaha Rakyat

L

Laku Pandai	Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif
LKD	Layanan Keuangan Digital

M

Mensos	Menteri Sosial
Monev	Monitoring dan Evaluasi

P

Permensos	Peraturan Menteri Sosial
Perum	Perusahaan Umum
Pesisir, PPK dan PAN Negara	Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara
PFM	Penanganan Fakir Miskin
PKH	Program Keluarga Harapan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PSM	Pekerja Sosial Masyarakat
PT	Perusahaan Terbatas

R

Rakor	Rapat Koordinasi
Rastra	Beras Sejahtera
Renstra	Rencana Strategi
RT RW	Rukun Tetangga Rukun Warga

S

Sankri	Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia

SHU

Sisa Hasil Usaha

T

TIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi

TKSK

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

U

UEP

Usaha Ekonomi Produktif

UKM

Usaha Kecil Menengah

UMKM

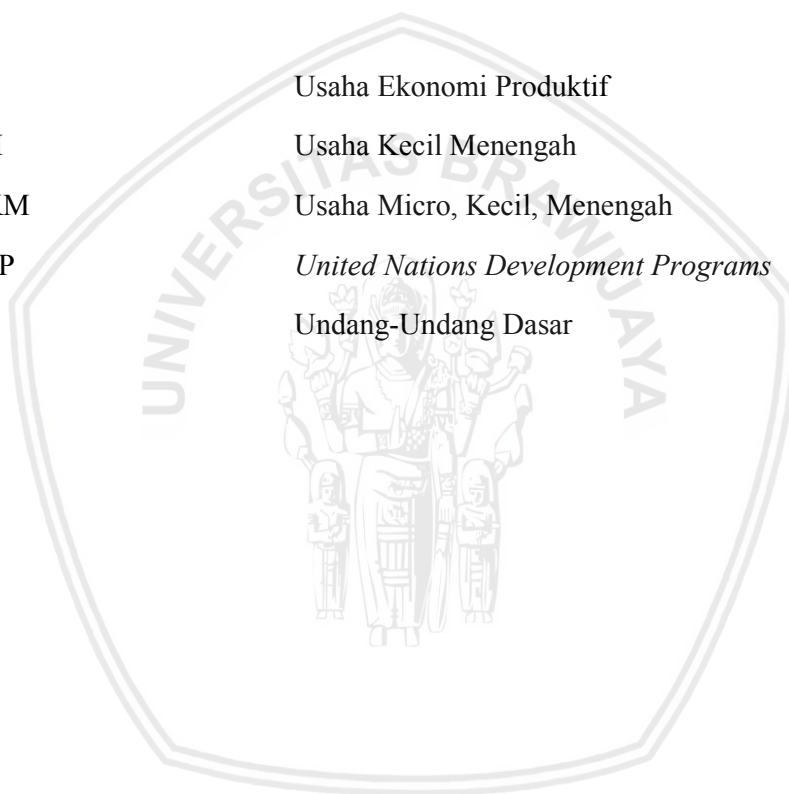
Usaha Micro, Kecil, Menengah

UNDP

United Nations Development Programs

UUD

Undang-Undang Dasar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara, baik itu negara maju, negara berkembang maupun negara miskin tidak dapat terlepas dari permasalahan-permasalahan di dalam negaranya. Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lainnya di dunia. Sebagai salah satu negara berkembang di dunia Indonesia juga menghadapi berbagai macam masalah. Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan menjadi permasalahan yang serius adalah permasalahan kemiskinan.

Masalah kemiskinan di Indonesia memang sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya hal tersebut menyebabkan ketimpangan sosial ditengah lingkungan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis setiap tahunnya, mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia jumlahnya masih yang cukup besar. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28,59 juta, diikuti tahun 2013 berjumlah 28,60 juta penduduk miskin , tahun 2014 berjumlah 27,73 juta penduduk miskin, tahun 2015 berjumlah 28,51 juta penduduk miskin, tahun 2016 berjumlah 27,76 juta penduduk miskin dan pada tahun 2017 berjumlah 26,58 juta penduduk miskin.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Juta)
2010	31,02
2011	29,89
2012	28,59
2013	28,55
2014	27,73
2015	28,51
2016	27,76
2017	26,58

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa terjadi fase naik dan turun jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih sulit untuk menurunkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah kemiskinan yang tinggi beresiko meningkatkan kesenjangan sosial dan tidak meratanya kesejahteraan umum di masyarakat, padahal dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan hal yang harus dilakukan dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dibutuhkan peran serta khususnya dari pemerintah selaku pihak yang membuat kebijakan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

pengentasan kemiskinan. Kemiskinan yang tidak ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah melalui pembuatan kebijakan- kebijakan yang strategis dan nyata akan berdampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diungkapkan Kwik Kian Gie (Karnadji & Sudarsono 2005:14):

Jika kemiskinan tidak segera ditangani maka dampaknya adalah; (1) tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, (6) kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu generasi mendatang.

Beberapa dari dampak buruk yang telah dijelaskan tersebut secara umum sudah dapat kita rasakan pada masyarakat di Indonesia, untuk itu sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus dalam penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.

Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu. Setiap upaya penanggulangan kemiskinan yang mengabaikan kedua hal tersebut tidak hanya cenderung tidak efektif, tetapi pada tempatnya dicurigai sebagai retorika belaka (Baswir, 1999:18).

Program-program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang baru bagi Pemerintahan Indonesia. Sejak tahun 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kelompok masyarakat termiskin. Program ini merupakan program bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai PKH. Tujuan dari program PKH sendiri adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Target PKH bukan saja keluarga miskin yang mempunyai komponen kesehatan dan pendidikan, melainkan juga keluarga dengan komponen disabilitas berat dan lanjut usia. Program ini diberikan kepada rumah tangga atau keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat khusus yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 6 bulan. Setelah berjalannya program tersebut akan dilakukan proses transformasi dengan cara meninjau perkembangan rumah tangga atau keluarga sasaran. Bagi rumah tangga atau keluarga yang tidak lagi miskin, dilakukan pemutusan program PKH dan bagi rumah tangga atau keluarga yang masih miskin diberi tambahan waktu menerima bantuan selama 3 tahun lagi sebagai masa transisi (Kementerian Sosial, 2014).

Namun seiring berjalannya waktu Program Keluarga Harapan, masih banyak dijumpai permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. BPK (2013) menemukan beberapa permasalahan seperti:

(i) komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung PKH masih kurang, (ii) proses validasi sasaran tidak selalu mengikuti ketentuan sehingga hasil validasi tidak lengkap, (iii) proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap kesehatan dan pendidikan belum optimal, (iv) kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sering kali berubah sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif, dan (v) monitoring rutin/berkala dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum (pedum). Permasalahan – permasalahan tersebut menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak tepat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam menunjang efektivitas pengentasan kemiskinan, Kementerian sosial (Kemensos) bekerjasama dengan dua lembaga pemerintahan lainnya. Kerjasama yang pertama adalah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam merancang program lanjutan bagi peserta PKH yang mengikuti masa transisi. Program lanjutan ini dilaksanakan dengan memberikan stimulant (bantuan) bagi rumah tangga atau keluarganya secara berkelompok, program ini lebih dikenal dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah, “Kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga”. (Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017:3). Program KUBE beranggotakan peserta program PKH sendiri, maka nama program ini lebih dikenal dengan nama KUBE PKH. Kerjasama kedua yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan adalah kerjasama antara Kemensos dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM). Kedua lembaga pemerintahan ini menyepakati untuk mensinergikan sumber daya para pihak terkait dalam rangka memberdayakan KUBE. Kerjasama yang dilakukan dua lembaga pemerintahan tersebut mengupayakan dalam pengembangan kapasitas

sumber daya manusia, dengan melakukan bimbingan keterampilan kewirausahaan dan peningkatan akses sumber pembiayaan/keuangan (Mawardi, dkk, 2017:8). Berdasarkan penjelasan tersebut Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh warga atau keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari keluarga-keluarga kurang mampu yang menerima bantuan secara non tunai dan juga mendapatkan kegiatan program pemberdayaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ikut dalam program tersebut.

Selanjutnya pada 26 April 2016 melalui Rapat Terbatas (Ratas) tentang keuangan inklusif Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran menteri-nya untuk:

- (i) segera dirumuskan strategi nasional keuangan inklusif. Perpres tentang layanan keuangan digital agar disiapkan dengan baik. (ii) setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas inklusi keuangan, (iii) penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu. (Direktorat PFM Pesisir, PPK dan PAN. 2017. *"Bahan Diskusi Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan"*, diakses pada tanggal 14 November 2018 dari <http://simontok.kemensos.go.id/home/e-warong.php>)

Terkait dengan instruksi Presiden Joko Widodo tersebut Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa memberikan arahan kepada jajarannya di lingkup Kemensos :

- (i) semua program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar outcome-nya memberikan dampak luas, efisien dan efektif, (ii) perlu adanya pemberdayaan bagi pendamping PKH dan bagi masyarakat yang didampingi serta mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku di dalam sistem keuangan

inklusif, (iii) proses penanganan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya. (Direktorat PFM Pesisir, PPK dan PAN. 2017. “*Bahan Diskusi Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*”, diakses pada tanggal 14 November 2018 dari <http://simontok.kemensos.go.id/home/e-warung.php>)

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang diaplikasikan melalui program e-Warung KUBE PKH atau e-Warung yang mana singkatan tersebut akan digunakan oleh peneliti di bab-bab selanjutnya.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung KUBE PKH) tertulis :

“Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warung KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan / atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE”. (Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017: 4).

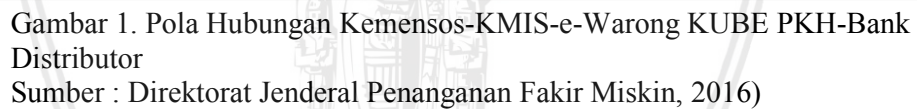
Pengertian KUBE Jasa (dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017:

3) tertulis bahwa, “KUBE di bidang jasa selanjutnya disebut KUBE Jasa adalah KUBE yang melaksanakan usaha ekonomi produktif di bidang jasa untuk mendirikan dan mengelola Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan”. Tujuan pembentukan e-Warung

KUBE PKH (dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017: 4) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial. Berdasarkan pengertian dan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa e-Warong KUBE PKH merupakan sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh kelompok keluarga miskin (KUBE) dalam bidang jasa (KUBE Jasa) yang menyediakan layanan sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE. Masyarakat penerima bantuan (keluarga miskin) yang tergabung dalam KUBE Jasa bertugas mengelola e-Warong sebagai usaha pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan kewirausahaan.

Kehadiran e-Warong KUBE PKH diharapkan dapat membantu pengentasan kemiskinan di setiap daerah dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu agar lebih sejahtera, meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, mempermudah penyaluran bantuan-bantuan sosial yang tidak lagi dengan menggunakan uang tunai melainkan menggunakan sistem perbankan yang tentunya dapat mendukung perilaku produktif bagi masyarakat penerima bantuan, terciptanya transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan sosial.

Program e-Warong merupakan hasil kerjasama Kemensos dengan bank pelaksana, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk pendistribusian bantuan sosial masyarakat miskin secara non tunai. Untuk mengakses bantuan ini, masyarakat miskin



1. Kemensos memberikan data penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM) kepada bank mitra dan KMIS (Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera)
2. Bank yang sudah melakukan kemitraan dengan Kemensos membuka rekening, menerbitkan kartu dan mendistribusikan kepada masing-masing penerima bantuan atau KPM

3. Kemensos mentransfer bantuan sosial (bantuan sosial non tunai berupa bahan pangan pokok dan/ atau uang tunai) kepada bank mitra dan bank mitra kemudian menyalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan atau KPM
4. KMIS memesan barang kepada Bulog atau distributor lain dan kemudian melakukan pembayaran kepada mereka
5. Bulog mendistribusikan pesanan barang dari KMIS kepada masing-masing e-Warong
6. Peserta PKH mencairkan bantuan sosial (bantuan sosial non tunai berupa bahan pangan pokok dan/ atau uang tunai) di lokasi e-Warong.
7. Selain sebagai titik distribusi bansos, e-Warong juga dapat bekerjasama dengan KUBE produksi dalam memasarkan produk di e-Warong.

Konsep dan proses penyaluran bantuan sosial yang lebih terintegrasi secara jelas, mekanisme pendistribusian bansos non tunai dan/ atau tunai melalui e-Warong mempunyai kelebihan dibandingkan mekanisme sebelumnya. Selain bertujuan dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu program e-Warong KUBE PKH juga diharapkan dapat meningkatkan akses keluarga miskin ke pelayanan keuangan inklusif dan menghilangkan penyalahgunaan bantuan sosial. Melalui program ini juga diharapkan KPM bisa menerima bantuan sesuai jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, selain itu e-Warong diharapkan juga dapat berfungsi sebagai agen dari bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sehingga pembinaan keluarga miskin di

Indonesia tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga melibatkan dunia usaha.

Sejak diluncurkan oleh pemerintah melalui Kemensos e-Warong mulai menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Akhir tahun 2016 telah diresmikan 338 unit di 48 kabupaten/kota. Tahun 2017, ditargetkan 2.000 warung dibuka diberbagai pelosok Indonesia. Tahun 2018 Kemensos menargetkan peningkatan tiga kali lipat jumlah e-Warong dari tahun sebelumnya untuk mencapai 10.000 buah e-Warong seiring perluasan jangkauan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga 10 juta keluarga di tahun 2018. Salah satu kota di Indonesia yang sudah menerapkan program e-Warong KUBE PKH adalah Kota Malang

Kota Malang menjadi kota percontohan pertama di Indonesia dalam penerapan program e-Warong KUBE PKH. E-Warong pertama tersebut bertempat di Jl. Ikan Tombro, Desa Tanjung Sekar dan diresmikan langsung oleh Mantan Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 27 Juni 2016. Beliau mengungkapkan bahwa Kota Malang dipilih menjadi tempat percontohan e-Warong dikarenakan Kota Malang memiliki fasilitas yang mencukupi dan pemerintahan yang mendukung. (Informasi Publik, Bidang. 2016. *"Kota Malang Jadi Percontohan Penerapan e-Warong"*, diakses pada tanggal 22 Februari 2019 dari <https://malangkota.go.id/2016/06/28/kota-malang-jadi-percontohan-penerapan-e-warung/>). Beliau menyampaikan bahwa melalui program ini nantinya diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Malang. Selain itu disampaikan juga bahwa melalui program ini diharapkan indikasi pemotongan bantuan sosial tidak akan

terjadi. (Admin. 2016. "*Mensos RI Luncurkan e-warung di Kota Malang*", diakses tanggal 02 Februari 2017 dari <http://dinsos.jatimprov.go.id/index.php/2016-10-26-00-0458/dayasos/item/93-mensos-ri-luncurkan-e-warung-di-kota-malang>).

Tiga bulan setelah diluncurkannya e-Warong pertama di Kota Malang pihak Kemensos turun kedaerah untuk mengkaji kelemahan penerapan e-Warong. Setelah dilakukan pengkajian dilapangan, Kemensos bersama-sama dengan perwakilan dinas sosial dan perbankan menggelar pertemuan. Pertemuan tersebut tidak lain untuk membahas mengenai rendahnya transaksi penjualan di e-Warong pertama yang ada di Kota Malang. Berdasarkan catatan Bank BNI Malang yang ditunjuk Kemensos sebagai mitra e-Warong, transaksi baru mencapai Rp 8,9 juta. (Christiyaningsih. 2016. "*Kemensos Evaluasi E-Warong di Malang*", diakses tanggal 10 Maret 2019 dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/23/odxpex291-kemensos-evaluasi-ewarong-di-malang>). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa awal pelaksanaan program e-Warong di Kota Malang tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh angka transaksi di e-Warong yang masih tidak terlalu tinggi.

Setelah berjalannya e-Warong KUBE PKH di Kota Malang mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah berdiri dan beroperasi sebanyak 22 (dua puluh dua) e-Warong KUBE PKH yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di Kota Malang. (Dinas Sosial Kota Malang, 2018). Melihat jangka waktu implementasi program e-Warong di Kota Malang yang sudah lebih dari satu tahun dan melihat

bahwa adanya ketidakoptimalan pada awal pengimplementasian program di e-Warong yang ada di Kota Malang menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk membahas lebih dalam mengenai implementasi program e-Warong khususnya di e-Warong yang ada di Kota Malang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas implementasi program tersebut melalui dua e-Warong yang ada di Kota Malang, yakni e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu. Dengan demikian sangatlah penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Implementasi Program Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) di Kota Malang” (Studi Pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah sangat penting dan diperlukan untuk memberikan keterarahan pada penelitian dan memfokuskan pada suatu permasalahan guna mencapai jawabannya. Oleh karena itu uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu)?
2. Apa hambatan dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH?

C. Tujuan Penelitian

Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian dengan mengangkat perumusan masalah diatas tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanggungjawab Bersatu).
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat praktis maupun teoritis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan implementasi program.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai referensi bagi peneliti lanjutan tentang hal yang sama dengan penelitian ini.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengimplementasikan program khususnya implementasi program e-Warong KUBE PKH.

- c. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang terkait dengan implelementasi program e-Warong KUBE PKH

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk skripsi yang isinya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang yang berisi tentang program bantuan sosial e-Warong KUBE PKH meliputi sejarah singkat, mekanisme penyaluran bantuan sosial e-Warong, persebaran e-Warong di Indonesia dan di Kota Malang. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, kemudian juga dijelaskan tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi meliputi konsep dari administrasi publik, konsep implementasi, model-model implementasi program, konsep *Electronic Government (E-Government)* dan konsep e-Warong KUBE PKH.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian,

pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori yang telah ditetapkan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari pembahasan berdasarkan hasil penyajian data lapangan dan analisis teoritik dari penulis, kemudian dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran untuk Pemerintahan Kota Malang khususnya Dinas Sosial agar pengimplementasian program e-Warong di Kota Malang khususnya di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dan Maju Sejahtera lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian dan Konsep Administrasi Publik

Administrasi berasal dari istilah *Administration* yang memiliki makna dan pengertian dari yang paling sempit hingga pengertian yang luas, dan semuanya dapat ditemukan dalam suatu lingkungan tertentu yang disebut organisasi (Zainun, 2004). Organisasi tersebut tentunya merupakan organisasi yang bersifat lengkap dan yang mengandung seluruh unsur administrasi atau yang disebut juga dengan organisasi administrasi atau *administrative organization*. Dalam arti sempit organisasi berarti urusan yang berkaitan dengan pekerjaan tulis menulis. Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan peranan yang ditampilkan oleh pemimpin tingkat atas suatu organisasi, terutama dalam hubungan pimpinan tingkat atas itu dengan hal-hal dan pihak-pihak lain di luar anatomi organisasi yang dipimpinnya. Dalam peranan dan kedudukan tersebut, pimpinan tingkat atas yang tertinggi seringkali disebut administrator. Dalam kedudukan sebagai administrator ini, pimpinan berwenang menetapkan kebijakan yang mengikat pihak lain di luar tubuh organisasi yang dipimpinnya, seperti yang dimiliki oleh seorang Presiden atau Kepala Negara. Sedangkan administrasi publik secara sederhana (Siagian, 1997), dapat didefinisikan sebagai: Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan

negara. Dalam hal tersebut dapat meliputi implementasi kebijakan pemerintah, koordinasi dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan tersebut, serta proses yang bersangkutan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, berkaitan dengan teknik dan kecakapan aparturnya dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Chandler dan Plano dalam Keban (2008 :4) bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan dalam suatu organisasi atau negara dimana terdapat administrator sebagai pimpinan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan dan terdapat personel publik yang terorganisir dan terkoordinasi dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi atau negara. Didalam tujuan tersebut terdapat pula proses formulasi, implementasi dan pengelolaan dari kebijakan yang ditetapkan.

B. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Implementation*" yang didalam bahasa Indonesia menjadi implementasi sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaannya dan penerapannya. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *To Implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*.

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Pengertian tersebut memiliki arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2008:67).

Usman (2002: 170) menjelaskan bahwa implementasi bermuara pada sebuah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem yang bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi menurut Guntur Setiawan (2004: 39) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Joko Susilo (2007: 174) menyebutkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu dalam kelompok).

Menurut Jones (dalam Tangkilisan, 2003: 17) terdapat tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi yaitu:

- a. Penafsiran: yaitu kegiatan yang menerjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
- b. Organisasi: yaitu unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan.
- c. Penerapan: yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayan, upah dan lainnya.

Dari beberapa pengertian implementasi diatas dapat dilihat bahwa suatu implementasi bermuara kepada terlaksananya suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dapat diartikan bahwa implementasi sebagai suatu kegiatan yang terencana dan sistematis yang melibatkan beberapa sumber-sumber potensial serta dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kegiatan.

C. Model-Model Implementasi Program

Implementasi program dapat dilihat dari berbagai perspektif atau pendekatan. Untuk melihat keefektifan implementasi ada banyak model yang dapat digunakan dari beragam perspektif para ahli, diantaranya:

1. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2005:103) menjelaskan bahwa ada tiga variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- a. Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis
- b. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi dan fisik atau geografis.

- c. Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa keberhasilan implementasi suatu program tidak terlepas dari logika dari suatu kebijakan, lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan, dan kemampuan implementor. Ketiga faktor tersebut akan saling mempengaruhi dan menjadi dasar untuk melihat keberhasilan implementasi dari suatu program.

2. Model Charles O. Jones

Menurut Charles O. Jones (dalam Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu:

- a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas

- b. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

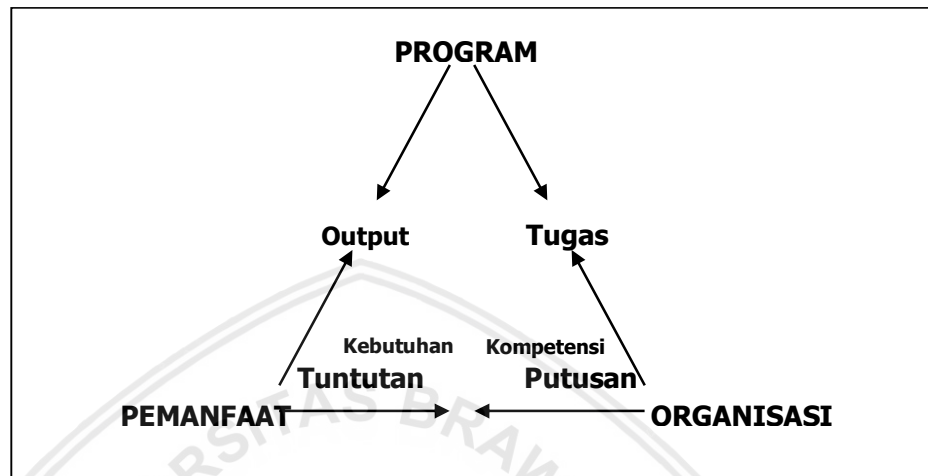
Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa terdapat tiga pilar aktivitas yang akan mempengaruhi pengoperasian ataupun implementasi dari suatu program yakni, pengorganisasi, interpretasi dan penerapan atau aplikasi dari program.

3. Model David C. Korten

Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 11-12) membuat Model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

- c. Pertama, kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- d. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- e. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi

untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.



Gambar 2. Model Kesesuaian

Sumber : David C. Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 12)

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas *output*-nya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga

unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menggunakan model kesesuaian oleh David C. Korten, yakni elemen program itu sendiri, elemen pelaksanaan program dan elemen kelompok sasaran program. Alasan peneliti menggunakan model tersebut dikarenakan model kesesuaian secara garis besar telah meliputi dan tidak mengurangi isi dari faktor-faktor implementasi menurut para ahli yang lainnya sekaligus lebih mudah untuk peneliti pahami dalam mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (Studi Pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

D. Konsep *Electronic Government* (e-Government)

1. Pengertian *e- Government*

E- Government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology-ICT*). Berbagai negara dibelahan dunia berlomba mengimplementasikan *E- Government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya.

E- Government merupakan kependekan dari *Electronic Government*, atau ada yang menyebutnya dengan *e-Gov*. *Electronic Government* adalah salah

satu bentuk atau model sistem pemerintah yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumberdaya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.

Menurut Conrad (dalam SANKRI I 2003:443) *Electronic Administration (E-Adm)* merupakan substitusi atau ungkapan lain dari istilah *e-Gov* yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utama untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada pengguna jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal.

World Bank (dalam Indrajit, 2002: 2) mendefenisikan *e-Government* sebagai berikut, "*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network), the internet and mobile computing) that have ability to transform relations with citizens, business, another arm government*".

Defenisi *e-Government* di atas dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan informasi (seperti wide area network, internet, dan komputerisasi) organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan.

Lebih lanjut UNDP (dalam Indrajit, 2002: 2) mendefinisikan konsep *E-government* secara lebih sederhana yaitu, “*E-government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies*”.

Dalam Inpres No. 3 tahun 2003, “*E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif”.

Sedangkan Kurniawan (dalam Hardiyansyah, 2011:107) mengungkapkan bahwa *e-Government* dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sector publik (baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalkan proses pelayanan public yang efisien, transparan dan efektif.

Lebih lanjut A.S Hikam dalam (Hardiyansyah 2011:108) mengungkapkan bahwa :

E-government merupakan elektronikasi layanan pemerintah terhadap masyarakat atau warga negara, selain itu juga merupakan proses bagi demokratisasi, dengan adanya *E-government* berarti juga memotong jalur birokrasi yang ada, yang bertujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bias dinikmati oleh seluruh warga negara.

Dari beragam pengertian tentang *e-Government* yang telah dipaparkan di atas setidaknya ada beberapa kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-Government*, yaitu:

- a. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*)
- b. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet)
- c. Bertujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan (Indrajit, 2002: 4)

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep *e-Government* secara umum adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan pemerintah untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk memberikan akses dan informasi pemerintah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

2. Tujuan *Electronic Government (e-Government)*

Tujuan *e-Government* adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bias dinikmati oleh seluruh warga negara. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam buku III SANKRI (2004:342) dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud mencakup dua aktifitas yang berkaitan, yaitu (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis, dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara

Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *electronic government*, dimana dalam hal ini *electronic government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan antara lain:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan mempercepat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan nasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintahan dan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan tujuan dari *E-government* adalah pemanfaatan kemajuan teknologi oleh pemerintah di dalam meningkatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat luas serta membangun sistem manajemen dan proses kerja di dalam pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan efisien.

3. Manfaat *E-Government*

Al Gore dan Tony Blair dalam (Indrajit 2006: 5), telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *E-Government* bagi suatu negara, antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan;
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan transaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dengan diterapkannya konsep *e-Government* dalam suatu negara akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah, masyarakat, dan kalangan bisnis.

4. Klasifikasi *E-Government*

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru yaitu (Indrajit, 2002: 41):

- a. *Government to Citizens* (G2C)
Dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *e-Government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

- b. *Government to Business (G2B)*
Kegiatan transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.
- c. *Government to Government (G2G)*
Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara *online* antar departemen pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi misal hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada ditanah air.
- d. *Government to Employees (G2E)*
Dimana aplikasi ini juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja disejumlah instansi sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan klasifikasi dari *e-Government* tersebut dapat dilihat bahwa *e-Government* akan memberikan manfaat yang besar dalam jalannya suatu pemerintahan. *E-Government* memberikan ruang sebesar-besarnya bagi pemerintah agar peran dari pemerintahan tersebut lebih bisa dirasakan oleh masyarakat atau *stakeholdernya* maupun bagi pemerintahan itu sendiri.

5. Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan *E-Government*

Hambatan dan tantangan dalam penerapan *e-Government* menurut Kementerian Komunikasi (dalam Haloho, 2017: 29) sebagai berikut :

- a. *E-Leadership*, mencakup prioritas dan inisiatif pemimpin dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
- b. Infrastruktur jaringan informasi, mencakup kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses kualitas, lingkup dan biaya jasa akses.
- c. Pengelolaan informasi, mencakup kualitas dan pengelolaan informasi.

- d. Lingkungan bisnis, mencakup kondisi pasar, sistem perdagangan dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi.
- e. Masyarakat dan sumberdaya manusia, mencakup difusi teknologi informasi didalam masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa hambatan dan tantangan dalam penerapan *e-Government* berasal dari berbagai macam hal. Hambatan dan tantangan tersebut haruslah diatasi sedini dan semaksimal mungkin agar penerapan *e-Government* khususnya di Indonesia dapat berjalan lebih maksimal, efektif dan efisien.

E. Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH)

1. Pengertian e-Warong KUBE PKH

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan tertulis bahwa:

“Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan / atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE”. (Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017: 4)

Dari pengertian di atas, e-Warong melayani 4 (empat) hal yaitu : (1) Pelayanan jasa pencairan bantuan sosial non tunai berupa bahan pangan pokok secara elektronik; (2) penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok warga

masyarakat lingkungan sekitarnya; (3) Pemasaran hasil produksi penerima bantuan dan (4) penarikan dana. Berikut Logo dari e-Warong KUBE PKH



Gambar 3. Logo Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH)
Sumber : Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan

2. Dasar Hukum Program e-Warong KUBE PKH

Adapun yang menjadi dasar hukum dari program e-Warong KUBE PKH tertuang pada :

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
- b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

3. Tujuan dan Sejarah Program e-Warong KUBE PKH

Pada 2013, Kemensos dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) bersepakat untuk mensinergikan sumberdaya para pihak terkait dalam rangka memberdayakan Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) dan koperasi. Kerjasama ini bertujuan melakukan pembinaan dan pengembangan KUBE agar kelembagannya dapat berstatus koperasi. Beberapa upaya yang akan dilakukan bersama adalah (i) pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk bimbingan keterampilan kewirausahaan; (ii) peningkatan akses sumber pembiayaan/keuangan; dan (iii) peningkatan status kelembagaan KUBE menjadi koperasi.

Dari kerjasama tersebut ditentukan juga kewajiban dari masing-masing kementerian. Kemensos bertanggung jawab dalam hal:

- a. Memfasilitasi pembentukan, pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- b. Melakukan pembinaan teknis pengembangan kelembagaan, sosial dan ekonomi KUBE secara berkelanjutan, dan
- c. Melakukan inventarisasi dan pendataan KUBE untuk memenuhi persyaratan status kelembagaan menjadi koperasi.

Sementara itu, Kemenkop dan UKM bertanggung jawab dalam hal:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- b. Memfasilitasi pembentukan koperasi bagi KUBE yang memenuhi syarat
- c. Meningkatkan kualitas tata laksana pengelolaan koperasi, dan
- d. Meningkatkan akses koperasi ke sumberdaya produktif

Selanjutnya pada 26 April 2016 melalui Rapat Terbatas tentang keuangan inklusif Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran menterinya tentang (i) pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang

inklusif, (ii) penyaluran semua bantuan sosial (bansos) dan subsidi secara *non-tunai* dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pemantauan, serta mengurangi penyimpangan; dan (iii) perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos menjadi satu kartu (Mawardi, dkk, 2017 : 2).

Terkait dengan instruksi Presiden Joko Widodo tersebut Menteri Sosial kemudian mendorong sinergi antar program penanganan kemiskinan agar hasilnya mampu memberikan dampak luas, efektif dan efisien. Langkah-langkah yang diambil adalah pemberdayaan bagi pendamping PKH dan bagi masyarakat yang didampingi dan mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku di dalam sistem keuangan inklusif, dengan tujuan mengupayakan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Dalam mencapai tujuan tersebut, proses pengembangan KUBE harus dikerjakan secara holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sistem produksi, sampai pada pemasaran hasil usahanya.

4. Rancangan Program e-Warong KUBE PKH

Kemensos menginisiasi program e-Warong KUBE PKH untuk menyalurkan bansos dan subsidi dengan sistem *non-tunai*. Sebagai kios, e-Warong KUBE PKH adalah sarana yang didirikan dan dikelola secara gotong royong dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). E-Warong KUBE PKH dirancang sebagai tempat menjual bahan pangan pokok dan barang yang diproduksi KUBE dengan sistem transaksi *non-tunai* menggunakan jaringan internet.

Selain Kemensos dan jajaran teknis, pemangku kepentingan utama yang berperan dalam pelaksanaan program ini adalah (i) KMIS (Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera), (ii) bank mitra, (iii) bulog atau pemasok barang lainnya, dan (iv) Kube Jasa. Secara garis besar, masing masing pemangku kepentingan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Kemensos

Dalam rangka program e-Warong KUBE PKH, Kemensos melalui Ditjen PFM bertindak sebagai penanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan program.

b. KMIS (Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera)

KMIS merupakan koperasi primer yang beranggotakan para peserta PKH. Secara resmi KMIS berdiri pada 5 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial dan UKM No. 001782/BH/M.KUKM.2/VIII/2016. Kemensos memberikan mandat kepada KMIS untuk mengelola e-Warong KUBE PKH. KMIS pada dasarnya dirancang untuk keperluan penerima bansos dan subsidi melalui kerjasama dengan KUBE Jasa. Maka KMIS melakukan kontrak kerja sama dengan distributor dalam menyediakan bahan pangan pokok (dalam hal ini bulog) yang akan dipasarkan melalui e-Warong KUBE PKH. Selain itu, dalam rangka memperluas inklusi keuangan dan mengembangkan transaksi *non-tunai* di e-Warong KUBE PKH, KMIS harus bekerjasama dengan Perhimpunan Bank

Negara (HIMBARA) sebagai bank mitra. KMIS juga mendapat tugas memberdayakan penerima bansos dan subsidi agar memiliki jiwa kewirausahaan, berlaku hemat, dan disiplin, serta membantu mempersiapkan standarisasi produk Kube Produksi.

c. Bank Mitra

Dalam penyaluran bansos dan subsidi *non-tunai*, program e-Warong KUBE PKH mendapat dukungan HIMBARA dengan menggunakan teknologi berbasis situs web dan e-wallet (dompet elektronik). Bantuan ini diberikan bank anggota HIMBARA melalui kontrak kerjasama dengan KMIS. Melalui kerjasama ini Kube Jasa akan menjadi agen bank dan dapat memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) atas jaminan rekomendasi KMIS. Sebagai contoh sebagai agen Bank BNI, e-Warong KUBE PKH dapat melakukan fungsi pembukaan rekening, setoran dan tarik tunai, pembelian (pulsa), dan pembayaran (listrik dan air) bagi penerima bansos dan masyarakat umum. Dalam kaitannya dalam program e-Warong KUBE PKH, bank HIMBARA yang ikut bekerjasama dalam program e-Warong KUBE PKH menjamin tersalurnya bansos dan subsidi kepada penerima secara tepat sasaran berdasarkan data yang disediakan Kemensos.

d. Kube Jasa

Dalam rancangannya, pemilik dan pengelola e-Warong KUBE PKH adalah KUBE Jasa (kelompok ini merupakan kelompok bentukan

baru yang khusus dibuat untuk program e-Warong KUBE PKH) yang terdiri dari tiga orang pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) dan tujuh anggota penerima bansos dan seorang supervisor. Kesepuluh orang tersebut wajib bersepakat melalui perjanjian formal di antara mereka untuk menentukan lokasi e-Warong KUBE PKH dan menunjuk pengelolanya. Dalam mendirikan e-Warong KUBE PKH, Kube Jasa mendapatkan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) sebesar Rp 10.000.000,00 dari Kemensos untuk perbaikan/pendirian bangunan kios, dan pembelian rak etalase, dan alat-alat lain. Anggota KUBE Jasa adalah mereka yang bertempat tinggal disekitar lokasi e-Warong KUBE PKH dan bertanggungjawab atas keberlangsungan operasi e-Warong KUBE PKH dan memelihara hubungan baik dengan KUBE lain. Secara sukarela, anggota KUBE Jasa menjadi anggota KMIS dan dalam mengelola stok barang dan lalu lintas transaksi keuangan bertanggung jawab kepada KMIS. Setiap KUBE Jasa yang mendapat penetapan resmi oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dijen PFM) memperoleh bansos sebesar Rp 20.000.000,00 untuk pembelian peralatan, perlengkapan, dan model kerja e-Warong.

e. Bulog

Distributor yang sejauh ini diperankan oleh Bulog merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyediakan bahan pangan pokok

dalam jumlah dan mutu terjamin, dan dengan harga terjangkau. Dalam melaksanakan tugasnya, distributor bekerjasama dengan KMIS dan bank melalui perjanjian formal untuk mengembangkan sistem pasokan dan pembayaran yang efektif dan efisien. Pemesanan barang dilakukan secara terpusat oleh KMIS untuk disalurkan ke e-Warong KUBE PKH dengan harga lebih murah daripada harga warung di sekitarnya.

5. Kriteria dan Persyaratan

a. Kriteria dan Persyaratan Pembentukan e-Warong KUBE PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Saran Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan, kriteria pembentukan e-Warong KUBE PKH meliputi:

1. Lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik
2. Melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) keluarga penerima manfaat bantuan sosial;
3. Menggunakan tempat/rumah pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE; dan
4. Melaksanakan transaksi Bantuan Sosial secara *non-tunai*. (Permensos, Nomor 25, 2016 : 5)

Persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH dilaksanakan dengan tahapan:

1. Membentuk KUBE Jasa; dan
2. Memiliki tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH
(Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017:6)

b. Syarat Anggota

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan anggota KUBE Jasa harus memenuhi syarat:

1. Peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera dan/ atau penerima manfaat bantuan sosial lainnya;
2. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
3. Telah menikah dan/ atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan
4. Memiliki potensial dan keterampilan. (Permensos Nomor 25, 2016 : 6)

6. Pendanaan Program e-Warung KUBE PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan sumber pendanaan e-Warung KUBE PKH berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (Permensos Nomor 25, 2016 : 15)

7. Pihak-Pihak Terlibat Dalam Pelaksanaan Program e-Warung KUBE PKH

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program e-Warung KUBE PKH adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Sosial
- b. Kementerian Teknis Lainnya
- c. Perbankan (Himbara)
- d. Perum Bulog/Distributor Pangan

- e. Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten
 - f. Bappeda Kabupaten
 - g. Dinas Teknis Lainnya
 - h. Camat
 - i. Kepala Desa/Lurah
 - j. Kelompok Usaha Bersama di Bidang Jasa
 - k. Penyelia/Pendamping
- (Direktorat PFM Pesisir, PPK dan PAN. 2017. *“Bahan Diskusi Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan”*, diakses pada tanggal 14 November 2018 dari <http://simontok.kemensos.go.id/home/e-warong.php>)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, sebab hal tersebut merupakan cara yang sangat menentukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2013:2), “Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, mengantisipasi masalah”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan hal yang sangat penting yang akan membantu peneliti dalam menentukan data-data yang akan dikumpulkan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sukmadinata (2006:72) menyebutkan bahwa:

“Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya”.

Alasan peneliti memilih penelitian deskriptif karena sesuai dengan tujuan peneliti yakni mendapatkan data untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau keadaan serta hambatan-hambatan selama proses implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang khususnya pada

e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010:15) bahwa:

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Melalui metode kualitatif, peneliti melakukan penjelajahan pada tahap awal. Selanjutnya, peneliti mulai melakukan pengumpulan data yang mendalam untuk menemukan gambaran terhadap pelaksanaan dan hambatan pada proses implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Menurut Moleong (2014:12), “Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”. Moleong juga menjelaskan penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan

oleh dua hal yaitu batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus dan penetapan fokus dapat lebih dekat bila dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dengan fokus. Maka, penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian sangat penting dalam menemukan batas penelitian. Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan awal yang ditetapkan untuk diteliti. Penentuan fokus penelitian akan memudahkan dalam pengumpulan data dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan tempat lokasi penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mendeskripsikan implementasi dan hambatan-hambatan dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu) dengan menggunakan elemen-elemen dalam model kesesuaian oleh David C. Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008:11) yakni elemen program itu sendiri, elemen pelaksanaan program dan elemen kelompok sasaran.

1. Implementasi Program E-Warong KUBE PKH (Studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu) meliputi:

- a. Elemen Program

Kesesuaian antara program e-Warong KUBE PKH dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

b. Elemen Pelaksanaan Program

Kesesuaian antara program e-Warong KUBE PKH dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program e-Warong dengan kemampuan organisasi pelaksana.

1. Sumberdaya Manusia Pelaksana Program
2. Kognisi (pemahaman dan pengetahuan),
3. Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak dan Intensitas (keberlanjutan) dari respon pelaksana

c. Elemen Kelompok Sasaran

Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

d. Sumberdaya

Sumberdaya yang mendukung berjalannya proses implementasi program. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong kelancaran implementasi program.

e. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Pada waktu implementasi program tidak terlepas dari pengaruh ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi dari kelompok sasaran dan

kondisi sosial dengan melihat bagaimana respon dari masyarakat dilingkungan diimplementasikannya program.

2. Hambatan-hambatan dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH dilihat dari:

- a. Hambatan dilingkungan Dinas Sosial Kota Malang.
- b. Hambatan dilingkungan Bank BNI.
- c. Hambatan dilingkungan e-Warong KUBE PKH

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong (2005:128) Mengartikan lokasi penelitian sebagai tempat melaksanakan aktifitas penelitian, dalam penentuan lokasi dilakukan dengan mempelajari dan mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Selain itu dipertimbangkan juga faktor geografis dan praktis seperti keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Situs penelitian adalah menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti. Penetapan situs penelitian didasarkan bahwa pada bagian ini diperoleh validasi dan aktualisasi data yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan pemaparan diatas lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Pertimbangan peneliti untuk memilih lokasi penelitian di Kota Malang dikarenakan Kota Malang merupakan daerah percontohan pertama di Indonesia dalam penerapan layanan e-Warong KUBE PKH yang bertempat di Jalan Ikan Tombro, Kelurahan Tanjung Sekar yang diresmikan pada tanggal 27 Juni 2016, namun pada awal pelaksanaan ditemukan adanya ketidakoptimalan. Melihat jangka waktu implementasi

program sampai dengan saat ini yang sudah lebih dari satu tahun dan ditemukannya ketidakefektifan implementasi program di e-Warong yang ada di Kota Malang pada awal pelaksanaan maka penting bagi peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dan hambatan implementasi program di e-Warong yang ada di Kota Malang. Sedangkan situs penelitiannya berada di:

1. Dinas Sosial Kota Malang.

Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kota Malang merupakan lembaga yang diberikan kewenangan dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang.

2. E-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.

Merupakan e-Warong di Kota Malang yang sudah beroperasi sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan saat ini. Melihat jangka waktu implementasi program di kedua e-Warong tersebut yang sudah cukup lama dan informasi dari pihak Dinas Sosial yang menyebutkan bahwa kedua e-Warong tersebut merupakan e-Warong di Kota Malang yang perkembangannya cukup signifikan dibandingkan dengan e-Warong lain yang ada di Kota Malang. Maka kedua e-Warong tersebut merupakan tempat yang ideal untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

D. Jenis Data

Menurut Lofland & Lofland (1984) yang dikutip dalam (Moeloeng, 2005:157) menyebutkan jika sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan digunakan sebagai data utama. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau film (Moleong, 2005:157). Sumber data primer dalam penelitian implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui kegiatan wawancara.
2. Data Sekunder merupakan data-data yang bertujuan untuk mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen, laporan- laporan, arsip-arsip, yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen di instansi-instanasi yang terkait dengan penelitian, catatan resmi pejabat yang terkait dengan penelitian ini, dan data-data pendukung lainnya yang terkait dengan penelitian ini, selain itu peristiwa-peristiwa dilapangan yang terkait dengan penelitian ini juga akan dijadikan sumber-sumber data sekunder melalui observasi.

Sumber data adalah dari mana peneliti menemukan data yang diperoleh. Sumber data yang diperoleh dari seorang yang berkaitan dengan pelaksanaan permasalahan yang ada dan dapat menunjang penelitian ini, maka sumber datanya yaitu:

1. Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian Implementasi Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) di Kota Malang yaitu :

- a. Ibu Sumarti selaku Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Malang.
- b. Mba Labudda MH selaku Koordinator Kota Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Kota Malang. Mas Fauzi selaku Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH) Kota Malang.
- c. Ibu Sri Widya Y selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.
- d. Ibu Wahyu Puji Astutik selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera.
- e. Pak Nasianto selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.
- f. Mas Rahmat Prayudi selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera.

- g. Mba Eka Aprilia Aprilia Hani selaku petugas ABB (*Asistance Branchless Banking*) Bank BNI.

2. Dokumen

Dokumen dapat memuat buku referensi, jurnal, artikel, dan situs yang berkaitan dengan pelaksanaan program e-Warung KUBE PKH di Kota Malang. Adapun dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
- c. *Portable Document Format* (PDF) yang menjelaskan tentang elektronik warung kelompok usaha bersama program keluarga harapan, dibuat oleh Kementerian Sosial, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.
- d. *Portable Document Format* (PDF) yang menjelaskan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha

Bersama Program Keluarga Harapan, dibuat oleh Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

3. Peristiwa di Lapangan

Peneliti melihat langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian dan kemudian dipadukan untuk mendukung hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan data atau informasi akurat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2009:309), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang relevan dengan obyek yang diteliti adalah:

1. Wawancara Langsung (Interview)

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2013:231) mengatakan bahwa, “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Jadi, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari sumber informasi secara langsung melalui tanya jawab kepada informan dan menyimpannya sebagai sebuah data.

Esterberg (dalam Sugiyono, 2013:231) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi

terstruktur dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Alasan peneliti menggunakan jenis wawancara ini agar peneliti mampu menentukan permasalahan secara lebih terbuka karena setiap informan wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun frekuensi dan durasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan adalah sebagai berikut :

- a. Ibu Sumarti selaku Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Malang diwawancarai sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 13 November 2018 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang dengan durasi wawancara selama 30 menit hingga 40 menit pada saat diwawancara.
- b. Mba Labudda MH selaku Koordinator Kota Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Kota Malang diwawancarai 1 (satu) kali yaitu pada tanggal, 13 November 2018 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang dengan durasi wawancara 30 menit sampai 40 pada saat diwawancara.
- c. Mas Fauzi selaku Koordinator Program Keluarga Harapan (Korkot PKH) Kota Malang diwawancarai 1 (satu) kali yaitu pada tanggal, 08 November 2018 di Kantor Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH), Dinas Sosial Kota

Malang dengan durasi wawancara 20 menit sampai 30 menit pada saat diwawancara.

- d. Ibu Sri Widya Y selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu diwawancarai 1 (satu) kali yaitu pada tanggal, 22 November 2018 di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dengan durasi wawancara 40 menit sampai 45 menit pada saat diwawancara.
- e. Ibu Wahyu Puji Astutik selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera diwawancarai 1 (satu) kali yaitu pada tanggal, 15 November 2018 di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dengan durasi wawancara 40 menit sampai 45 menit pada saat diwawancara.
- f. Pak Naisanto selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu diwawancarai 1 (satu) kali yaitu pada tanggal, 04 November 2018 e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dengan durasi wawancara 30 menit sampai 35 menit pada saat diwawancara.
- g. Mas Rahmat Prayudi selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera diwawancarai 1 (satu) kali yaitu pada tanggal, 16 November 2018 di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dengan durasi wawancara 35 menit sampai 40 menit pada saat diwawancara.

- h. Mba Eka Aprilia Hani selaku petugas ABB Bank BNI diwawancarai 1 (satu) kali yaitu pada tanggal, 23 November 2018 di Kantor ABB (*Assistance Branchless Banking*) BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Malang dengan durasi wawancara 25 menit sampai 30 menit pada saat diwawancara.

Berdasarkan frekuensi dan durasi wawancara diatas, jumlah seluruh informan yang diwawancara dalam penelitian implementasi program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) di Kota Malang (Studi Pada E-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu) adalah 8 (delapan) orang. Dalam proses wawancara ini, alat bantu yang digunakan oleh peneliti adalah buku catatan, alat tulis, kamera, dan perekam suara.

2. Observasi

Marshall (dalam Sugiyono, 2013:226) mengemukakan bahwa, “Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna perilaku tersebut”. Dua hal yang terpenting dalam observasi adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi, observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2013:227), observasi digolongkan menjadi tiga yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar dan observasi tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi

partisipatif pasif. Alasan peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif karena peneliti hanya datang ke lokasi dan situs penelitian namun tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan e-Warong KUBE PKH. Adapun yang menjadi objek observasi menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2013:229) terdiri atas tiga komponen yaitu *place*, *actor* dan *activities*. Peneliti melakukan observasi di:

- a. Kantor Dinas Sosial Kota Malang
- b. E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu
- c. E-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera

Observasi dilakukan kepada para informan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan kegiatan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Bersama dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu). Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku catatan, alat tulis, kamera dan perekam suara.

3. Dokumentasi

Usman (2008:73) berpendapat bahwa, “Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen”. Sedangkan dokumen menurut Sugiyono (2013:240) adalah “Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang”. Dalam dokumentasi, data dapat dikumpulkan dengan cara

menulis, mencatat, melakukan *fotocopy*, memfoto dan penyalinan data-data yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa dokumentasi seperti:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
- c. *Portable Document Format* (PDF) yang menjelaskan tentang elektronik warung kelompok usaha bersama program keluarga harapan, dibuat oleh Kementerian Sosial, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.
- d. *Portable Document Format* (PDF) yang menjelaskan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan, dibuat oleh Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau menggunakan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan menggunakan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen penunjang yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Jadi dalam hal ini peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian, yaitu dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian.
2. *Interview guide* (pedoman wawancara) adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang menjadi sumber data untuk mendapatkan data primer. Selain itu ada buku catatan lapangan (*fieldnote*) yaitu buku yang digunakan untuk mencatat informasi dari lapangan.
3. Alat penunjang lain seperti: alat tulis, buku catatan (*fieldnote*) serta alat-alat dokumentasi seperti *camera* dan *handphone*.

G. Validitas Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna perlu dilakukan validitas data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara triangulasi data. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategis dalam suatu penelitian untuk menjaring data/informasi. Triangulasi tidak hanya membandingkan data dari berbagai sumber data, akan tetapi juga mempergunakan berbagai teknik dan metode untuk

meneliti dan menjaring data/ informasi dari fenomena yang sama (Wirawan, 2011: 156).

Dalam penelitian ini digunakan 4 jenis triangulasi (Bungin, 2011: 54), yaitu:

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti
Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu dengan meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.
2. Triangulasi dengan Sumber Data
Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan.
3. Triangulasi dengan Metode
Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan di observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.
4. Triangulasi dengan Teori
Hal ini dapat dilakukan sebagai pembanding teori dengan menyertakan usaha pencapaian teori dan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.

Keempat macam triangulasi diatas adalah cara peneliti dalam melakukan analisis data dengan menggunakan triangulasi sumber data dan teknik. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan informan yang dituju. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengkroscek/ mengecek data

yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian karena melalui proses ini data yang telah dikumpulkan dapat berarti dan bermakna yang sangat berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Analisis data menurut Sugiyono (2013:244) yaitu, “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Peneliti menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana untuk menganalisis data hasil penelitian. Alasan peneliti menggunakan model tersebut dikarenakan alur kegiatan dalam model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana lebih mudah dipahami oleh peneliti yang mana hal tersebut akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian sehingga bisa mendeskripsikan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu) serta hambatan dalam implementasi tersebut.

Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) menyebutkan bahwa analisis data terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari beberapa narasumber yang relevan dan berhubungan dengan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi di Dinas Sosial Kota Malang, e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dan pengumpulan dokumentasi yang relevan dengan program e-Warong KUBE PKH dilakukan peneliti untuk menunjang dan memperkuat data-data dari hasil wawancara. Pada tahap ini, peneliti melakukannya secara berulang-ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan data agar mencapai kejenuhan data, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat maksimal.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kegiatan dalam kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengambil data yang pokok dan penting dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya. Setelah peneliti mendapatkan data melalui kegiatan wawancara dengan para informan, observasi di Kantor Dinas Sosial Kota Malang, e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu dan pencarian dokumentasi yang berkaitan dengan program e-Warong KUBE PKH, selanjutnya peneliti melakukan proses

pemilihan yakni memilih hal-hal yang pokok dari data yang sudah didapatkan tersebut.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

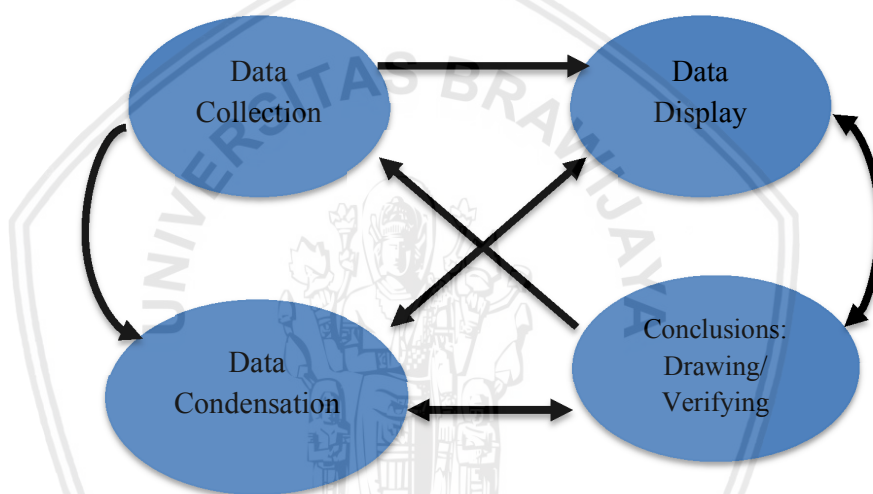
Setelah melakukan kondensasi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data berupa teks narasi hasil wawancara dengan informan, gambar (foto) kegiatan-kegiatan di e-Warong Maju Bersama dan e-Warong Tanjungrejo Bersatu, bagan struktur organisasi e-Warong Maju Bersama dan e-Warong Tanjungrejo Bersatu dan tabel jumlah penduduk miskin di Kota Malang. Dengan melakukan penyajian data-data tersebut memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa-peristiwa yang ditemui.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung linear, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif, karena menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami dan mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam, komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif. Dalam penelitian ini proses analisa dilakukan semenjak data awal

dikumpulkan. Oleh karena itu kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sangat tentatif atau kabur. Agar kesimpulan lebih *grounded* maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian.

Berdasarkan uraian analisa tersebut dalam penyajian data dan penulisan skripsi peneliti merujuk pada poin-poin seperti telah dijelaskan sebelumnya sehingga dalam proses penyusunan penelitian bisa lebih terarah. Uraian analisa diatas dapat digambarkan ke dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Analisis Data Kualitatif
Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang

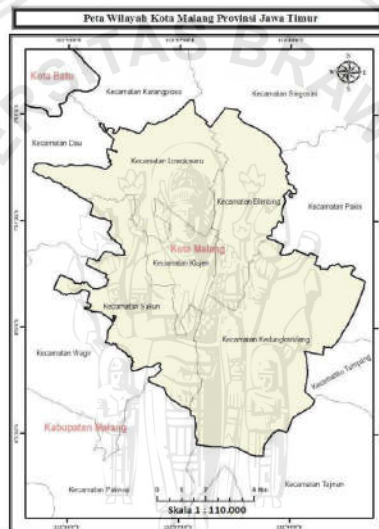
a. Profil Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi sehingga udara terasa sejuk. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

Sebagai kota pendidikan, Kota Malang memiliki bermacam fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus, perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Industri juga sangat beragam di Kota Malang mulai dari skala kecil hingga besar. Industri skala kecil hingga menengah saat ini terus berkembang dengan adanya pembinaan, penanaman modal, dan peningkatan mutu oleh Pemerintah Kota Malang, sedangkan industri skala besar terus diperkenalkan secara luas untuk mendukung produktivitas Kota Malang sebagai kota industri. Potensi alam yang melimpah menjadikan Kota Malang sebagai kota pariwisata yang banyak mengundang para wisatawan lokal hingga mancanegara. Pemandangan alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh, dan asri dengan bangunan kuno peninggalan Belanda memiliki daya tarik tersendiri. Berbagai pilihan tempat wisata, dan perbelanjaan baik

yang bersifat tradisional maupun modern tersebar di berbagai penjuru. Berkat daya tarik tersebut Kota Malang memiliki banyak pendatang yang kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa, pekerja dan pedagang. Sebagian besar golongan pedagang dan pekerja berasal dari wilayah sekitaran Kota Malang. Sedangkan untuk golongan pelajar dan mahasiswa dominan berasal dari luar daerah.

b. Kondisi Geografis dan Iklim Kota Malang



Gambar 5. Peta Kota Malang
Sumber : Kota Malang Dalam Angka, 2017

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada posisi $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ bujur timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;

2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Luas wilayah Kota Malang adalah 110,06^okm² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen dan Lowokwaru. Luas wilayah kecamatan tersebut dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2. Luas Kecamatan dan Presentase Terhadap Luas Kota

Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Presentase Terhadap Luas Kota (Km ²)
Kedungkandang	38,98	36,24
Sukun	20,97	19,05
Klojen	8,83	8,02
Blimbing	17,77	16,15
Lowokwaru	22,60	20,53
Jumlah	110,06	100,00

Sumber : Kota Malang dalam Angka, 2017

Melihat dari aspek topografisnya, Kota Malang terletak pada posisi yang cukup tinggi, yakni 440 – 667 meter di atas permukaan laut. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi di dalam sektor pariwisata. Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek – Kalisari

– Bango, dan Sungai Amprong. Kondisi Iklim, Kota Malang relatif nyaman. Rata – rata suhu udara berkisar antara 22,2°C sampai 24,5°C sedangkan suhu maksimumnya mencapai 32,3°C dan suhu minimumnya 17,8°C. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan 2 iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di Kota Malang selama tahun 2017 terjadi pada awal dan penghujung tahun, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, Juni, Oktober dan November. Pada bulan Juli dan September curah hujan di Kota Malang relatif rendah.

c. Kondisi Demografis Kota Malang

Kondisi Demografis merupakan kondisi kependudukan di suatu wilayah. Data penduduk menurut sensus penduduk (SP) 2000, 2010, dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Kota Malang tahun 2016 adalah sebanyak 856.410 jiwa dimana terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 422.276 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 434.134 jiwa. Dengan jumlah tersebut rasio jenis kelamin penduduk di Kota Malang adalah sebesar 97, 2 dengan demikian setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97, 98 penduduk laki-laki. Untuk menjelaskan secara detail, berikut disajikan jumlah penduduk di Kota Malang.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Malang dan Rasio Menurut Kecamatan

Kecamatan	Penduduk (Orang)		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
Kedungkandang	93,609	94,566	188,175	98,9
Sukun	95,128	96,385	191,513	98,7
Klojen	49,338	54,299	103,637	90,8
Blimbing	88,454	90,110	178,564	98,1
Lowokwaru	95,747	98,774	195,521	96,9
Jumlah	422,276	434,134	856,410	97,2

Sumber: Kota Malang dalam Angka, 2017

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk per-tahun adalah 0,56, sehingga kepadatan penduduknya adalah 7.453 penduduk/km². Sensus tahun 2010 menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki 220.431 rumah tangga. Dengan adanya sensus penduduk di tahun 2010 telah menghasilkan proyeksi penduduk. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk yang lahir di Kota Malang pada tahun 2016 adalah sebanyak 2.595 penduduk yang terdiri dari 1.369 kelahiran berjenis kelamin laki-laki dan 1.226 kelahiran berjenis kelamin perempuan. Untuk angka kematian ditahun 2016 sebanyak 1.909 yang terdiri dari 1.018 penduduk laki-laki dan 891 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kota Malang yang melakukan migrasi keluar pada tahun 2016 sebesar 15.427 penduduk dan yang melakukan migrasi masuk ke Kota Malang pada tahun yang sama adalah sebesar 26.045 (Kota Malang Dalam Angka, 2017)

d. Kondisi Sosial Kota Malang

Kota Malang adalah Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, Kota ini juga dikenal sebagai Kota pendidikan, karena banyak sekali fasilitas pendidikan yang tersedia mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, SD sampai perguruan tinggi negeri maupun swasta dan jenis pendidikan nonformal seperti kursus bahasa asing, kursus komputer, dan kursus lainnya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Pada tingkat sekolah dasar (SD) jumlah sekolah swasta dan negeri yang ada di Kota Malang sebanyak 281. Jumlah murid SD negeri dan swasta seluruhnya 76.000 dan jumlah guru secara keseluruhan berjumlah 4.083. Sedangkan jumlah SMP sebanyak 108 sekolah, SMA sebanyak 54 sekolah dan SMK sebanyak 55 sekolah. Sedangkan banyaknya sekolah di lingkungan Departemen Agama pada tahun 2017, MI berjumlah 48 unit, pada tahun 2016 MTs berjumlah 30 unit dan MA sebanyak 15 unit. Perguruan tinggi negeri (PTN) di Kota Malang pada tahun 2016 sebanyak 5 PTN yakni Universitas Brawijaya (UB), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN), Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang (Polinema), dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.

e. Kondisi Ekonomi Kota Malang

Kota Malang memiliki perekonomian yang maju dan majemuk dan merupakan kawasan ekonomi yang disorot oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perekonomian masyarakat di Kota Malang dapat dilihat dari sektor kerja masyarakat antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel, angkutan. Sektor-sektor ini menunjang harga dagang di Kota Malang.

Kegiatan perdagangan di Kota Malang sendiri tidak hanya dari dalam negeri namun juga telah mampu melakukan kegiatan ekspor-impor. Realisasi ekspor yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selama tahun 2015 senilai 28.506.471,110 US\$ dari 13 komoditi ke 11 negara sedangkan untuk realisasi impor yang tercatat adalah senilai 5.551.850,001 US\$ dari 6 negara (Kota Malang Dalam Angka, 2017). Perdagangan menjadi sektor yang menyumbang terbanyak sebesar 29,53% dari total PDRB Kota Malang

Perekonomian Kota Malang menerapkan sistem ekonomi kreatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya peranan UMKM dalam ekonomi. Pemerintah Kota Malang terus mendorong perkembangan UMKM, diantaranya dengan mengadakan berbagai expo dan festival.

Pada tahun 2016 ekonomi Kota Malang tumbuh sebesar 5,61%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ini didongkrak oleh pariwisata. Selain itu pertumbuhan ekonomi pesat juga didukung oleh UMKM, industri, dan perdagangan.

Tingkat Inflasi di Kota Malang sangatlah rendah. Pada September 2017, BPS mencatat bahwa inflasi Kota Malang sebesar 0,05%. Penyebab mendasar inflasi adalah naiknya indeks harga konsumen secara umum.

Meskipun rendah, tingkat inflasi di Kota Malang pernah menjadi yang tertinggi se-Jawa Timur, yaitu pada Juli 2017 dengan inflasi sebesar 0,37%

Gambaran keuangan daerah Kota Malang tertuang dalam Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Malang Menurut Jenis Pendapatan 2013-2016. Dari sisi pendapatan pendapatan daerah Kota Malang selama tahun 2016 sebesar Rp1.711.185.350,08. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang tercatat pada Realisasi Belanja Pemerintah Kota Malang Menurut Jenis Belanja 2013-2016 yaitu sebesar Rp 1.709.918.083,05.

2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang

a. Kedudukan

Dinas Sosial Kota Malang merupakan salah satu instansi pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kota Malang. Kedudukan Dinas Sosial Kota Malang merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang. Dinas Sosial Kota Malang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Sosial dalam melaksanakan kebijakan sosial. Berdasarkan hal itu setiap kebijakan ataupun program kegiatan yang berkaitan dengan sosial harus sesuai dengan program Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Tugas pokok Dinas Sosial Kota Malang adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- c. Pelaksanaan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- e. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- f. Pelaksanaan penanganan bencana;
- g. Pemeliharaan taman makam pahlawan;
- h. Pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- i. Pelaksanaan pemulangan orang terlantar ke daerah asal;
- j. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
- l. Pemberian pertimbangan teknis perizinan bidang sosial;
- m. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan bencana sosial;

- n. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana;
- o. Koordinasi dan pelaksana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- p. Pengendalian pelaksanaan program di bidang sosial;
- q. Pengelolaan administrasi umum; dan
- r. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

b. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam suatu kurun waktu. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategic merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada perjalanan kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal dan internal, oleh

karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Dinas Sosial harus dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga diharapkan akan mampu tercapai kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga keadaan yang diinginkan adalah Masyarakat Kota Malang yang Makmur, yaitu keadaan dimana seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dan bermartabat sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Sebagai bagian dari visi Pemerintahan Kota Malang yaitu ***Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat***, maka visi Dinas Sosial adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermartabat”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka selanjutnya Dinas Sosial Kota Malang menjabarkan visi tersebut dalam misi yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan/upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut :

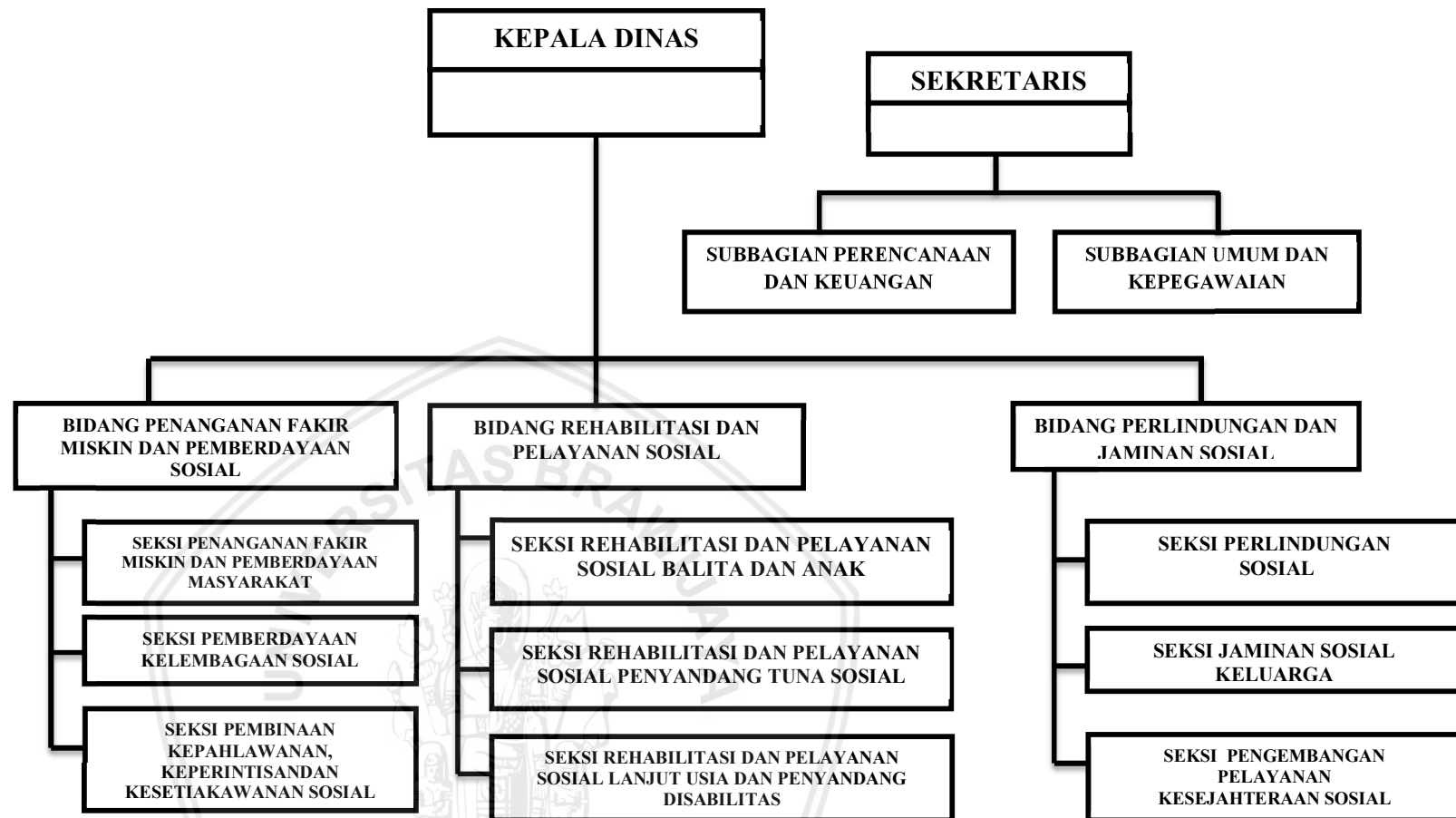
- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat melalui penguatan PSKS;
- c. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

c. Struktur Organisasi

Organisasi adalah salah satu fungsi manajemen yang mempunyai peranan penting yang langsung berinteraksi dengan sosial. Dengan adanya struktur organisasi maka pembagian tugas dalam instansi pemerintah disesuaikan dengan struktur yang ada. Fungsi dan struktur organisasi adalah untuk menentukan aktivitas-aktivitas dan memberikan wewenang kepada masing-masing bagian untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap masing-masing instansi pemerintah. Struktur organisasi dapat

mencegah terjadinya penyimpangan yang akan terjadi didalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat ditetapkan, efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik, sehingga tujuan dari instansi dapat tercapai. Struktur organisasi dan daftar nama pegawai di Dinas Sosial Kota Malang dapat dilihat pada bagan dan tabel berikut.





Bagan 1. Struktur Dinas Sosial Kota Malang
Sumber : Dinas Sosial, 2018

Tabel 4. Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Malang

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. SRI WAHYUNINGTYAS, M.Si / 19581218 198503 2 007	Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial	
2	Dra. PIPIH TRIASTUTI / 19640129 199103 2 002	Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris	
3	Dra. KUSTINAH, M.Pd / 19600814 198710 2 002	Pembina (IV/a) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	PENSIUN PER BULAN AGUSTUS 2018
4	Drs. BAMBANG EDDY IRAWAN, M.Si / 19600527 198603 1 015	Pembina (IV/a) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	PENSIUN PER BULAN MEI 2018
5	TRI SOEKMA WIDAJATI, SE, MM / 19690617 199503 2 003	Pembina (IV/a) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
6	INDRAS SRI CITOWATI, SP, MM / 19701219 199703 2 003	Pembina (IV/a) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	
7	HERI WIYONO, S.Pd, MM / 19691008 199503 1 004	Pembina (IV/a) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial	
8	NILAWATI HANDAYANI, S.Sos, M.Si / 19700608 199703 2 007	Pembina (IV/a) Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak	
9	TUTIK MURTIENI, SE / 19640906 199503 2 001	Penata Tk. I (III/d) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
10	SUMARTI / 19600323 198303 2 017	Penata Tk. I (III/d) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat	
11	SRI TUGAS WIJASTUTIK, S.Sos / 19600712 198503 2 010	Penata Tk. I (III/d) Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	PENSIUN PER BULAN SEPTEMBER 2018
12	SRI RAHAYU, SH / 19630224 198602 2 004	Penata Tk. I (III/d) Kepala Seksi Perlindungan Sosial	

13	LAILY QODARIYAH, Aks / 19680313 198901 2 003	Penata Tk. I(III/d) Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	
14	MARISA SETYORINI, S.P / 19730205 199901 2 001	Penata Tk. I (III/d) Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	
15	HENNY IKAWATI, SE / 19730317 199602 2 001	Penata (III/c) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	
16	H. ACHMAD SHOLEH, S.IP, MM / 19720710 199703 1 008	Penata (III/c) Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	
17	INDAH RINI, SE / 19771228 200112 2 005	Penata (III/c) Pengadministrasi Keuangan	
18	ANDIK KUSWOYO, SE / 19820320 200903 1 002	Penata (III/c) Penata Laporan Keuangan	
19	TITIS INDARWATI, S.AP / 19831004 201001 2 024	Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola Kesejahteraan Sosial	
20	ACHMAD FAUJI, S.Sos / 19670913 200501 1 005	Penata Muda (III/a) Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	
21	KUSNO, SH / 19670105 200701 1 021	Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Anak Terlantar	
22	Rr.IRMA FITRIANTI, A.Md. / 19770912 200903 2 003	Penata Muda (III/a) Pengolah Data Keuangan Daerah	
23	DIAN VERA WATI, S.Psi / 19790113 201407 2 002	Penata Muda (III/a) Pengelola Kepegawaian	
24	JANIMIN / 19750604 199903 1 009	Pengatur Tk. I (II/d) Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas	
25	CHANDRA TRI HERIYANTO, A.Md / 19850411 201001 1 017	Pengatur Tk. I (II/d) Pranata Komputer Terampil	
26	JOSEPHINE HABIBUW / 19610104 200604 2 001	Pengatur (II/c) Pengadministrasi Umum	
27	NANANG / 19710314 200901 1 001	Pengatur (II/c) Pengelola Kesejahteraan Sosial	
28	SULISWANTO / 19771115 200901 1 002	Pengatur (II/c) Pramu Taman	

29	MOCHAMAD MUNDJI / 19800505 200901 1 001	Pengatur (II/c) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	
30	SRI SUPRPTI / 19610414 200701 2 005	Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	
31	PRAYITNO / 19630330 199103 1 004	Pengatur Muda (II/a) Pramu Taman	
32	TEGUH PRASETYO / 19851029 201001 1 001	Pengatur Muda (II/a) Pengolah Data Bahan Perencanaan	
33	MASKUR/ 19780614 200801 1 009	Pengatur Muda (II/a) Pengelola Keamanan dan Ketertiban	
34	LANI HADI SUPRAYITNO / 19610507 201212 1 002	Juru Muda Tk. I (I/b) Pramu Taman	

Keterangan : Dari 34 (tiga puluh empat) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial Kota Malang terdapat dua Kepala Bidang (Kabid) dan satu Kepala Seksi (Kasi) yang sudah tidak aktif bekerja (pensiun), yakni: Kabid Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pensiun per bulan Agustus 2018, Kabid Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial pensiun per bulan Mei 2018 dan Kasi Kepahlawan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial pensiun per bulan September 2018.

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang, 2018

d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Malang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sosial tahun 2017, Kepala Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang sosial berdasarkan wewenang yang diberikan dan ketentuan Perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Dinas;
- c. Melaksanakan pengkajian/ penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/ kebijakan bagi Atasan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka mewujudkan tercapainya kesejahteraan sosial;
- f. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka mewujudkan tercapainya kesejahteraan sosial;
- g. Melaksanakan pembinaan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial, rehabilitasi

dan pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

- i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sosial sebagai bahan evaluasi;
- j. Melaksanakan pembinaan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Sosial Kota Malang menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat; dan
- e. Penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas Sosial sesuai bidang tugas Sekretariat;
- f. Menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
- h. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;

- i. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sekretariat sebagai bahan evaluasi;
- k. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

Dalam melakukan tugas tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud Sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian, yakni Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing Subbagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial merupakan unsur lini pada Dinas Sosial Kota Malang yang dipimpin

oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kota Malang

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Kota Malang dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- d. Koordinasi dan fasilitasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- e. Fasilitasi penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

- f. Pembinaan partisipasi sosial dalam rangka penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g. Pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- h. Pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. Membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Merumuskan petunjuk teknis kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f. Merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- g. Memberikan fasilitasi terhadap kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; Seksi

Pembinaan Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. Membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Sosial untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan data di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat dan data keluarga PMKS sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
- g. Menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- i. Melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan E-Warung bagi (PMKS);
- j. Melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengembangan pelayanan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;

- k. Melaksanakan penguatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial, pendampingan fakir miskin, pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, pembinaan dan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial guna menangani masalah kemiskinan dan keberdayaan masyarakat;
- l. Melaksanakan pemberian bantuan stimulan dan pemberian bantuan beras prasejahtera guna meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- m. Menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat;
- n. Mengelola sistem informasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- o. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan seksi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan evaluasi;
- p. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- q. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur lini pada Dinas Sosial Kota Malang yang dipimpin oleh kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kota Malang melalui Sekretaris. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Kota Malang dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantuan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelayanan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan

penyandang disabilitas secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial;

- e. Pembinaan partisipasi sosial dalam rangka pelayanan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
- f. Pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
- g. Pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia dan penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. Membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada pelaksana/bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh bidang di lingkungan Dinas Sosial Kota Malang untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Merumuskan petunjuk teknis kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
- f. Merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan rehabilitasi dan pelayanan balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Memberikan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut

usia, dan penyandang disabilitas dalam rangka pembinaan dan pengawasan;

- h. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial balita dan anak, penyandang tuna sosial, lanjut usia, dan penyandang disabilitas sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial membawahi 3 (tiga) seksi meliputi Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Balita dan Anak; Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Tuna Sosial; Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas. Masing Masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur lini pada Dinas Sosial Kota Malang yang dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kota Malang. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Kota Malang dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Koordinasi dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Fasilitasi pelayanan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. Pembinaan partisipasi sosial dalam rangka pelayanan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;

- g. Pemrosesan bahan kerjasama dalam negeri bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;
- h. Pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program dan kegiatan pelayanan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan Atasan;
- c. Membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada pelaksana/bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh bidang di lingkungan Dinas Sosial Kota Malang untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Merumuskan petunjuk teknis kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
- f. Merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Memberikan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksana/bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 (tiga) seksi meliputi Seksi Perlindungan Sosial; Seksi Jaminan Sosial Keluarga; Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Masing Masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Program E-Warong KUBE PKH di Kota Malang (Studi Pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu)

Dalam setiap program, tentu terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan agar program yang dijalankan terkontrol dan dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Implementasi bermuara pada sebuah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem yang bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002: 170). Tahapan implementasi program merupakan tahapan yang paling krusial yang mana akan menentukan keberhasilan dari suatu

program. Karena baik buruknya suatu implementasi program ditentukan oleh persiapan dan perencanaan yang baik agar tujuan program dapat tercapai. Untuk itu, dalam bagian ini peneliti akan mendeskripsikan proses implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu) dengan mengkaitkannya kedalam model implementasi program menurut David. C Korten.

Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008:11) menyebutkan bahwa ada tiga elemen model kesesuaian yang menentukan keberhasilan dari suatu implementasi program. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga apabila terdapat salah satu elemen yang tidak berjalan dengan optimal maka akan berpengaruh terhadap elemen lainnya. Ketiga elemen tersebut, yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

a. Elemen Program

Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 11-12) menyebutkan bahwa elemen program merupakan elemen pertama dalam model kesesuaian yang akan menentukan keberhasilan suatu implementasi program. Adanya kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (pemanfaat) mutlak untuk dilaksanakan. Jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas *output*-nya tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memberdayakan kelompok sasaran.

Untuk melihat kesesuaian antara program e-Warong KUBE PKH dengan kelompok sasaran di Kota Malang dilihat dari beberapa aspek, diantaranya (i) tujuan program, (ii) sasaran program, (iii) kegiatan program, (iv) manfaat program.

1. Tujuan Program e-Warong KUBE PKH

Untuk mengetahui adanya kesesuaian antara program e-Warong KUBE PKH dengan kelompok sasaran di Kota Malang sangat penting untuk mengetahui tujuan dari program itu sendiri. Dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (BPSU Melalui e-Warong KUBE PKH) tertulis bahwa program e-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017:5).

Kementerian sosial melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (Direktorat PFM Pesisir, PPK dan PAN) menjabarkan tujuan program menjadi beberapa poin, yaitu,

- a. Memastikan bahwa bantuan yang diterima masyarakat tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kapasitas penerima manfaat untuk mengembangkan kemampuan berusaha
- c. Menyediakan sarana pelayanan transaksi keuangan secara elektronik untuk pencairan bantuan sosial
- d. Mengenalkan transaksi pelayanan perbankan kepada penerima manfaat seperti menabung, penggunaan kartu elektronik untuk transaksi pembayaran dan tarik tunai

- e. Sebagai tempat menampung dan memasarkan hasil produksi masyarakat sekitar terutama penerima manfaat
- f. Menyediakan bahan pangan pokok sehari-hari dengan harga terjangkau bagi penerima manfaat (penerima PKH, BPNT).
(Direktorat PFM Pesisir, PPK dan PAN. 2017. *“Bahan Diskusi Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan”*, diakses pada tanggal 14 November 2018 dari
(<http://simontok.kemsos.go.id/home/book/Bahan%20Diskusi%20E-Warong,%202017.pdf>)

Berikut wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Sosial

Kota Malang, dengan Ibu Sumarti selaku Kepala Seksi Penanganan

Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan:

“Kalau tujuannya e-Warong untuk mensejahterahkan KPM mas supaya dia (KPM) yang jadi pengurus warung bisa mandiri gituloh mas jadi gak tergantung bantuan pemerintah. Kalau dia sudah mandiri ya nanti dia bisa keluar. Setelah dia mandiri gak perlu bantuan pemerintah lagi akhirnya dia bisa mundur dari penerima bantuan itu jadi bisa dialihkan ke orang lain mas kan masih banyak yang membutuhkan, itu yang diharapkan seperti itu mas”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13/November/2018, pukul 12.10 WIB, di Kantor Dinas Sosial Kota Malang).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Mas Rahmat Prayudi sebagai penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Tujuannya adalah pemberdayaan pengurus dari e-Warong sendiri. Kalau secara pribadi saya ya mas, tujuannya itu sebisa mungkin harus bisa meluas. Soal e kalau dari segi manfaatnya untuk pengurus saja kan itu yo terbatas sekali jadi pengennya meluas lah jangan cuman buat pengurus saja karena menurut saya. Kalau memang program ini untuk pemberdayaan masyarakat miskin, program ini harus bisa memberikan manfaat, istilah e bukan hanya memberdayakan pengurus warung tapi masyarakat miskin yang lain juga”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 16/November/2018, pukul 13.27 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Begitu juga wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sri Widya Y sebagai bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungsrejo Bersatu memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Gini, kita ke asal mulanya ya latar belakangnya e-Warong ini, dulukan beras itu raskin yang menyalurkan lewat kelurahan lalu ke RT baru dibagikan. Terus sekarang pemerintah itu mendirikan e-Warong tujuannya begini, yang bagi itu KPM sendiri untuk bantuan biar tepat sasaran, terus lah dari anggota KPM-KPM ini tadi dirangkul yang diharapkan KPM ini membentuk usaha bersama. Kalau usaha kan akhirnya mendapatkan hasil a mas, dari hasil terus dapat ilmu ini bisa menjadi modal mereka untuk bisa lulus bukan lagi menjadi penerima bantuan tapi bisa mandiri itu asal mulanya dibentuknya e-Warong. Jadi tepat sasaran, terus mengentaskan kemiskinan, jadi tempat pemberdayaan masyarakat juga ya itu mas” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22/November/2018, pukul 10.18 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungsrejo Bersatu)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas program e-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sosial yang dalam hal ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peningkatan kesejahteraan KPM tersebut dilakukan dengan memberdayakan para KPM dalam mengelola e-Warong KUBE PKH. Melalui kegiatan pengelolaan tersebut, KPM bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, pengalaman berwirausaha dan keuntungan lainnya. Keuntungan-keuntungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memacu semangat berwirausaha dari KPM, sehingga kesejahteraan serta kemandirian dari para KPM pengelola e-Warong KUBE PKH dapat terwujud. Selain itu e-Warong KUBE PKH bertujuan juga agar pencairan dana Bantuan Sosial non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM lebih tepat sasaran.

2. Sasaran Program E-Warong KUBE PKH

Sasaran program merupakan aspek kedua untuk melihat kesesuaian antara program e-Warong dengan kebutuhan kelompok sasaran di Kota Malang. Penting untuk mengetahui sasaran implementasi program agar aspek lain juga bisa diketahui sehingga bisa dilihat bagaimana kesesuaian antara program dengan kebutuhan kelompok sasaran. Sasaran program e-Warong KUBE PKH yaitu:

1. Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), terdiri dari:
 - a. Penerima bantuan sosial peserta program keluarga harapan,
 - b. Penerima bantuan pangan non tunai,
 - c. Penerima bantuan subsidi gas elpiji,
 - d. Penerima Program Indonesia Pintar.
2. Masyarakat bukan penerima kartu KKS, terdiri dari:
 - a. Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
 - b. Anggota Kelompok KUBE
 - c. Masyarakat sekitar
(Direktorat PFM Pesisir, PPK dan PAN. 2017. *“Bahan Diskusi Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan”*, diakses pada tanggal 14 November 2018 dari <http://simontok.kemsos.go.id/home/book/Bahan%20Diskusi%20E-Warong.%202017.pdf>).

Berikut wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Malang dengan Ibu Sumarti selaku Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Malang yang menyatakan:

“Sasaran programnya itu ya penerima BPNT sama PKH ditambah dengan masyarakat umum atau masyarakat sekitar. Jadi ini toko kan mas ya, seumpamanya dia itu dengan TK jadi dia itu (e-Warong) disamping layanan BPNT yang penyaluran beras dan atau telur e-Warong itu bisa jualan alat tulis, jualan jajan, lah itu mas sasarannya di situ untuk umum e nya ya jadi tidak harus penerima BPNT saja

sasaran e-Warong itu diharapkan juga orang umum bisa berbelanja di situ juga itu harapannya seperti itu mas tapi kebanyakan semua e-Warong gitu kok mas. Dulu kan memang cuman buat tempat penyaluran BPNT saja tapi sekarang sudah membuka toko seperti toko biasa yang melayani semua masyarakat. Koyok e-Warong di Sukun itu mas ya itu sudah ditulisi mas ya jadi di tokonya itu ditulisi baik masyarakat penerima bantuan dan masyarakat umum harga itu sama jadi semuanya bisa beli di situ”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13/November/2018, pukul 12.10 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang).

Begitu juga dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Mas Rahmat Prayudi selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Yang pasti yo penerima manfaat KPM itu ya. Misalkan ya kalau seandainya kemasan beras itu memanfaatkan KPM yang punya usaha sablon misalnya untuk *branding* kemasan berasnya itu kan otomatis menambah penghasilan KPM lain selain pengurus di e-Warong, tapi kalau yang pengurus warung nya itu manfaatnya yo bisa mendapatkan manfaat dari keuntungan yang selama ini dihasilkan dari e-Warong”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 16/November/2018, pukul 13.27 WIB di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa sasaran dari program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah para masyarakat penerima Bantuan Sosial atau yang disebut juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk masyarakat KPM penerima BPNT bisa mencairkan Bantuan Sosial nya berupa beras dan telur melalui e-Warong. KPM juga bisa ikut sebagai pengurus dari e-Warong. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha para KPM. Selain itu masyarakat umum di Kota Malang juga menjadi sasaran dari program e-Warong KUBE PKH yang mana e-Warong juga melayani untuk penjualan kebutuhan sehari-hari seperti sabun, gula,

minyak dan kebutuhan lainnya yang dimana harga barang-barang kebutuhan tersebut sama dengan yang dijual kepada para KPM penerima Bantuan Sosial.

Untuk melihat apakah sasaran program e-Warong KUBE PKH sudah tepat sasaran peneliti melakukan wawancara dengan dua pengurus e-Warong yang ada di Kota Malang. Kedua narasumber merupakan pengurus di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungsrejo Bersatu. Berikut wawancara yang peneliti lakukan di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dengan Ibu Wahyu Puji Astuti selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera:

“Awal mulanya itu kapan mas ya, pokoknya pembukaan e-Warong ini Agustus 2017 tapi ini kan awalnya bikin proposal dulu nah itu semuanya yang urus pendampingnya ya yang kemarin mas Rahmat itu (penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera). Pokoknya pertama kali mau dibangun itu beliaunya kan konfirmasi ke saya nanya mau apa gak ikut kegiatan ini, soalnya waktu itu tempat ini kan gak kepakai kalau misal disini mau dibuat e-Warong maksudnya untuk usaha nanti bersama itu, setelah dijelaskan sama beliau akhirnya karena tempat ini juga punya keluarga saya ya saya tanyakan dulu mas terus keluarga saya bilang ya terserah kalau dari kita mah gpp daripada tempatnya gak berfungsi akhirnya mas Rahmatnya bilang mau ajukan proposal dulu. Ternyata setelah pengajuan proposal gak tau berapa lama ya itu terus dikasih kabar kalau e-Warong nya sudah di setujui sama Kemensos nanti segera kita wujudkan ini. Soalnya dulu kan e-Warong itu mulai dari renov semuanya kan dari Kemensos semua. Sebelum ikut e-Warong ini mas kita juga ikut kegiatan PKH itu sudah lama lah mas lupa aku tahunnya. Nah di PKH itu anggota sama pengurusnya kan buanyak nah kebetulan waktu itu kan yang ditawarkan karena rumahnya ketepatan punya keluarga saya akhirnya saya yang ditanya, kira-kira ini kalau dibentuk usaha bersama sepuluh orang mbanya punya pandangan siapa ditanyain gitu mas ke saya akhirnya kita pilih berdasarkan sepengetahuan pendamping juga terus kita juga dikasih tau kira-kira siapa yang cocok untuk usaha ini yang mau gabung gitu.

Jadi pengurus e-Warong yang sepuluh orang ini dari KPM PKH semua. Jadi per RW itu kita ada perwakilannya supaya itu tadi tau kalau ada info-info semisal ya kan e-Warong itu kan tujuan utamanya untuk penyaluran BPNT nah sebenarnya tujuan utamanya itu. Jadi dibentuknya e-Warong itu untuk lebih memudahkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan itu, nah abis itu kita kembangkanlah makanya ada *display* yang begini (etalase untuk menjual barang-barang sandang dan pangan) jadi awal mula gak gini dulu itu cuman tempat penyaluran BPNT aja. Jadi kita ini orang-orang jeneng e kelompok usaha bersama moso iyo aktif e mek beberapa hari aja, nah akhirnya kita ya opo yo carane kulak an, dapat hasil dari jualan dikit-dikit ya kita kembangkan soalnya ini udah hampir setahun lebih. Jadi awalnya dulu e-Warong ya cuman untuk nyalurno bantuan tok itu. Ya opo lek kalau gitu tok cuman nyalurkan bantuan tok akhirnya gak kembang ta warungnya. Kita ngomong juga sama Mas Rahmatnya yo gpp daripada cuman satu bulan kegiatannya cuman itu aja kalau gini kan kita tiap hari gantian yang jaga”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15/November/2018, pukul 15.42 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Begitu juga dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sri Widya Y selaku bendahara e-Warong Tanjungrejo Bersatu di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau awal mulanya itu saya kan anggota PKH ya jadi pas ada kumpul dengan anggota PKH yang lain saya cuman ditawarkan mau gak bantu menyalurkan bantu nimbang atau bantu apa gituloh itu yang pertama kali, terus setelah itu disampaikan dikumpulkanlah sepuluh orang yang ditawari itu mau gak bantu nyalurkan, ternyata setelah disosialisasikan sama pendamping kita ini ditunjuk setiap kelurahan untuk mendirikan satu usaha bersama yang disebut e-Warong, anggotanya sepuluh orang semua ini sudah dikumpulkan dan ada jabatan masing-masing jadi ada strukturnya ada ketua sekretaris bendahara dan anggota nanti punya tugas sendiri-sendiri, seperti itu”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22/November/2018, pukul 10.18 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua narasumber merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota

Malang yang juga menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Narasumber juga menuturkan bahwa terlibat langsung dalam pembentukan e-Warong di tempatnya masing-masing yang mana alur pembentukan e-Warong diawali dari tawaran dari pendamping PKH kepada narasumber dan sembilan orang anggota PKH yang lain untuk ikut dalam kegiatan program e-Warong, dilanjutkan dengan sosialisasi program kepada narasumber dari pendamping PKH, kemudian membentuk kelompok usaha bersama dalam bidang jasa atau disebut sebagai KUBE Jasa. KUBE Jasa merupakan kelompok masyarakat penerima bantuan yang mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH. Kedua narasumber mengaplikasikan kegiatan pengelolaan e-Warong dengan melakukan pelayanan bagi masyarakat penerima bantuan maupun masyarakat umum yang datang berbelanja ke e-Warongnya masing-masing.

3. Kegiatan Program e-Warong KUBE PKH

Kegiatan program e-Warong KUBE PKH merupakan aspek ketiga untuk melihat kesesuaian antara program e-Warong dengan kebutuhan kelompok sasaran yakni KPM di Kota Malang. Berikut wawancara yang peneliti lakukan di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dengan Mas Rahmat Prayudi selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera:

“Selain sebagai tempat penyaluran bantuan ya di sini juga ada kegiatan jual beli ya selayaknya warung lah. Selain itu kita juga memasarkan produk dari KPM itu sudah pasti. Jadi kan ada itu e-Warong yang hanya untuk penyaluran bantuan saja yang isinya

hanya beras sama telur, kalau kita di sini dari penyaluran bantuan itu kita sisihkan untuk modal pengadaan barang-barang lain di warung misal e nambah yang lain-lain”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 16/November/2018, pukul 13.27 WIB di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Berikut dokumentasi berupa foto yang dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pengurus dan penyelia di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera:



Gambar 6. Produk-produk yang Dijual Untuk KPM dan Masyarakat Umum Oleh Pengurus e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera selain BPNT (Beras dan Telor)
Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018



Gambar 7. Produk-Produk KPM dan KUBE yang Dipasarkan oleh e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera
Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018

Hal yang senada juga disampaikan oleh Pak Naisanto sebagai penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kegiatan yang sudah kita lakukan pertama pastinya kegiatan penyaluran bantuan sosial non pangan itu ya mas, lalu kegiatan transaksional seperti penjualan beras dan gula untuk masyarakat umum juga, minyak makan, sabun, kebutuhan masak memasak ibu-ibu gitu lah mas. Selain itu kita juga ada kegiatan santunan sosial dan itu sudah berjalan, jadi setiap bulan itu kita sisihkan untuk yatim piatu sama duafa, dan harapan kita kedepannya kegiatan santunan sosial ini rutin kita laksanakan setiap tahun pas memperingati hari ibu bersama dengan hari kesetiakawanan sosial di tanggal 23 Desember kira rencanakan setiap tahun kita lakukan itu. Kemudian selain itu dari keuntungan e-Warong kita juga sudah melakukan wisata bersama, jadi semua pengurus kemarin kita ajak wisata dan semua itu gratis mulai dari busnya, makannya, dll semuanya gratis, kita ambil dari selisih keuntungan bersihnya itu. Karena KPM itu kan rata-rata dengan kondisi ekonomi lemah itu kan jarang menikmati hiburan, istilahnya kegiatan itu juga untuk meningkatkan silaturahmi mereka supaya ada ikatan emosional yang lebih lagi makanya kita adakan itu juga. Di warung kita juga waktu penyaluran bantuan melalui e-Warong kita juga memberikan layanan *delivery order* ke KPM dengan menggunakan viar. Sebelum adanya viar itu kan semua KPM mau dekat atau jauh harus ngambil ke e-Warong, kemudian kita coba datangkan pinjam mobil nyewa kita .Akhirnya karena ini kebutuhan kita ajukan proposal ke ASTRA waktu itu supaya bisa dapat viar akhirnya kita gunakan itu supaya bisa melaksanakan *delivery order*. Dari keuntungan e-Warong kita sisihkan keuntungan untuk buat box di viar itu juga supaya bisa ngebawa barang banyaklah istilahnya. Selama ini masih itu yang kita jalankan , dan sudah mulai bervariasi mulai dari kegiatan di e-Warong nya maupun jualannya harapannya kedepan kita bisa buat lagi lebih besar supaya kita bisa jadi rujukannya temen-temen e-Warong yang lain”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu 04/November/2018, pukul 12.10 WIB di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berikut dokumentasi berupa foto yang dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pengurus dan penyelia di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera:



Gambar 8. Pamflet Kegiatan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu
Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018



Gambar 9. Produk-Produk yang Dijual Untuk KPM dan Masyarakat Umum Oleh Pengurus e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu Selain BPNT (Beras dan Telor)
Sumber: Dokumentasi Abraham CRN, 2018



Gambar 10. Kegiatan *Delivery Order* Oleh Pengurus e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu Saat Pencairan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) Untuk KPM di Jln. Kasin Jaya, Kota Malang
Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018



Gambar 11. Produk Kube yang Dipasarkan Oleh e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu

Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018



Gambar 12. Struk Pengambilan Bantuan Sosial Non Tunai
Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, adapun kegiatan yang dilakukan pengurus dan penyelia di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera adalah: melayani pencairan bantuan sosial non tunai bagi warga KPM PKH maupun KPM non PKH, menyediakan dan menjual bahan pangan pokok bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur, menyediakan dan menjual barang-barang selain beras dan telur bagi penerima bantuan dan masyarakat umum, memasarkan produk-produk hasil kerajinan KPM

dan KUBE, melakukan kerjasama dengan bank dalam penyaluran bantuan sosial non tunai yang dibuktikan dengan adanya EDC (*Electronic Data Capture*) di e-Warong tersebut yang digunakan untuk mencaikan bantuan sosial non tunai.

Pengurus dan penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang juga melakukan kegiatan-kegiatan yakni: melayani pencairan bantuan sosial non tunai bagi warga KPM PKH maupun KPM non PKH, melayani pencairan bantuan sosial PKH, menyediakan dan menjual bahan pangan pokok bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur, menyediakan dan menjual barang-barang selain beras dan telur bagi penerima bantuan dan masyarakat umum, melakukan kerjasama dengan bank dalam penyaluran bantuan sosial non tunai dan tunai yang dibuktikan dengan adanya EDC (*Electronic Data Capture*) di e-Warong tersebut yang digunakan untuk mencairkan bantuan sosial non tunai maupun tunai, memasarkan produk KUBE, memberikan layanan delivery order bagi KPM penerima BPNT yang kediamannya jauh dari e-Warong, pengadaan viar (motor box) untuk mendukung layanan delivery order.

4. Manfaat Program e-Warong KUBE PKH

Manfaat program e-Warong KUBE PKH merupakan aspek keempat untuk melihat kesesuaian antara program e-Warong dengan kebutuhan kelompok sasaran yakni KPM yang ada di Kota Malang.

Dengan mengetahui manfaat yang didapat KPM dari implementasi program dapat diketahui apakah program e-Warong sudah sesuai dengan kebutuhan KPM. Untuk melihat manfaat dari implementasi program, peneliti mewawancarai dua pengurus di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dengan Ibu Wahyu Puji Astuti selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera:

“Manfaatnya ya mungkin dari segi perekonomian ya, ya adalah sedikit banyak ada terbantu cuman gak banyak sih ya namanya juga usaha, intinya lumayan lah. Soalnya kita disini juga dibagi orang sepuluh terus kan belum lagi untuk belanja-belanja yang kayak gini (barang sandang dan pangan) soalnya kan dana bantuan dulu kan khusus hanya untuk BPNT aja, jadi kita kalau mau pengembangan sendiri yo opo carane kan gitu. Memang ada dana dari Kemensos yang Rp 30.000.000,00 itu, yang Rp 10.000.000,00 kan itu untuk renovasi nah yang Rp 10.000.000,00 otomatis kan sudah dikurangi untuk renovasi jadi modal usaha dan modal kerja itu cuman Rp 20.000.000,00 juta kan nah itu berkurang lagi untuk beli kebutuhan yang lain juga, itu sisanya kurang lebih kalau gak salah waktu itu Rp 18.000.000,00. Itu gimana caranya uang segitu bisa untuk penyaluran BPNT itu nah hasil yang didapat dari penyaluran BPNT itu misal bulan ini kita dapat sekian dibelikan apa dulu (sandang dan pangan) supaya bisa berkembang akhirnya bisa lengkap kayak gini. Kalau telur sama beras yang buat BPNT itu kita gak ambil dari BULOG kita nyari sendiri kalau beras kan dari selep (penggilingan) ya terus kalau telur itu dari peternak telur itu dari daerah Malang juga. Soalnya kalau ambil beras BULOG itu mas kita kan namanya ini kan yo ada intinya persaingan tapi kan persaingan sehat, kalau BULOG kan berasnya jenengan tau sendiri lah kualitasnya sedangkan kita kan pengennya orang-orang itu namanya mereka dapat bantuan dari pemerintah otomatis kan sudah jadi uangnya dia, ya opo carane kita memberikan yang terbaik akhirnya kan kita seperti itu. Dari awal kita memang gak pernah pakek beras dari BULOG. Kita pasti cari berasnya nyari kualitas yang bagus, pertama itu kita langsung ambil dari selep Bondowoso. Soalnya kan warung itu berjalan atau gak nya tergantung cara kita supaya orang-orang itu kan gak pindah ke tempat lain, akhirnya kita cari kualitas kan bener-bener yang terbaik.

Semakin lama kan harusnya memang kualitasnya (kualitas beras dan telur) semakin baik lah maksudnya biar orang itu ngambil BPNT ke sini juga seneng gitu, gak kecewa gitulah”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15/November/2018, pukul 15.42 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sri Widya Y selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi dari dulu kan waktu sebelum saya gabung saya kan cuman ngurusin anak-anak ibu rumah tangga biasa, terus setelah gabung di e-Warong saya kan dapat pendapatan tambahan bisa saya buat modal usaha lain. Terus saya dapat ilmu juga, berinteraksi dengan orang lain juga dengan karakter-karakter yang berbeda saya juga dapat ilmu itu terus dalam ilmu dalam keuangan karena saya sebagai bendahara saya dapat ilmu keuangan bagaimana caranya mengatur perbelanjaan, itung keuntungan seperti itu. Kalau dari keuntungan ya kita itu pembagian hasil yang dibagi ke pengurus warung kan bukan dari hasil usaha yang kecil ini yang buat umum bukan dari situ, tapi dari penjualan beras BPNT itu. Dari keuntungan BPNT itu kita ngambil keuntungan buat diambil buat pengurus e-Warong sesuai dengan jam kerja masing-masing terus di sini kan kita juga ada viar (motor box) yang kebetulan saya *driver* nya, dari situ saya dapet tambahan juga. Jadi setiap pengiriman pas lagi penyaluran beras itu kita minta Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang (KPM) kayak uang transport gitu lah. Dari dua ribu itu dibagi lagi saya dapat Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terus sisanya untuk perawatan untuk bensin sama uang sewa tempat itu kita ambilkan dari dua ribu itu tadi, jadi dua ribu itu manfaatnya buanyak sekali” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22/November/2018, pukul 10.18 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas diketahui bahwa kedua narasumber merupakan KPM yang bertugas sebagai pengurus e-Warong yakni e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu. Selama mengikuti implementasi program e-Warong ditempat masing-masing narasumber menuturkan bahwa mendapatkan manfaat nyata dari

program e-Warong. Manfaat yang didapat adalah dari segi keuangan yang mana hal tersebut dapat terwujud karena narasumber dan pengurus di e-Warongnya masing-masing mendapatkan upah sebagai *feedback* selama mengurus dan mengelola e-Warong. Informasi dari narasumber menyebutkan bahwa upah yang didapat memang tidak terlalu banyak namun bisa menambah pendapatan keluarganya masing-masing.

Kedua narasumber sebelum mengikuti implementasi program e-Warong hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang aktivitasnya tidak terlalu banyak, namun setelah mengikuti implementasi program dengan menjadi pengurus e-Warong, kegiatan kedua narasumber mulai bertambah yakni melalui kegiatan mengelola dan mengurus e-Warong ditempatnya masing-masing. Kedua narasumber bertanggungjawab sebagai bendahara yang mana hal tersebut mewajibkan narasumber untuk mengurus dan mengelola pembukuan baik itu penjualan, pengeluaran dan persediaan barang di e-Warong. Melalui kegiatan tersebut narasumber mendapatkan manfaat berupa pengetahuan tentang pembukuan yang nantinya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua narasumber dan pengurus e-Warong ditempatnya masing-masing juga mendapatkan modal pengetahuan dalam bidang bisnis ataupun kewirausahaan yang mana hal tersebut memicu semangat untuk berwirausaha dengan membuka usaha sendiri.

b. Elemen Pelaksanaan Program

Pada elemen kedua, Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 12) menekankan kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Tugas yang diisyaratkan program harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh organisasi pelaksana baik melalui kelompok maupun perorangan. Jika organisasi pelaksana program tidak mempunyai kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan program dengan tepat yang mana hal tersebut bisa berakibat tidak tersampainya manfaat program dan akan menghambat tercapainya tujuan dari program.

Maka dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui kemampuan dari organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan program dengan melihat aspek sumberdaya manusia (SDM) pelaksana program. Setelah mengetahui SDM pelaksana program penting bagi peneliti untuk melihat bagaimana kognisi (pemahaman dan pengetahuan), arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak dan intensitas dari respon pelaksana.

1. Sumberdaya Manusia Pelaksana Program

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek untuk melihat kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang terdapat beberapa SDM sebagai pelaksana program, yakni:

a. Dinas Sosial Kota Malang

Dinas Sosial Kota Malang merupakan lembaga pemerintah yang menjadi perwakilan Kementerian Sosial di daerah dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Sumarti selaku Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat:

“Di Dinas Sosial itu yang menanggungjawab program e-Warong itu Bidang Pemberdayaan Sosial mas. Di bidang ini ada 3 kepala seksi nah yang tanggung jawab untuk program e-Warong itu bagian Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin .Ya itu aja mas kepala bidang sama saya sebagai Kasi Pemberdayaan Fakir miskin sama pegawai-pegawai di sini lah mas”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13/November/2018, pukul 12.10 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang).

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Malang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial dengan Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH)

Korkot PKH adalah salah satu SDM yang ikut terlibat dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mas Fauzi sebagai Korkot PKH Kota Malang:

“Sebetulnya PKH itu sebuah program mas, didalamnya itu terdapat KPM-KPM, nah KPM tersebut kita tawarkan mereka untuk membuat suatu usaha baik itu di bidang produksi atau jasa yang namanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di situ anggotanya ada 10 orang, yang kita tawarkan tadi kan orang-orang dari PKH akhirnya itu

namanya jadi KUBE PKH, dalam artian KUBE nya orang-orang PKH, nah keterkaitannya dengan e-Warong yang sedang sampeyan teliti itu juga KUBE PKH dalam bentuk jasa gitu keterkaitannya. Karena itu lah e-Warong itu masih dibawah pengawasan kita juga”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 08/November/2018, di Kantor Korkot PKH, Dinas Sosial Kota Malang).

Berdasarkan penjelasan tersebut Korkot PKH merupakan SDM dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang hal tersebut dilihat dari keterlibatan narasumber sebagai Korkot PKH di Kota Malang dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang dengan mengkoordinir dan menawarkan KPM PKH untuk membentuk usaha bersama yang disebut dengan KUBE dalam hal ini adalah KUBE Jasa yang nantinya KUBE Jasa tersebutlah yang akan mendirikan dan mengelola e-Warong di Kota Malang. Korkot PKH di Kota Malang juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya dalam melakukan pengawasan terkait implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang.

c. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)

Korteks adalah salah satu SDM yang ikut terlibat dalam implementasi program e-Warong KUBE PHK di Kota Malang. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mba Labudda MH selaku Korteks di Kota Malang yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau TKS itu sebenarnya kan ngurusin BPNT, nah penyaluran BPNT itu sendiri kan juga lewat e-Warong seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya jadi ranah kita di e-Warong itu hanya untuk bansos pangan saja seperti misalnya kita melihat persediaan beras dan telurnya mencukupi tidak, kemudian kualitas berasnya bagus tidak, kemudian harganya itu sesuai dengan aturan yang maksudnya tidak lebih mahal dari harga pasar jadi biar mempermudah KPM

seperti itu tidak memberatkan. Intinya ranahnya Korteks hanya di bansos pangan tapi ya kita juga koordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak lain soalnya kan kalau dari kita mau movev soal BPNT di e-Warong atau di agen kita kan juga ajak pihak-pihak lain yang terkait”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13/November/2018, pukul 10.13 WIB, di Kantor Dinas Sosial Kota Malang).

Berdasarkan penjelasan dari narasumber bahwa Korteks merupakan salah satu SDM dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang hal tersebut dilihat dari keterlibatan Korteks dalam mengawasi dan melakukan pendampingan pada pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial BPNT berupa beras dan telur yang dimana salah satu tempat penyaluran bantuan sosial tersebut adalah melalui e-Warong yang ada di Kota Malang. Korteks melakukan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas serta harga BPNT yang disalurkan melalui e-Warong agar tetap sesuai dengan aturan yang ada. Dalam melakukan tugas dan kewajibannya tersebut Korteks berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya.

d. Bank BNI

BNI sebagai salah satu bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) merupakan salah satu instansi perbankan milik pemerintah yang terlibat dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. SDM Bank BNI yang terlibat dalam pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah Tim ABB (*Assistance Branchless Banking*).



Gambar 13. Kunjungan Petugas ABB Bank BNI Didampingi Penyelia ke e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera
Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mba Eka Aprilia Hani selaku petugas ABB Bank BNI yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau untuk di Kota Malang sendiri, BNI itu punya tim ya, namanya ABB, nah ABB ini yang urusi ke agenan, nah kita punya lokasi sendiri-sendiri kayak saya itu salah satu lokasi saya di Sukun itu”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23/November/2018, pukul 09.29 WIB, di Kantor ABB BNI KCU Malang)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa BNI memiliki SDM yang terlibat dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. BNI menyediakan SDM dalam bentuk unit kerja atau tim yang dinamakan dengan unit ABB (*Assistance Branchless Banking*) yang bertugas untuk mengurus bantuan sosial dan keagenan dari e-Warong KUBE PKH di seluruh Malang Raya.

e. Penyelia e-Warong KUBE PKH (Pendamping PKH)

Penyelia e-Warong KUBE PKH merupakan salah satu SDM dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. Berikut

wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Naisanto selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.

“Peran saya ya itu lebih ke pendampingan untuk pengurus e-Warong khususnya yang di Tanjungrejo ini. Selain mendampingi ya saya juga mengontrol lah jalannya warung gimana, sesuai apa ndak dengan aturan itu pasti saya selalu tekankan buat pengurus warung juga supaya tidak menyalahi dengan aturan karena tentunya itu jadi masalah buat pengurus sendiri sama nama baik warung kita. Selain itu saya juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain gimana caranya supaya warung tanjungrejo ini bisa lebih maju lagi”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 04/November/2018, pukul 12.10 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa penyelia e-Warong KUBE PKH merupakan salah satu SDM dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang hal tersebut dilihat dari keterlibatan penyelia e-Warong dalam implementasi program dengan memberikan pendampingan bagi pengurus e-Warong KUBE PKH. Pendampingan ini dilakukan untuk mengawal, membantu serta mengarahkan pengurus e-Warong dalam mengimplementasikan program agar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Selain melakukan pendampingan, penyelia e-Warong juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan pengembangan e-Warong yang didampinginya. Penyelia e-Warong KUBE PKH di Kota Malang berasal dari pendamping program keluarga harapan (Pendamping PKH).

f. Pengurus e-Warong KUBE PKH / KUBE Jasa

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016, 2017:

4) disebutkan bahwa, “KUBE Jasa adalah KUBE (Kelompok Usaha

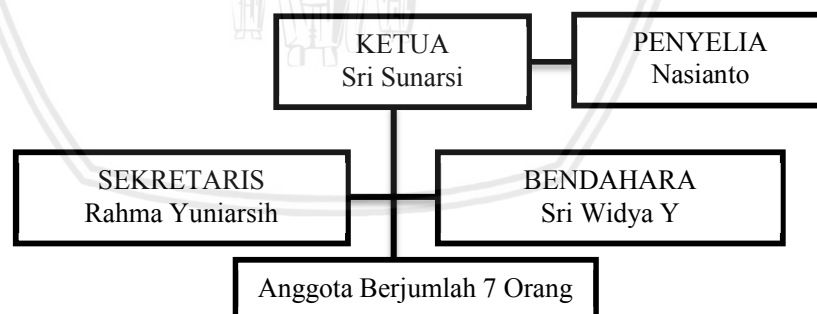
Bersama) yang melaksanakan ekonomi produktif di bidang jasa untuk mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH.

Keanggotaan KUBE Jasa mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Bendahara merangkap anggota; dan
- d. Anggota

Kube Jasa di Kota Malang terdiri dari 10 (sepuluh) orang KPM PKH yang bersama-sama membentuk suatu kelompok usaha bersama di bidang jasa yang dalam hal ini adalah e-Warong KUBE PKH. E-Warong tersebut didampingi oleh satu orang penyelia sebagai pendamping.

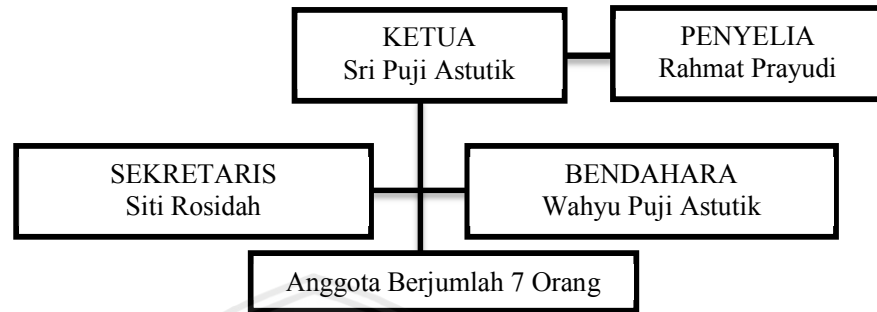
Berikut bagan struktur kepengurusan KUBE Jasa di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.



Bagan 2. Struktur Kepengurusan KUBE Jasa di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu

Sumber: Buku Profil e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu, 2017

Berikut juga dipaparkan bagan struktur kepengurusan KUBE
Jasa yang ada di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera:



Bagan 3. Struktur Kepengurusan KUBE Jasa di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera
Sumber: Penyelia dan Pengurus e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera, 2018

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengurus e-Warong KUBE PKH/KUBE Jasa merupakan SDM dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang hal tersebut dengan melihat pengertian KUBE Jasa dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2016. Pengurus e-Warong di Kota Malang merupakan KUBE Jasa yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang KPM PKH yang bersama-sama dengan penyelia e-Warong (pendamping PKH) membentuk KUBE Jasa dan bertugas untuk mendirikan dan mengelola e-Warong. Keanggotaan KUBE Jasa mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas, ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota.

Berdasarkan pemaparan penjelasan-penjelasan di atas maka sumberdaya manusia pelaksana program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah:

a. Dinas Sosial Kota Malang

SDM di Dinas Sosial yang terlibat implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial Dengan Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH)

c. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)

d. Petugas ABB (Bank BNI)

e. SDM di lingkup Bank BNI yang terlibat dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah Tim ABB (*Assistance Branchless Banking*).

f. Penyelia e-Warong KUBE PKH (Pendamping PKH).

g. Pengurus e-Warong KUBE PKH / Kube Jasa.

2. Kognisi (Pemahaman dan Pengetahuan)

Kognisi (pemahaman dan pengetahuan) menjadi salah satu aspek untuk melihat kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Pemahaman dan pengetahuan organisasi pelaksana baik secara kelompok maupun perorangan terkait tugas yang diisyaratkan program e-Warong KUBE PKH menunjukkan kemampuannya dalam pengimplementasian program.

a. Dinas Sosial Kota Malang

Dinas Sosial Kota Malang merupakan organisasi pelaksana dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. SDM di Dinas Sosial Kota Malang yang terlibat dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH yakni Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial dengan Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Peraturan Dirjen PFM Nomor: 40 /PFM/SK/HK.01/09/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BPSU Melalui E-Warong KUBE PKH, PFM Perkotaan, Dirjen PFM disebutkan bahwa tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH adalah

1. Merekomendasikan usulan BPSU e-Warong KUBE PKH dan ditembuskan kepada Dinas Sosial Provinsi
2. Koordinasi dengan lintas sektor pada tingkat Kabupaten/Kota.
3. Pengendalian, monitoring dan evaluasi dan membantu dalam penyelesaian masalah e-warong.
4. Pembinaan lanjut dan membantu dalam penyelesaian masalah e-warong. (Tasikmalayakota, Dinsos. 2017. *"Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Penanganan Fakir Miskin Perkotaan"* diakses pada tanggal 02 Desember 2023 WIB dari <http://pkh.dinsos.tasikmalayakota.go.id/downloads/20170313180952.pdf>)

Berikut wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sumarti selaku Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan masyarakat yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Peran Dinas Sosial itu mengarahkan kepada penerima PKH mas ya untuk pembentukan e-Warong. Jadi penerima PKH dalam satu kelompok itu diambil 10 orang untuk membentuk e-Warong, gitu loh ya. Jadi digolek i wong sing iso kerjo mas, kan tidak semua orang nih

mas yang bisa kerja kadang kadang kan ada yang buta huruf atau terkendala hal yang lainnya, jadi yang betul-betul bisa membentuk Kelompok Usaha Bersama. Proses pemilihannya dan penentuannya siapa saja orangnya itu oleh pendamping, karena kan mas pendamping kan yang selalu melakukan pendampingan untuk KPM jadi dia tau seandainya si A atau si B ini bisa gak diajak kerjasama setelah direkrut menjadi ketua, bendahara, sekretaris, atau anggota dari e-Warong. Kalau di e-Warong sendiri nama penampingnya itu penyelia mas, nah untuk KPM PKH nya namanya pendamping PKH. Pada saat pelaksanaan program e-Warong sendiri mas kita dari Dinas Sosial itu kita tinggal memantau mas, kita hanya tinggal monitoring dan evaluasi (Monev) saja mas. Bentuk Monev nya itu sendiri mas kita hanya memantau dan melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan e-Warong nya lalu kita melihat bagaimana kinerja dari e-Warong tersebut, nah kalau ada yang kurang tepat atau salah kita arahkan lagi supaya kinerja e-Warong nya lebih bagus lagi. Untuk proses pelaksanaan e-Warong itu mas yang paling banyak berperan dari awal itu memang penyelia mas karena mereka juga langsung terjun kan ke lokasi, kalau dari Dinsos sendiri kita hanya melakukan Monev aja kok waktu e-Warong sudah terbentuk”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13/November/2018, pukul 12.10 WIB di Dinas Sosial Kota Malang).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran dari Dinas Sosial Kota Malang pada awal pembentukan e-Warong adalah mengarahkan para KPM PKH yang mempunyai keinginan untuk ikut implementasi program e-Warong. Pemilihan sepuluh orang calon pengurus e-Warong dari anggota KPM PKH diserahkan kepada pihak pendamping PKH. Setelah terbentuknya e-Warong, Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Malang bersama-sama dengan pihak terkait lainnya bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program e-Warong di Kota Malang yakni dengan memantau dan melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan e-Warong yang sudah beroperasi. Selain itu Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat juga turut aktif dalam penyelesaian masalah-masalah di e-

Warong Kota Malang yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan ataupun penggantian anggota e-Warong yang terlibat dalam masalah.

b. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH) dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)

Korkot PKH dan Korteks merupakan SDM dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. Dalam Peraturan Dirjen PFM Nomor: 40 /PFM/SK/HK.01/09/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BPSU Melalui E-Warong KUBE PKH, PFM Perkotaan, Dirjen PFM disebutkan bahwa tugas dan tanggungjawab Pendamping Sosial (Pendamping PKH, Pendamping KUBE, TKSK dan pendamping lainnya) dalam implementasi program e-Warong adalah:

1. Sebagai penanggung jawab di lapangan untuk program bantuan sosial (PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Subsidi Gas, Subsidi Pupuk, BLSM, dan lain-lain)
2. Bersama Dinas Sosial Kab/Kota mensinergikan data keluarga penerima manfaat dan mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial melalui e-warong KUBE.
3. Pendamping sosial adalah pendamping PKH, TKSK, pendamping Kube dan pendamping lainnya dibawah koordinasi Dinas Sosial Kota/Kab. (Tasikmalayakota, Dinsos. 2017. *"Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Penanganan Fakir Miskin Perkotaan"* diakses pada tanggal 02 Desember 2023 WIB dari <http://pkh.dinsos.tasikmalayakota.go.id/downloads/20170313180952.pdf>)

Mas Fauzi sebagai Korkot PKH di Kota Malang juga memberikan penjelasan mengenai peran dari Korkot PKH dalam implementasi program:

"Kalau peran kita sendiri hanya mengkoordinir PKH dan monitoring saja". (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 08/November/2018,

pukul 10.30 WIB, di Kantor Korkot PKH, Dinas Sosial Kota Malang)

Berkaitan dengan peran tersebut Mas Fauzi sebagai Korkot PKH di Kota Malang menambahkan penjelasan sebagai berikut:

“Itu kita bersama-sama dengan dinas sebenarnya itu bukan hanya koordinator tok, karena koordinator untuk e-Warong ini sekarang sudah dibawah dinas sosial juga, artinya kita Korkot PKH bersama-sama dengan dinas memonitor. Kalau koordinator kota berkoordinasi dengan dinas, terus dengan pihak-pihak terkait gitu aja. Program e-Warong kan memang dibawah pengawasan Dinsos tapi kita sebagai koordinator kota PKH juga masih ikut mengawasi dan memonitoring pelaksanaan program itu”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 08/November/2018, pukul 10.30 WIB, di Kantor Korkot PKH, Dinas Sosial Kota Malang)

Mba Labudda MH sebagai Korteks di Kota Malang memberikan penjelasan terkait peran dari Korteks dalam implementasi program e-Warong Kota Malang. Narasumber menyebutkan bahwa Korteks lebih berfokus kepada program BPNT yang penyalurannya melalui e-Warong yang ada di Malang hal tersebut menyebabkan peran Korteks dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang hanya untuk bantuan sosial pangan saja seperti melihat persediaan beras dan telur (BPNT), mengawasi harga barang-barang BPNT yang dipasarkan lewat e-Warong di Kota Malang agar tetap sesuai dengan harga pasar sehingga mempermudah para KPM yang mencairkan bantuan BPNT melalui e-Warong. Narasumber juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan peran tersebut Korteks tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Malang dan pihak terkait lainnya, seperti koordinasi pada saat

melakukan monitoring dan evaluasi pada e-Warong maupun agen Bank BNI. (Wawancara, Labudda MH, 13/November/2018).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran dari Korkot PKH dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah mengkoordinir KPM PKH yang terlibat dalam implementasi program e-Warong dan melakukan monitoring terkait kegiatan di e-Warong yang ada di Kota Malang. Korkot PKH berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Malang dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan perannya pada implementasi program e-Warong di Kota Malang. Dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang, Korteks yang berfokus pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berperan untuk mengawasi persediaan dan harga barang BPNT (beras dan telur) yang disalurkan melalui e-Warong di Kota Malang. Dalam melakukan perannya, Korteks tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Malang dan pihak terkait lainnya.

c. Bank BNI (Petugas ABB)

Bank BNI merupakan salah satu instansi perbankan yang ikut dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. SDM dari Bank BNI yang ikut terlibat dalam implementasi program e-Warong adalah petugas ABB (*Assistance Branchless Banking*). Dalam Peraturan Dirjen PFM Nomor: 40 /PFM/SK/HK.01/09/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BPSU Melalui E-Warong KUBE PKH, PFM Perkotaan,

Dirjen PFM disebutkan bahwa tugas dan tanggungjawab Perbankan dalam implementasi program e-Warong adalah:

1. Menyiapkan acara peresmian e-warong Kube.
2. Menyediakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*)
3. Melatih calon pengelola/agen menggunakan aplikasi Web e-warong Kube.
4. Sosialisasi transaksi non tunai
5. Menyediakan sistem jaringan
6. Menyediakan papan nama e-Warong KUBE PKH dan agen

Peneliti melakukan wawancara dengan Mba Eka Aprilia Hani selaku petugas ABB Bank BNI yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Jadi kan e-Warong itu kan bentukannya Kemensos, nah kan Kemensos sekarang bekerjasama sama BNI. BNI itu sebagai yang nampung agennya, jadi e-Warong itu agennya Bank BNI, kan yang nampung agen 46 nya itu BNI. Karena itu BNI yang menginputkan agennya, terus maintenance juga. Jadi Bank BNI itu jadi mitra dan kerjasama sama e-Warongnya”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23/November/2018, pukul 09.29 WIB, di Kantor ABB BNI KCU Malang)

Berkaitan dengan hal tersebut Mba Eka Aprilia Hani memberikan penjelasan tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak Bank BNI dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang.

“Kalau Bank BNI itu sudah menyediakan fasilitas keagenan 46, maksud saya itu e-Warong ini sebagai perpanjangan bank, jadi agen-agen e-Warong KUBE PKH ini yang ditunjuk sebagai agen BNI itu bisa melakukan transaksi perbankan yang transaksional. 70%-80% an lah transaksi di mesin ATM itu bisa dilakukan di e-Warong. Fungsinya nanti setelah bekerjasama dengan kita, e-Warong ini bisa melakukan tiga hal yang pertama itu istilahnya LAKUPANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah yang tidak tersentuh sama perbankan, itu sekarang diupayakan semua orang yang di negara ini bisa terlayani jasa

perbankan yang persyaratannya tidak seperti untuk nasabah pada umumnya, jadi e-Warong ini bisa buka rekening, tarik tunai, setor. Nah untuk fungsi kedua untuk *e-Payment*, nah *e-Payment* ini untuk pembayaran pasca bayar, kemudian pulsa, pembayaran tiket, pokoknya yang berhubungan dengan pembayaran, bayar cicilan, dan sebagainya. Untuk fungsi yang ketiga itu sebagai penyalur bantuan mas, yaitu bantuan sosial. Selain itu ya kita sediain mesin edc, terus kita juga ada papan *signage* yang di e-Warong itu dari BNI juga, terus sama anu sih pembelajaran ke SDM di warungnya sendiri. Jadi dari awal kita sudah mendampingi terus kita ajari mulai dari transaksi lewat EDC sama lewat web kayak gitu”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23/November/2018, pukul 09.29 WIB, di Kantor ABB BNI KCU Malang)

Berkaitan dengan sosialisasi program e-Warong dari Bank BNI

Mba Eka Aprilia Hani memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Oh pernah mas, jadi awal-awal dulu pas e-Warong dibentuk di Malang itu kan akhir tahun 2016 nah awal pembentukan itu kita lakukan sosialisasi. Kalau di awal, kita sosialisasi semua mas, kita kumpulkan terus kita lakukan sosialisasi keagenannya, diajarin cara transaksi pembelian untuk Bansosnya kayak gimana lewat EDC, tapi kalau sekarang saya sosialisasinya untuk transaksi yang lain selain transaksi Bansos itu, soalnya sekarang kan kebanyakan sudah bisa transaksi Bansosnya itu jadi gak perlu saya ajarin lagi. Kalau untuk sosialisasi lanjutan ya itu tadi mas melalui petugas-petugas dari BNI yang turun langsung buat *maintenance*, dari situ mas kita sosialisasi lanjutannya”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23/November/2018, pukul 09.29 WIB, di Kantor ABB BNI KCU Malang).

Mba Eka Aprilia Hani juga memberikan penjelasan terkait peran dari petugas ABB (*Assistance Branchless Banking*) sebagai berikut:

“ABB itu mas kepanjangannya *Assistance Branchless Banking*, sebenarnya kita itu unitnya gak hanya mengurus Bantuan sosial mas, jadi untuk keagenannya lebih ke situ. Jadi kita memang se-Malang Raya agennya”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23/November/2018, pukul 09.29 WIB, di Kantor ABB BNI KCU Malang).

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa peran Bank BNI sebagai instansi perbankan dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH

di Kota Malang adalah sebagai pihak yang bermitra dan bekerjasama dengan pihak Kemensos dalam menyediakan, menginput serta melakukan *maintance* sistem keagenan yang diberi nama “Agen46” di e-Warong yang ada di Malang. Dalam mewujudkan peran dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang, Bank BNI melakukan kegiatan berupa penyediaan fasilitas keagenan46 di e-Warong dan menjadikannya sebagai agen bank yang bisa melakukan 70% sampai 80% (tujuh puluh persen sampai delapan puluh persen) kegiatan perbankan yang transaksional seperti di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Salah satu fungsi e-Warong di Kota Malang setelah mendapatkan fasilitas keagenan46 yakni sebagai penyalur bantuan sosial. Selain itu Bank BNI juga melaksanakan kegiatan penyediaan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang digunakan oleh e-Warong di Kota Malang dalam melakukan transaksi perbankan. Kegiatan sosialisasi dilakukan Bank BNI pada awal pembentukan e-Warong di Kota Malang dengan mengumpulkan masyarakat yang ikut dalam implementasi program e-Warong yang kemudian diberikan sosialisasi mengenai keagenan dan cara transaksi pembelian bantuan sosial melalui mesin EDC di e-Warong. BNI melakukan pendampingan kepada SDM di e-Warong yang ada di Kota Malang melalui petugas-petugasnya di lapangan. Narasumber menyebutkan bahwa akhir-akhir ini sedang dilakukan pendampingan terhadap SDM di e-Warong terkait pencairan bantuan sosial melalui sistem *web*. Narasumber juga

menyebutkan bahwa peran dari petugas ABB dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang adalah bertugas untuk mengurus bantuan sosial dan keagenan dari e-Warong diseluruh Malang Raya.

d. Penyelia e-Warong KUBE PKH (Pendamping PKH)

Penyelia e-Warong KUBE PKH (Pendamping PKH) merupakan SDM dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. Dalam Peraturan Dirjen PFM Nomor: 40 /PFM/SK/HK.01/09/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BPSU Melalui E-Warong KUBE PKH, PFM Perkotaan, Dirjen PFM disebutkan bahwa tugas dan tanggungjawab Pendamping Sosial (Pendamping PKH, Pendamping KUBE, TKSK dan pendamping lainnya) dalam implementasi program e-Warong adalah:

1. Sebagai penanggung jawab di lapangan untuk program bantuan sosial (PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Subsidi Gas, Subsidi Pupuk, BLSM, dan lain-lain)
2. Bersama Dinas Sosial Kab/Kota mensinergikan data keluarga penerima manfaat dan mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial melalui e-warong KUBE.
3. Pendamping sosial adalah pendamping PKH, TKSK, pendamping Kube dan pendamping lainnya dibawah koordinasi Dinas Sosial Kota/Kab. (Tasikmalayakota, Dinsos. 2017. *"Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Penanganan Fakir Miskin Perkotaan"* diakses pada tanggal 02 Desember 2023 WIB dari <http://pkh.dinsos.tasikmalayakota.go.id/downloads/20170313180952.pdf>)

Pak Naisanto selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu memberikan penjelasan bahwa perannya sebagai penyelia dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang adalah memberikan pendampingan untuk pengurus e-Warong khususnya di e-

Warong Tanjungrejo Bersatu. Selain melakukan pendampingan narasumber juga mengontrol dan mengawasi kegiatan yang dilakukan pengurus di e-Warong Tanjungrejo Bersatu agar tetap mengikuti peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah untuk e-Warong. Narasumber sebagai penyelia e-Warong juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Malang dan pihak terkait lainnya khususnya terkait pengembangan dari e-Warong. (Wawancara, Naisanto, 04/November/2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa narasumber sebagai penyelia e-Warong dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang berperan dalam memberikan pendampingan langsung bagi pengurus e-Warong. Bentuk pendampingan tersebut dengan mengawasi, mengontrol dan mengarahkan pengurus e-Warong agar tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Narasumber sebagai penyelia e-Warong berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Malang dan pihak terkait lainnya khususnya dalam usaha pengembangan e-Warong.

e. Pengurus e-Warong KUBE PKH / Kube Jasa.

Pengurus e-Warong KUBE PKH/KUBE Jasa merupakan SDM dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH. Pengurus e-Warong sebagai KUBE Jasa berperan dalam mendirikan dan mengelola e-Warong. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Sri

Widya Y selaku bendahara Tanjungrejo Bersatu yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau saya sudah mampu, pengurus yang lain juga mengerti karena kan kita ada piket jadi ya yang lain juga perlu tau gimana caranya. Kalau misalnya waktu pencairan bantuan kan banyak yang gesek ke sini, saya juga jelaskan saya bantu mereka juga jadi kita ngomong ke orangnya juga. Kadang kan orang ketakutan a mas, dikirain tadi udah digesek kertasnya udah keluar padahal yang sebenarnya kita keluarkan kan cek kuota bantuannya, bukan ditarik tunai. Saya jelaskan lagi ini loh bu cek tunai itu seperti ini, cek kuota itu seperti ini. Ini gunanya itu biar anda tau berapa beras yang anda punya yang sudah digesek atau belum digesek anda akan tau, terus berapa nominal uang di atm anda juga bisa tau tak jelasin seperti itu. Kebanyakan yang kayak gitu kebanyakan yang KPM PKH, kita juga gak marah ya dengan itu ya, soalnya kan kita udah tau latar belakang pendidikan kita kan beda-beda. Kalau mungkin pendidikan mereka paling tinggi SMA atau SMP masih bisa menerima, tapi yang gak dapat pendidikan gimana. Kita gak nyalahin mereka kenapa mereka gak berpendidikan Cuman kan karakter orang beda-beda antara yang dapat pendidikan dan gak dapat pendidikan, rasa ketakutan mereka juga kan beda. Dari non PKH juga ada, yang masalah saldo nol itu pernah, itu juga kita jelaskan ke mereka, tapi kan kita gak bisa bantu untuk laporinnya kita arahin lah mereka ke PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sama pihak-pihak yang bisa bantu. Karena kita pengurus e-Warong kan hanya menyalurkan, kita gak bisa bantu untuk mengurus yang gitu”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22/November/2018, pukul 10.18 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berkaitan dengan peran dari pengurus e-Warong di Kota Malang peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Wahyu Puji Astutik selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Semuanya di sini bisa (pengurus e-Warong Maju Sejahtera) soalnya dulu kan awalnya cuman saya tapi kan harus bisa semua semisal kalok bergantung sama saya aja lah gak bisa. Soalnya kita sistemnya di sini kan piket jadinya semua di sini udah bisa. Baru berapa bulan buka udah dilatih terus kan pada belajar akhirnya semuanya bisa gak hanya satu orang, siapapun disini yang jaga pasti bisa gesek”.

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15/November/2018, pukul 15.42 WIB di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kedua narasumber dan pengurus e-Warong ditempat masing-masing sudah mengerti dan paham dengan penggunaan mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Kedua narasumber menyebutkan hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya jadwal piket yang sudah ditetapkan pengurus untuk mengelola dan melayani konsumen yang ingin berbelanja ke e-Warong setiap harinya maka dari itu wajib bagi setiap pengurus di dua e-Warong tersebut untuk mengetahui penggunaan dari mesin EDC sehingga setiap pengurus bisa melayani masyarakat lewat penggunaan mesin EDC. Bendahara e-Warong Tanjungrejo Bersatu menyebutkan bahwa pada awal pembukaan e-Warong tersebut para pengurus diberikan pelatihan terkait penggunaan mesin EDC. Selain itu bendahara e-Warong Maju Sejahtera menyebutkan bahwa beliau kerap memberikan penjelasan kepada masyarakat penerima bantuan yang mencairkan bantuan sosialnya di e-Warong Maju Sejahtera tentang pencairan bantuan sosial melalui mesin EDC, narasumber menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat penerima bantuan yang mayoritas berpendidikan rendah.

3. Arah Respon Pelaksana Terhadap Implementasi Menerima atau Menolak dan Intensitas dari Respon Pelaksana

Arah respon pelaksana terhadap implementasi suatu program baik itu menerima atau menolak dan intensitas dari respon pelaksana itu

sendiri merupakan salah satu aspek untuk melihat kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kemampuan dari organisasi pelaksana baik secara kelompok maupun perorangan dalam menjalankan tugas yang diisyaratkan oleh program.

a. Dinas Sosial Kota Malang

Arah Respon Dinas Sosial Kota Malang terhadap implementasi program e-Warong, menerima atau menolak dan intensitas (keberlanjutan) dari respon itu sendiri penting untuk dilihat sehingga bisa diketahui bagaimana kemampuan dari Dinas Sosial Kota Malang terkait implementasi program. Berikut wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sumarti selaku Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Malang yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kita pasti mendukung lah mas, harus komit juga buat mensukseskan program ini karena kan ini program kemensos yang diturunkan ke daerah ya kita yang disini harus betul-betul mengawal lah toh program ini juga tujuannya mensejahterakan KPM yang ada di Malang”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13/November/2018, pukul 12.10 WIB, di Kantor Dinas Sosial Kota Malang).

Berkaitan dengan hal tersebut Ibu Sumarti juga memberikan penjelasan terkait intensitas (keberlanjutan) dari arah respon tersebut.

“Kalau dukungan kita itu misalnya kayak kemarin itu kita coba bantu salah satu e-Warong buat ajukan proposal ke ASTRA mas buat dapet motor barang iku loh, nah itu kita bantu administrasinya lah, terus di sini kan biasanya juga onok sosialisasi soal bantuan sosial dari pusat koyok Bimtek (Bimbingan Teknis) atau Binjut (Bimbingan lanjut) ya kita bantu nyediain tempatnya, biasanya kita pake gedung iku loh mas (Aula Dinas Sosial) kan situ sering sosialisasi bantuan sosial cuman ya iku dari pusat tok kalau dari kita sendiri ora onok mas,

cuman dari pusat saja. Menurut saya pribadi harusnya ada mas tapi kenyataannya ndak ada, gak dianggarkan dana, anggarannya masih buanyak untuk kegiatan yang lain mas, ya dianggap e-Warong itu sudah jalan lah mas, ya kenyatannya memang berjalan kecuali yang pernah bermasalah tapi ya sekarang sudah ganti orang lain kan, makanya sudah jalan lagi. Kalau pelatihan untuk penyelia atau masyarakat itu gak ada mas tapi kita itu punya anggaran juga untuk pengadaan pelatihan-pelatihan juga, macam-macam pelatihan tapi yang kita utamakan dari PKH dulu, jadi KPM PKH tapi pertama dia harus punya bakat, terkadang kan ada KPM PKH itu eh dodol gorengan, jual nasi atau jual apa itu yang kita ambil mas tapi kalau buat pelatihan soal e-Warong ya ndak ada, selain Bimtek sama Binjut itu ya belum ada. Sebetulnya harusnya ada, soal e yang diharapkan teman-teman kemarin itu mas (pengurus e-Warong KUBE PKH) itu pelatihan cara pembuatan pembukuan tapi kita itu belum bisa memasukkan karena dianggarkan APBD Kota Malang itu harus ada kegiatan yang menyangkut dengan e-Warong kalau disitu kegiatannya ndak ada kita mau masukkan itu sulit, gitu loh mas. Kan itu kan Renstra mas ya, Renstra itu kan lima tahun sekali kan itu harus masukkan Renstra dulu . Jadi koyok umpama ne, eh saiki onok e-Warong padahal Renstranya sudah berjalan dua tahun atau tiga tahun terus kan kita mau masukkan juga sulit karena Renstra sudah disahkan beberapa tahun yang lalu, ya walaupun mau dimasukin ya paling bisanya tahun depan atau tahun 2019 baru bisa masuk. Kita sendiri ya ada niatan mas untuk memasukkan kegiatan pelatihan e-Warong di Renstra terutama menyangkut masalah pembukuan karena kan orang-orang itu (pengurus e-Warong) kesulitannya dalam pembukuan terus kemarin saya bilang kalau masalah pembukuan kita kalau ngikuti Diklat gitu otomatis kan harus sama, harus seperti itu tapi saya hanya memberitahu kalau pembukuan itu yang penting jelas dan semua orang itu ngerti dan dia sendiri (pengurus e-Warong) bisa membuat, gitu loh mas pokoknya yang mudah bagi dia karena kita kan yang diukurkan kan e-Warongnya kan mas bukan pendamping e kan jadi kalau ada tamu siapapun dia bisa menjelaskan, gitu loh mas”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13/November/2018, pukul 12.10 WIB, di Kantor Dinas Sosial Kota Malang).

Berdasarkan penjelasan dari narasumber bahwa Dinas Sosial Kota Malang mendukung pengimplementasian program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang hal tersebut menurut narasumber karena program e-Warong KUBE PKH berasal dari Kemensos dan Dinas Sosial Kota Malang sebagai perpanjangan tangan Kemensos di daerah

harus turut serta dalam mensukseskan program tersebut. Wujud nyata dari sikap mendukung tersebut sebenarnya sudah dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Malang dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti: membantu pengurus dan penyelia e-Warong dalam bidang hal administrasi untuk pengajuan proposal ke pihak ASTRA, memfasilitasi kegiatan sosialisasi bantuan sosial (Bimtek dan Binjut) yang disampaikan oleh pihak pusat, pelatihan bagi KPM PKH namun bukan pelatihan tentang e-Warong. Narasumber menyebutkan bahwa intensitas (keberlanjutan) wujud nyata dukungan dari Dinas Sosial Kota Malang terkait implementasi program e-Warong melalui kegiatan-kegiatan tersebut masih kurang optimal dan belum berkelanjutan hal tersebut menurut narasumber dikarenakan belum adanya anggaran di Dinas Sosial Kota Malang untuk melakukan kegiatan seperti pelatihan bagi pengurus maupun penyelia e-Warong ataupun kegiatan rutin lain yang bertujuan untuk pengembangan e-Warong di Kota Malang.

b. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH)

Arah respon Korkot PKH terkait implementasi program menerima atau menolak dan intensitas (keberlanjutan) dari respon itu sendiri penting untuk dilihat. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Mas Fauzi selaku Korkot PKH di Kota Malang yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau kita sih komitmen terhadap program e-Warong ini ya kita pasti komitmen untuk gimana caranya biar sepuluh orang ini (pengurus e-Warong KUBE PKH) istilahnya mereka lulus lah, gak perlu ikut program bantuan sosial lagi dari pemerintah, tidak perlu

menerima bantuan lagi dan bisa mandiri'. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 08/November/2018, pukul 10.30 WIB, di Kantor Korkot PKH, Dinas Sosial Kota Malang).

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Korkot PKH di Kota Malang mendukung implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Dukungan yang diberikan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan kegiatan pengawasan kegiatan di e-Warong. Dukungan tersebut untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya KPM PKH yang ikut dalam kegiatan e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Intensitas dukungan tersebut sudah berkelanjutan yang mana dilakukan melalui kegiatan pengawasan kegiatan di e-Warong dan narasumber kerap berdiskusi dengan penyelia e-Warong di Kota Malang terkait kegiatan dan pengembangan e-Warong (Observasi, Abraham CRN, 2018).

c. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)

Respon Korteks terkait implementasi program menerima atau menolak dan intensitas (keberlanjutan) dari respon itu sendiri penting untuk dilihat. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Mba Labudda MH selaku Korteks di Kota Malang yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Saya sebenarnya lebih ke BPNT mas, cuman kan BPNT ini dicairkan juga lewat e-Warong jadi ya saya pasti mendukunglah soal program e-Warong ini karena toh nya untuk membantu masyarakat kan, biar BPNT yang dicairin lewat e-Warong lebih tepat sasaran kan itu juga tujuannya, pastinya saya mendukung. Karena BPNT ini juga lewat e-Warong saya sebagai korkot TKS yang mengawasi penyaluran BPNT juga harus koordinasilah dengan pihak-pihak terkait untuk mengawasi pencairan bantuan lewat e-Warong, biar

kalau ada permasalahan pencairan BPNT lewat e-Warong bisa dikoordinasikan sama-sama gimana cara penyelesaiannya, kan kalau sendiri-sendiri susah ya, makanya kita harus saling koordinasilah”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 13/November/2018, pukul 10.13 WIB, di Kantor Dinas Sosial Kota Malang).

Berdasarkan penjelasan tersebut Korteks sebagai salah satu penanggungjawab BPNT di Kota Malang mendukung implementasi program e-Warong di Kota Malang karena program tersebut untuk membantu masyarakat dan juga menjadi sarana agar pencairan BPNT (beras dan telur) di Kota Malang lebih tepat sasaran. Dukungan narasumber tersebut diwujudkan melalui pengawasan kegiatan BPNT di e-Warong dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya yang mana kegiatan tersebut sudah dilakukan secara berkelanjutan.

d. Petugas ABB (Bank BNI)

Arah respon bank BNI dan Petugas ABB Bank BNI terkait implementasi program menerima atau menolak dan intensitas (keberlanjutan) dari respon itu sendiri penting untuk dilihat. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Mba Eka Aprilia Hani selaku petugas ABB yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Sebenarnya kita itu BUMN lah jadi kita istilahnya mensukseskan programnya pemerintah tujuannya kita itu sebenarnya, cuman kita hanya mengurus masalah di kartu, pembentukan agen, sama EDC ya mas. Untuk yang pembelian beras, dan lain-lain itu kita serahkan sepenuhnya sama e-Warong itu. Jadi BNI itu sebenarnya hanya sebagai mitranya yang bekerjasama dengan e-Warong. Jadi ya gitulah mas karena kita bank nya BUMN jadi ya kita harus ikut mensukseskan juga program dari pemerintah itu” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23/November/2018, pukul 09.29 WIB, di Kantor ABB BNI KCU Malang).

Berkaitan dengan hal tersebut Mba Eka Aprilia Hani memberikan penjelasan tentang bagaimana sikap mendukung tersebut diwujudkan dan bagaimana intensitas (keberlanjutan) dari respon tersebut.

“Kalau dukungan secara finansial kita gak ada mas ya jadi murni modalnya mereka sendiri. Kita cuman dukung sistemnya, jadi sistem keagenan yang *web* nya itu untuk transaksi yang lain-lain, kalau untuk dukungan lain cuman paling ya pelatihan, pelatihannya kalau ada fitur-fitur baru di sistem keagenannya kita baru lakukan sosialisasi, penyampainnya juga kalau bisa dijelaskan lewat *group chat* terus sudah paham ya kita lewat *group chat* aja, tapi kalau lewat situ belum paham juga kita langsung terjun ke lapangan untuk sosialisasinya”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23/November/2018, pukul 09.29 WIB, di Kantor ABB BNI KCU Malang).

Peneliti juga menanyakan respon petugas ABB Bank BNI terkait implementasi program e-Warong di Kota Malang dan intensitas respon dari petugas ABB dengan mewawancarai Mba Eka Aprilia Hani sebagai petugas ABB Bank BNI yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau saya sendiri kan sebagai petugas saja. Jadi saya cuman mendampingi e-Warong itu dan mengatasi kendala-kendalanya, terus ya ikut mensukseskan jugalah mas. Karena kan mau gak mau semuanya kembalinya ke saya, gitu loh mas. Kalau misalnya ada laporan, terus ada kendala-kendala kan baliknya ke saya jadi kayak tadi ikut mensukseskan juga. Intinya sih gini, kalau saya lihat ini kan tujuannya pembentukan e-Warong sendiri kan emang untuk mengentaskan kemiskinan, jadi kalau menurut saya kita tim dari ABB sepenuhnya lah mas kalau buat e-Warong. Kalau bisa memang e-Warong ini bisa mensejahterahkan orang-orangnya sendiri”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23/November/2018, pukul 09.29 WIB, di Kantor ABB BNI KCU Malang).

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas Bank BNI mendukung implementasi program e-Warong di Kota Malang.

Dukungan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari Bank BNI seperti: menyediakan dan menginput sistem keagenan untuk e-Warong, pengadaan mesin EDC (*Electric Data Capture*) untuk semua e-Warong yang sudah beroperasi di Kota Malang, pelatihan bagi pengurus e-Warong apabila ada fitur-fitur baru pada sistem keagenan. Narasumber sebagai petugas ABB juga menyatakan sikap mendukung terkait implementasi program e-Warong di Kota Malang yang diwujudkan melalui kegiatan pendampingan kegiatan perbankan bagi pengurus e-Warong dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan. Intensitas (keberlanjutan) dari dukungan Bank BNI dan petugas ABB terkait implementasi program e-Warong di Kota Malang sudah dilakukan dan berkelanjutan yakni melalui kegiatan pendampingan dari Bank BNI melalui petugas ABB ke pengurus dan penyelia e-Warong di Kota Malang terkait fitur-fitur baru pada sistem keagenan yang bisa dioperasikan di e-Warong maupun menyelesaikan masalah-masalah di e-Warong yang berhubungan dengan perbankan, kegiatan pendampingan tersebut dilakukan melalui *handphone (whatsapp)* atau kunjungan langsung dari petugas ABB ke e-Warong.

e. Penyelia e-Warong KUBE PKH (Pendamping PKH)

Respon penyelia e-Warong terkait implementasi program menerima atau menolak dan intensitas (keberlanjutan) dari respon itu sendiri penting untuk dilihat. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti

melakukan wawancara dengan Bapak Naisanto selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.

“Kalau dari saya sendiri dan pengurus e-Warong ya memang lebih menekankan komitmen ya jadi di pengurus e-Warong yang kita tekankan jujur, komitmennya, itu betul harus benar-benar komit kita pun kalau memang pengen bantu ya ayo kita bantu kita jalan bareng-bareng jadi gak ada perbedaan makanya kemarin sampe kita buat totalitas tanpa batas dengan harapan kan kita betul-betul total jangan sampai berpikir masalah nominal yang penting kita jalankan. Kalau ada ya sudah kita nikmati apa yang ada jadi kita komitmen betul-betul dengan mereka makanya selalu kita dampingi, gak apa-apa ayo kita jalankan bareng-bareng enak satu enak semua, gak enak satu ya gak enak semua, sudah yang penting jalan bareng jangan sampe nanti cuman sekedar aja ya”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 04/November/2018, pukul 12.10 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Mas Rahmat Prayudi selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau dari saya pribadi dan teman-teman pengurus warung sini dari awal kita sudah tanamkan itu soal e yo sayang ada program yang jadi wadah buat mereka buat belajar wirausaha atau semisal itu kan pengurus e-Warong ini ada yang tukang sablon dia bisa sablon untuk kemasan beras atau kemasan telur biar lebih menarik kan itu kesempatan buat dia. Nah maka dari itu saya sendiri sebagai penyelia dan pendamping PKH selalu mengarahkan pengurus ini misalnya di rapat atau pertemuan-pertemuan dengan ibu-ibu ini supaya ayo kerja bareng, kasih pelayanan yang bener ke konsumen, kualitas barang diperbaiki, kalau kita buat konsumen nyaman kan mereka pasti datang ke sini lagi, nah itu lah kita coba jalankan mudah-mudahan kedepannya ibu-ibu pengurus ini tetap bertahan juga biar kita bisa lihat hasil e warung iki buat mereka itu ada apa gak”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 16/November/2018, pukul 13.27 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Kedua penyelia e-Warong KUBE PKH memberikan dukungan terkait dengan program dan pengimplementasiannya di Kota Malang.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendampingan bagi pengurus e-Warong masing-masing, mengikuti rapat rutin diinternal e-Warong pemberian motivasi dengan mendorong pengurus agar betul-betul memanfaatkan program e-Warong dan memberikan arahan kepada pengurus untuk memaksimalkan pelayanan dan kualitas barang di e-Warong. Intensitas (keberlanjutan) dari dukungan tersebut sudah dilakukan oleh kedua narasumber yakni melalui pendampingan pengurus di e-Warong masing-masing mulai dari awal pembentukan sampai dengan beroperasinya e-Warong, rutin mengunjungi e-Warong untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan para pengurus dan rutin mengikuti rapat internal di e-Warong masing-masing. Selain itu narasumber juga melakukan komunikasi secara langsung maupun melalui selular (*handphone*) dengan para pengurus di e-Warong masing-masing. (Observasi, Abraham CRN, 2018).

f. Pengurus e-Warong KUBE PKH/KUBE Jasa

Respon pengurus e-Warong terkait implementasi program menerima atau menolak dan intensitas (keberlanjutan) dari respon itu sendiri penting untuk dilihat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan dua pengurus e-Warong di Kota Malang yakni pengurus e-Warong Tanjungrejo Bersatu dan Maju Sejahtera. Berikut wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sri Widya Y selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dukungannya 100% lah mas ya. Terus kalau ada ide-ide, kita ya bener-bener jadi gak setengah-setengah. Kayak ide buat donasi, terus ide-ide buat *delivery order* sama pas pencairannya saya selalu siap, buat belanja-belanja kebutuhan di warung saya juga harus siap, ya pokoknya dukungannya selalu siap lah mas, totalitas lah istilahnya. Terus yang sosialisasi soal bantuan ke KPM non PKH itu kan juga termasuk dukungan, dengan begitu kan saya meramaikan e-Warong dan mereka tertarik dengan saya ngomong, saya promosi, mereka tertarik akhirnya kita juga dapat tambahan keuntungan lagi kalau mereka akhirnya belanja ke sini”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22/November/2018, pukul 10.18 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Wahyu Puji Astutik selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Ya itu mungkin peningkatan kualitas sama pelayanan itu sih. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik karena KPM itu juga konsumen ya makanya kita berusaha ya opo carane mengembangkan e-Warong ya dari para konsumen ini sama dari kualitas barang dan harga. Semisal kalau harga disini lebih murah dari yang lain otomatis kan mereka juga ke sini terus barang disini lebih bagus dari yang lain kan mereka kesini. Ya mungkin bantuan atau dukungannya dari segi itu sih. Terus kalau ada barang yang sering dicari orang tapi kita ga ada, kita berusaha untuk menyediakan biar konsumennya gak kecewa”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15/November/2018, pukul 15.42 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Berdasarkan penjelasan diatas kedua narasumber mendukung dan berkomitmen untuk menyukseskan implementasi program e-Warong di Kota Malang khususnya di e-Warong masing-masing. Dukungan tersebut diwujudkan lewat kegiatan seperti: peningkatan kualitas pelayanan di e-Warong, melengkapi barang-barang selain bahan pangan di e-Warong agar pemasaran produk di e-Warongnya masing-masing tidak terbatas hanya untuk masyarakat penerima

bantuan namun juga untuk masyarakat umum, mendukung dan melaksanakan ide-ide yang sudah dirancang untuk peningkatan kualitas pelayanan di e-Warong, serta mensosialisasikan program kepada masyarakat penerima bantuan dan masyarakat umum. Intensitas dari dukungan tersebut sudah dilakukan secara berkelanjutan dengan datang mengelola e-Warong sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, rutin mengikuti rapat diinternal e-Warong dan tetap melakukan komunikasi dengan pengurus dan penyelia di e-Warong masing-masing.

c. Elemen Kelompok Sasaran

Pada elemen ketiga, Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 12) menekankan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Artinya, harus ada kesesuaian antara syarat yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana dengan apa yang sudah dilakukan oleh kelompok sasaran program. Jika syarat yang ditetapkan tidak dapat dilakukan oleh kelompok sasaran maka hal tersebut akan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dari program. Maka dari itu penting bagi peneliti untuk mengetahui syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam implementasi program e-Warong melalui Permensos Nomor 25 Tahun 2016 Tentang BPSU Melalui e-Warong KUBE PKH dan bagaimana implementasi dari kelompok sasaran yakni e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungreje Bersatu yang dilihat dari aspek: (i) persyaratan

keanggotaan dan pembentukan e-Warong KUBE PKH dan (ii) persyaratan bangunan e-Warong KUBE PKH

1. Persyaratan Keanggotaan dan Pembentukan e-Warong KUBE PKH

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan disebutkan bahwa persyaratan keanggotaan e-Warong KUBE PKH adalah :

1. Peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya;
2. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
3. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan
4. Memiliki potensi dan keterampilan. (Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017:6)

Dalam peraturan yang sama disebutkan juga terkait persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH yang dilaksanakan dengan

1. Pasal 5 (lima)
 - a. Membentuk KUBE Jasa; dan
 - b. Memiliki tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH.
2. Pasal 6 (enam)
 - a. Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan 1 (satu) orang penyalia.
 - b. Penyalia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertugas melakukan pendampingan

Berikut wawancara yang peneliti lakukan di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dengan Ibu Wahyu Puji Astuti selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera:

“Awal mulanya itu kapan mas ya, pokoknya pembukaan e-Warong ini Agustus 2017 tapi ini kan awalnya bikin proposal dulu nah itu semuanya yang urus pendampingnya ya yang kemarin mas Rahmat itu (penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera). Pokoknya pertama kali mau dibangun itu beliaunya kan konfirmasi ke saya nanya mau apa gak ikut kegiatan ini, soalnya waktu itu tempat ini kan gak kepakai kalau misal disini mau dibuat e-Warong maksudnya untuk usaha nanti bersama itu, setelah dijelaskan sama beliau akhirnya karena tempat ini juga punya keluarga saya ya saya tanyakan dulu mas terus keluarga saya bilang ya terserah kalau dari kita mah gpp daripada tempatnya gak berfungsi akhirnya mas Rahmatnya bilang mau ajukan proposal dulu. Ternyata setelah pengajuan proposal gak tau berapa lama ya itu terus dikasih kabar kalau e-Warong nya sudah di setujui sama Kemensos nanti segera kita wujudkan ini. Soalnya dulu kan e-Warong itu mulai dari renov semuanya kan dari Kemensos semua. Sebelum ikut e-Warong ini mas kita juga ikut kegiatan PKH itu sudah lama lah mas lupa aku tahunnya. Nah di PKH itu anggota sama pengurusnya kan buanyak nah kebetulan waktu itu kan yang ditawarkan karena rumahnya ketepatan punya keluarga saya akhirnya saya yang ditanya, kira-kira ini kalau dibentuk usaha bersama sepuluh orang mbanya punya pandangan siapa ditanyain gitu mas ke saya akhirnya kita pilih berdasarkan sepengetahuan pendamping juga terus kita juga dikasih tau kira-kira siapa yang cocok untuk usaha ini yang mau gabung gitu. Jadi pengurus e-Warong yang sepuluh orang ini dari KPM PKH semua. Jadi per RW itu kita ada perwakilannya supaya itu tadi tau kalau ada info-info semisal ya kan e-Warong itu kan tujuan utamanya untuk penyaluran BPNT nah sebenarnya tujuan utamanya itu. Jadi dibentuknya e-Warong itu untuk lebih memudahkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan itu, nah abis itu kita kembangkanlah makanya ada *display* yang begini (etalase untuk menjual barang-barang sandang dan pangan) jadi awal mula gak gini dulu itu cuman tempat penyaluran BPNT aja. Jadi kita ini orang-orang jeneng e kelompok usaha bersama moso iyo aktif e mek beberapa hari aja, nah akhirnya kita ya opo yo carane kulak an, dapat hasil dari jualan dikit-dikit ya kita kembangkan soalnya ini udah hampir setahun lebih. Jadi awalnya dulu e-Warong ya cuman untuk nyalurno bantuan tok itu. Ya opo lek kalau gitu tok cuman nyalurkan bantuan tok akhirnya gak kembang ta warungnya. Kita ngomong juga sama Mas Rahmatnya yo gpp daripada cuman satu bulan kegiatannya cuman itu aja kalau

gini kan kita tiap hari gantian yang jaga”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15/November/2018, pukul 15.42 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera)

Begitu juga dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sri Widya Y selaku bendahara e-Warong Tanjungrejo Bersatu di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau awal mulanya itu saya kan anggota PKH ya jadi pas ada kumpul dengan anggota PKH yang lain saya cuman ditawarkan mau gak bantu menyalurkan bantu nimbang atau bantu apa gituloh itu yang pertama kali, terus setelah itu disampaikan dikumpulkanlah sepuluh orang yang ditawari itu mau gak bantu nyalurkan, ternyata setelah disosialisasikan sama pendamping kita ini ditunjuk setiap kelurahan untuk mendirikan satu usaha bersama yang disebut e-Warong, anggotanya sepuluh orang semua ini sudah dikumpulkan dan ada jabatan masing-masing jadi ada strukturnya ada ketua sekretaris bendahara dan anggota nanti punya tugas sendiri-sendiri, seperti itu”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22/November/2018, pukul 10.18 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berdasarkan informasi dari kedua narasumber diatas dapat diketahui bahwa kedua narasumber sebelum ikut dalam program e-Warong adalah KPM yang sudah mengikuti program keluarga harapan (PKH). Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti didapati juga bahwa kedua narasumber berdomisili di Kota Malang, berusia 31 tahun (Ibu Wahyu Puji Astutik) dan 35 tahun (Ibu Sri Widya Y), masih produktif, dan memiliki kemauan berpartisipasi dalam program e-Warong di Kota Malang. (Observasi, Abraham CRN, 2018). Narasumber menuturkan bahwa alur pembentukan e-Warong di tempat masing-masing diawali dari tawaran yang diberikan pendamping PKH

kepada narasumber dan sembilan orang anggota PKH yang lain untuk ikut dalam program e-Warong. Sepuluh orang yang menerima tawaran tersebut diberikan sosialisasi mengenai program e-Warong oleh pendamping PKH dan kemudian membentuk kelompok usaha bersama dalam bidang jasa atau yang disebut sebagai KUBE Jasa. KUBE Jasa merupakan kelompok masyarakat penerima bantuan yang akan mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH. KUBE Jasa. Selanjutnya kelompok yang sudah dibentuk bersama-sama dengan penyelia (pendamping) menentukan tempat berdirinya e-Warong.

2. Persyaratan Bangunan e-Warong KUBE PKH

Adapun ukuran dasar atau kriteria bangunan e-Warong KUBE PKH berdasarkan Permensos Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang BPSU melalui e-Warong KUBE PKH yaitu:

1. Tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH harus bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE Jasa;
2. Pemilik rumah/ tempat lain tempat mendirikan e-Warong KUBE PKH tidak menuntut biaya sewa dan / atau biaya lainnya atas penggunaan rumah sebagai tempat e-Warong KUBE PKH;
3. Lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik;
4. Melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial;
5. Melaksanakan transaksi Bantuan Sosial Secara nontunai; dan
6. Aksesibilitas jalan yang memadai. (Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017: 5, 7-8).



Gambar 14. E-Warong Kube PKH Maju Sejahtera
Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018

Pemilik rumah berdirinya e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera adalah keluarga dari Ibu Wahyu Puji Astutik. Sebelum mengikuti program e-Warong, Ibu Wahyu Puji Astutik sebagai KPM yang mengikuti program PKH. Dalam kepengurusan di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera beliau bertanggung jawab sebagai bendahara e-Warong tersebut. Berdirinya e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera terhitung dari Agustus 2017 dan tidak terlepas dari peran pendamping PKH yang sekaligus penyelia e-Warong KUBE PKH Mas Rahmat Prayudi. Beliaulah yang menginisiasi dan menawarkan kepada para KPM PKH mengenai program e-Warong. Ibu Wahyu Puji Astutik yang juga menerima tawaran untuk bergabung dan memberikan tempatnya untuk digunakan sebagai tempat berdirinya e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera. (Wawancara, Wahyu Puji Astuti, 15/November/2018).

Sejalan dengan hal tersebut Mas Rahmat Prayudi selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau bangunan ini ya punya nya yang punya rumah yang pengurus e-Warong ini juga kan statusnya memang e-Warong itu aturannya harus bertempat di salah satu rumah KPM. Kalau rumah ini kan memang rumah dari Mba Wahyu (Bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera) sama Ibu Sri (Ketua e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera)”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 16/November/2018, pukul 13.27 WIB di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera)”.



Gambar 15. E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu
Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018

Berikut wawancara yang peneliti lakukan di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dengan Ibu Sri Widya Y selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera:

“Awal mulanya ini kan kita itu pertama di Jalan Perkutut. Disitu jalannya rayanya luas, rumahnya juga bisa masuk kriteria warung, tapi si Ibu yang punya rumah boleh, anaknya yang gak boleh. Alasannya karena katanya mau dipakai buat usaha, akhirnya gak jadi. Terus akhirnya kita cari lagi, ada tempat di Gempol, di situ ada rumah KPM tidak ditempati. Rumahnya kecil KPM nya bilang boleh dipergunakan buat e-Warong. Akhirnya kita betulkan, yang bocok kita betulkan, lantainya kita keramik, terus kosen kita ganti semuanya, total kita ganti, pake uang dari pemerintah itu yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah jadi akhirnya kita melakukan pelayanan disitu, tapi ndak beberapa lama si pemilik menyampaikan kalau rumah itu mau dipakai, karena anaknya mau

nikah. Karena itu akhirnya kita cari tempat, dapat di jalan Sri Gunting, cuman kita gak bisa mengembangkan modal, karena di jalan Sri Gunting udah ada usaha jadi kita cuman jualan beras tok gak bisa mengembangkan modal. Akhirnya kita ada ide gimana kalau kita sewa tempat saja, untuk uang sewa nya kan selama ini viar (motor box) ada kelebihan kenapa gak dari viar itu tadi kita masukkan ke sewa tempat, terus kita cari-cari akhirnya dapat tempat strategis yaitu disini. Sebelum disini sebenarnya ada yang nawarin mas ya cuman kan kita ada kriterianya. Jalannya harus luas, kenapa jalannya harus luas kan kalau beras datang terus jalannya sempit kita kesusahan, terus setidaknya agak lebar, karena kita nanti butuh tempat buat beras, tempat jualan kalau rumah kecil kita juga gak mungkin a mas akhirnya mengganggu si pemilik juga kan gitu, itu kenapa kok kita nyewa ya itu tadi masalahnya". (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22/November/2018, pukul 10.18 WIB di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa bangunan dari e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera adalah milik KPM yakni Ibu Sri yang menjabat sebagai ketua distruktur kepengurusan e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera, hal ini mengartikan bahwa bangunan tersebut bukan bangunan yang disewa oleh pengurus dan penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan tidak dimintai sewa oleh pemilik bangunan. Peneliti melakukan observasi ke e-Warong tersebut dan melihat bahwa bangunan dari e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera memiliki aksesibilitas jalan yang baik, terkoneksi dengan aliran listrik dan internet, melaksanakan transaksi bantuan sosial secara non tunai, tidak membayar sewa atas penggunaan rumah sebagai tempat berdirinya e-Warong dan melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial.

Kepemilikan bangunan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu sendiri berdasarkan informasi dari narasumber sempat

berpindah-pindah dikarenakan masalah internal yang terjadi di e-Warong tersebut. Bangunan yang sekarang digunakan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu bukan milik KPM ataupun pengurus dari e-Warong, melainkan milik masyarakat bukan penerima bantuan sosial atau bukan KPM. Pengurus dan penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dibebankan biaya sewa atas penggunaan bangunan, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian ukuran dasar dan kriteria bangunan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dengan Permensos Nomor 25 Tahun 2016. Menurut narasumber bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak menghambat pengurus dan penyelia untuk melakukan implementasi program dan mencapai sasaran serta tujuan dari program e-Warong. Peneliti melakukan observasi ke e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dan melihat bahwa bangunan dari e-Warong tersebut sudah melaksanakan transaksi bantuan sosial secara non tunai, memiliki aksesibilitas jalan yang memadai, terkoneksi aliran listrik dan internet serta sudah melayani 500 (lima ratus) sampai seribu (seribu) KPM bantuan sosial.

d. Sumberdaya

Sumberdaya atau sumber-sumber lain dalam sebuah implementasi program merupakan hal yang penting. Sumber-sumber lain tersebut dapat keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong memperlancar implementasi program yang efektif. Penting bagi peneliti

untuk melihat kesediaan sumber-sumber lain yang menunjang keberhasilan implementasi program e-Warong di Kota Malang, khususnya kesediaannya di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu.

1. Sumberdaya Infrastruktur

Sumber daya infrastruktur dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang dilihat dari kesediaan (i) rumah atau tempat berdirinya e-Warong, (ii) Mesin *Electronic Data Capture* (EDC), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).



Gambar 16. Lokasi e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu
Sumber: Dokumentasi Abraham CRN, 2018

Lokasi e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu berada di Jl. Puter Utara No.20 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti lokasi berdirinya e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu sudah terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik dengan baik dan memiliki aksesibilitas jalan yang memadai untuk melakukan aktivitas bongkar muat beras ataupun barang lain yang akan dipasarkan untuk KPM maupun masyarakat umum. Selain itu tempat berdirinya e-Warong tersebut berada

dilingkungan warga baik KPM maupun masyarakat umum sehingga memudahkan akses warga untuk mencairkan bantuan sosial non tunai atau berbelanja kebutuhan sehari-hari. Untuk KPM yang kediamannya jauh dari lokasi e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu juga tetap bisa mencairkan bantuannya lewat e-Warong tersebut karena pengurus dari e-Warong menyediakan viar (motor box) untuk mengantarkan bantuan BPNT berupa beras dan telur bagi KPM pada saat pencairan.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap bangunan tempat berdirinya e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera sebagai salah satu e-Warong yang sudah berdiri dan sudah beroperasi di Kota Malang. Berikut gambar dari e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera, berikut gambar dari tempat e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera.



Gambar 17. Lokasi e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera
Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018

Lokasi e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera berada di Jl. Bandulan 8 K2 No.1 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti lokasi e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera sudah terkoneksi jaringan internet dan

jaringan listrik dengan baik, serta memiliki aksesibilitas jalan yang memadai untuk melakukan aktivitas bongkar muat beras ataupun barang lain yang akan dipasarkan untuk KPM maupun masyarakat umum. Selain itu tempat berdirinya e-Warong tersebut dekat dengan lingkungan warga baik KPM maupun masyarakat umum. Kondisi tersebut akan mempermudah masyarakat baik KPM maupun umum untuk berbelanja di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera.

Infrastruktur pendukung lain dalam pelaksanaan e-Warong KUBE PKH adalah mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Berikut gambar dari mesin EDC dan Kartu Keluarga Sejahtera.



Gambar 18. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Sumber : Dokumentasi Abraham CRN, 2018

Gambar diatas adalah mesin EDC dan KKS serta bukti struk pengambilan BPNT yang didokumentasikan oleh peneliti saat melakukan observasi di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 40 /PFM/SK/HK.01/09/2016 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan BPSU Melalui e-Warong KUBE PKH bahwa mesin EDC adalah alat transaksi non tunai dengan menggunakan kartu untuk mendukung aktivitas layanan non tunai pada e-Warong KUBE. EDC sebagai salah satu sumber daya infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang berasal dari Bank BNI. Selain menyediakan EDC, Bank BNI melalui tim ABB memberikan edukasi kepada pengurus e-Warong terkait tata cara penggunaan mesin EDC. (Wawancara, Eka Aprilia Hani, 23/November/2018).

Kartu KKS adalah salah satu sumber daya infrastruktur dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. “Kartu kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)” (Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2017:5). Kegiatan e-Warong KUBE PKH di Kota Malang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah melaksanakan kegiatan melayani pencairan bantuan sosial non tunai. Merujuk kepada pengertian Kartu Kombo dan kegiatan di e-Warong KUBE PKH di Kota Malang, maka KKS adalah salah satu sumber daya infrastruktur dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

2. Sumberdaya Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan kecukupan modal dalam sebuah program atau kebijakan yang akan mendukung segala aktivitas serta fasilitas yang dibutuhkan agar terlaksananya implementasi tersebut. Sumber daya keuangan juga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program, apabila tidak tersedia secara cukup maka implementasi program tidak akan berjalan dengan lancar. Berdasarkan Permensos Nomor 25 Tahun 2016 Tentang BPSU melalui e-Warong KUBE PKH dan Permensos Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 25 Tahun 2016 tertulis:

- a. Bab VI (Pendanaan) Pasal 24
Sumber pendanaan e-Warong KUBE PKH dapat berasal dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
 4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017:15)

Selanjutnya pada peraturan yang sama, tertulis

- b. Pasal 15
BPSU sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk perbaikan ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang. (Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017:10).

Pada Pemensos Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permensos Nomor 25 Tahun 2016 tertulis:

- a. Pasal 17
 1. Bantuan KUBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa modal usaha dan modal kerja.
 2. Modal usaha dan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prosentase 25% (dua puluh lima

- persen) untuk modal usaha dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja.
3. Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembelian bahan pangan pokok.
 4. Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pembelian:
 - a. listrik dengan kapasitas sebesar 900 (sembilan ratus) watt;
 - b. timbangan barang;
 - c. mesin pengemas hampa udara;
 - d. lemari pendingin; dan/atau
 - e. alat pengangkut barang.
 5. Dalam hal terdapat sisa dari pembelian modal kerja atau belum digunakan untuk pembelian modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), harus dimanfaatkan untuk modal usaha. (Permensos Nomor 8, 2017:5)

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Rahmat Prayudi selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Didapat dari pihak Kemensos itu dana nya, itu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Untuk pembagiannya itu kita tetap sesuai dengan ketentuannya ya, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu untuk renovasi tempat kayak buat renov tempat, nge cat, beli-beli rak nah untuk itu. Kalau yang 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kan untuk produksi kayak misalkan kayak *sealer* plastik, timbangan terus modal untuk beli berasnya, dulu waktu itu aturannya masih boleh minyak sama gula nah sekarang kan berubah tapi dua puluh juta yang awal itu masih aturan untuk beli minyak sama gula. Kalau sekarang itu kan kita sediakan beras sama telur saja”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 16/November/2018, pukul 13.27 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Wahyu Puji Astutik yang menyatakan bahwa Kemensos mengkucurkan dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk renovasi bangunan dan 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk modal usaha dan

modal kerja. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari narasumber bahwa dua puluh juta tersebut dikurangi lagi untuk membeli kebutuhan yang lain di e-Warong sehingga menyisakan sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan pangan berupa beras dan telur untuk dijual kepada penerima bantuan sosial pangan non tunai ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera. (Wawancara, Wahyu Puji Astutik, 15/November/2018).

Untuk e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu juga mendapatkan dana sebesar tiga puluh juta rupiah dari pihak Kemensos. Sepuluh juta rupiah digunakan untuk renovasi tempat pertama berdirinya e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dan dua puluh juta digunakan untuk pembelian bahan pangan berupa beras dan telur yang akan dijual ke KPM penerima bantuan pangan non tunai maupun untuk masyarakat umum. Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu sempat berpindah-pindah tempat dikarenakan masalah internal di e-Warong tersebut. Dana sepuluh juta rupiah digunakan untuk renovasi tempat berdirinya e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu pertama sekali yang berlokasi di Jl. Gempol Margabakti RT 7 RW 10, kemudian karena masalah yang terjadi di internal e-Warong pengurus dan penyelia e-Warong tersebut berpindah tempat ke Jl. Srigunting, namun karena dirasa tempat tersebut tidak strategis akhirnya berpindah tempat lagi ke

lokasi berdirinya e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu sekarang di Jl. Puter Utara No. 20 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun. Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti dari Ibu Sri Widya Y selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu, selama e-Warong tersebut berpindah-pindah tempat tidak pernah lagi meminta dana ke pemerintah untuk renovasi tempat. Dana sebesar sepuluh juta dari Kemensos hanya digunakan untuk renovasi tempat pertama kali berdirinya e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dan dana untuk renovasi tempat-tempat berikutnya berasal dari keuntungan yang didapat selama proses pencairan bantuan sosial non tunai maupun penjualan barang-barang lain yang ada di e-Warong tersebut. Sedangkan untuk pembelian bahan pangan berupa beras, telur dan barang-barang lain yang dipasarkan di e-Warong untuk dijual ke KPM dan masyarakat umum, serta pembelian alat pendukung di e-Warong seperti timbangan, sealer, dll tetap menggunakan dana bantuan dari Kemensos sebesar dua puluh juta rupiah. (Wawancara, Sri Widya Y, 22 November 2018).

Berdasarkan penjelasan dan informasi yang didapatkan oleh peneliti sumber daya keuangan implementasi e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Kemensos kepada e-Warong di Kota Malang. Dana Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan dana BPSU dan dipergunakan untuk renovasi tempat berdirinya e-Warong di Kota Malang. Sisa dana sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

adalah dana bantuan KUBE untuk KUBE Jasa yang digunakan untuk pembelian bahan pangan yang dijual ke KPM dan masyarakat umum serta untuk membeli kebutuhan lain dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Adapun dana-dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

e. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Pada waktu implementasi program tidak terlepas dari pengaruh ekonomi dan sosial. Pengaruh dari faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan suatu program. Dalam hal ini sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan implementasi program. Lingkungan ekonomi dan sosial yang kurang kondusif dapat menjadi sumber permasalahan dari kegagalan dalam pengimplementasian suatu program. Maka dari itu penting untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di Kota Malang khususnya masyarakat yang ikut terlibat dalam program e-Warong KUBE PKH.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Malang

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2008	57.20
2009	44.37
2010	48.40
2011	45.44
2012	43.40
2013	40.90
2014	40.64

2015	39.10
2016	37.03
2017	35.89

Sumber : BPS Kota Malang, 2018

Jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2017 mencapai angka 35.89 ribu jiwa. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan, namun untuk semakin menurunkan angka kemiskinan tersebut dibutuhkan program-program baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mempunyai dampak nyata bagi masyarakat penerima bantuan. Berdasarkan kondisi ekonomi tersebut, pengimplementasian program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang sudah tepat. Melalui pengimplementasian program tersebut di Kota Malang, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterahkan para masyarakat yang terlibat dalam program, sehingga lebih mandiri dan tidak perlu lagi bergantung pada bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk melihat kondisi ekonomi, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus dua e-Warong di Kota Malang, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi dan profesi yang dijalani dari KPM di Kota Malang khususnya KPM pengurus e-Warong KUBE PKH. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Sri Widya Y selaku

bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau secara umum ya, teman-teman disini memang butuh ya. Mereka punya usaha sih di rumah tapi usahanya mereka juga belum berhasil lah jadi mereka masih layaklah ikut gabung di e-Warong untuk tambah modal bisa, tambah ilmu bisa terus jadi tau tempat-tempat kulak an, kan akhirnya kita *sharing*. Kulak an yang murah misalnya disini, mereka akhirnya tau, dengan seperti itu ya manatau usaha mereka bisa maju, dengan banyak wawasan itu tadi. Ya jadi memang masih layak lah buat gabung. Jadi kita bener-bener yang di e-Warong ini kalau dia mau gabung, ya mari, harus kompak, harus saling membantu, tidak ada rasa iri satu sama lain, jadi e-Warong ini milik bersama, dibesarkan bersama dikembangkan juga bersama karena nanti keuntungannya juga buat kita sendiri”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22/November/2018, pukul 10.18 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berkaitan dengan kondisi ekonomi dari para pengurus e-Warong KUBE PKH peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Wahyu Puji Astutik yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau berbicara soal itu mas, relatif ya menurut saya soal e saya gak bisa samain semua kan soalnya kita punya kondisi ekonomi yang beda-beda. Pengurus disini ada yang kerja sebagai ibu rumah tangga, ada yang ikut kerja sama orang juga, sama pekerjaan yang lain lah, tapi kan kita ikut di e-Warong ini supaya bisa nambah penghasilan mas, biar bisa bantu keuangan keluarga kita juga, ya kan kalau ibu rumah tangga aja pendapatan kita yang lain gak ada mas, cuman tergantung sama suami tok, ya opo carane kita itu bisa bantu suami juga, nah karena itu kita gabung ke sini. Terus kan kita juga pengen mas punya usaha sendiri, bisa lepas dari bantuan pemerintah juga, mumpung ini ada program yo kenapa gak dimanfaatin gitu loh mas buat beajar usaha, tapi ya harus bener-bener jangan setengah-setengah biar hasilnya kelihatan”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15/November/2018, pukul 15.42 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Berdasarkan penjelasan diatas untuk kondisi ekonomi dari para pengurus e-Warong KUBE PKH dilihat dari segi profesinya adalah ibu rumah tangga, mempunyai usaha kecil dan ikut bekerja dengan orang lain yang dimana profesi tersebut penghasilannya tidak tetap. Melalui program

e-Warong KUBE PKH para pengurus dapat mengelola e-Warong dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga mampu membantu keuangan keluarga dan harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masing-masing pengurus agar bisa mandiri dalam hal keuangan sehingga tidak perlu lagi ikut bantuan pemerintah.

Untuk melihat kondisi sosial, peneliti melihat respon, baik itu berupa dukungan maupun penolakan dari masyarakat dilingkungan sosial tempat diimplementasikannya program e-Warong. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Wahyu Puji Astutik selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Ada sih. Soalnya kita kan e-Warong ini kalau maksudnya secara gak langsung ya kalau mereka gak dukung otomatis mereka kan gak akan belanja kesini tapi itu banyak sekali para warga terutama yang non KPM itu yang belanja disini. Biasanya mereka itu sering tanya begini, loh warung iku oleh a sing jd tempat blonjo padahal kan tempat menerima bantuan ya kita jawab yo oleh lah, akhirnya mereka belanja ke sini juga. Menurut saya itu bentuk dukungan ya kalau mereka gak belanja ke sini otomatis kan seakan akan mereka gak mengindahkan ada warung disini. Tapi kan mereka itu ternyata istilahnya banyak yang nerima positif lah dengan adanya warung ini. Mereka malah bilang kalau disini barangnya murah kan gitu karena kita usahakan lebih murah ntah selisih limapuluh rupiah, seratus rupiah yang penting harganya beda otomatis kan warga sekitar juga datang ke sini. Soalnya kalau kita hanya jualannya pas penyaluran bantuan aja yo gak jalan tapi selama ini kan tueerus transaksinya itu lancar gitu loh kita lihatnya sih seperti itu. Alhamdulillah banyak kok warga disini yang belanja kesini. Pagi itu disini juga kan ada mlijoan (orang jualan sayur) makanya kita usahakan buka setiap hari. Kita bukanya jam tujuh terus ntar tutupnya jam enam. Jadi pas mereka belanja sayur kan kadang ada yang butuh minyak butuh gula otomatis kan bisa cari ke kita”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15/November/2018, pukul 15.42 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Rahmat Prayudi selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera:

“Dulunya mungkin yo sempet ada yo semacam kurang bisa diterima tapi seiring berjalannya waktu yowes bisa diterima soalnya waktu pertamanya ya kan waktu nurunin beras disini kan dibawa pake truk itu mungkin ada yang ngerasa terganggu atau apa cuman itu aja tapi itupun sudah bisa dimaklumi. Bahkan mungkin kayak konsumen sini itu rata-rata yo belanjanya kesini, maksud e kayak nyari apa gitu ya akhirnya datangnya kesini. Dulunya ya mungkin karena ketersediaan barangnya yang ndak lengkap atau apa, kalau sekarang kan sudah lebih lengkap lah dari sebelum-sebelumnya”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 16/November/2018, pukul 13.27 WIB di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Berdasarkan penjelasan tersebut lingkungan sosial di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera tempat pelaksanaan program secara keseluruhan mendukung program e-Warong KUBE PKH, walaupun pada awal implementasi program di tempat tersebut ada ketidaknyamanan dari warga sekitar terkait kegiatan bongkar-muat beras di e-Warong namun seiring berjalannya waktu hal tersebut dapat dimaklumi oleh warga sekitar. Selain itu warga sekitar e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera memberikan dukungan terkait dengan pelaksanaan program. Dukungan terlihat dari masyarakat sekitar yang bukan penerima bantuan tetap datang berbelanja ke e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera, hal ini tentunya akan menguntungkan para pengurus karena mendapat keuntungan dari penjualan barang-barang selain penjualan barang-barang BPNT.

Berikut juga wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Sri Widya Y selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu:

“Kalau penolakan gak ya, karena mereka tau ini e-Warung fungsinya menyalurkan bantuan, jadi kalau menolak gak ada, malah berbelanja kesini. Awalnya mereka gak mau belanja, dikira ini warung cuman untuk menyalurkan bantuan, tapi kita sosialisasikan kalau di sini itu boleh berbelanja tunai, beras pun kita jual tunai. Jadi kita gak milih-milih karena kita juga disini bekerja. Kalau seandainya kita bekerja pas penyaluran bantuan, kita bukanya cuman dua tiga hari sudah selesai. Jadi kita buka tiap hari buat melayani umum juga untuk mengembangkan modal itu tadi yang dari keuntungan itu. Setelah saya ceritakan seperti itu ya mereka datang beli ke sini. Dari warung-warung sekitar juga gak, karena kita juga bukanya gak seharian penuh, kita bukanya jam delapan pagi sampai jam tiga. Kalau dari segi barang sebetulnya kita hampir jual semuanya mas, tapi kita jualnya sesuai harga, mereka jual segitu kita jualnya juga segitu, dengan begitu kan mereka gak merasa tersaingi. Kalau kita buat harga kita jauh dari harga punya mereka, lebih murah dari mereka bisa-bisa nanti ada penolakan mas dari mereka”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 22/November/2018, pukul 10.18 WIB, di e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu).

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Naisanto selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu:

“Kalau masyarakat sekitar e-Warong kita itu ya mendukung mas, walaupun disekitar kita juga ada warung-warung yang jualan tapi ya mereka juga tetap bersaing sehat kok, lagian ini program kan buat bantu masyarakat yang kurang mampu jadi masyarakat sekitar juga ngerti kok”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 04/November/2018, pukul 12.10 WIB, di e-Warong Tanjungrejo Bersatu).

Berdasarkan penjelasan dari kedua narasumber, lingkungan sosial di sekitar e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu mendukung pelaksanaan program tersebut. Pada awal pelaksanaan program di tempat tersebut masyarakat sekitar sempat mengalami kebingungan terkait dengan program namun para pengurus memberikan sosialisasi terkait program ke masyarakat sekitar agar tidak ada persepsi berbeda. Selain itu berdasarkan penuturan dari narasumber tetap ada persaingan sehat antara e-Warong

KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dengan warung lain di sekitar, hal tersebut dilakukan agar masyarakat warung lain tidak merasa terganggu dengan kehadiran e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.

2. Hambatan Dalam Implementasi Program E-Warong KUBE PKH

a. Hambatan Dilingkungan Dinas Sosial Kota Malang

Pada setiap implementasi sebuah program para implementor tentunya akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ataupun program tersebut, begitu juga dengan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Bersama dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu)

Ibu Sumarti selaku Kepala Seksi (Kasi) PFM dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan penjelasan bahwa Kepala Bidang (Kabid) PFM dan Pemberdayaan di Dinas Sosial Kota Malang sudah pensiun. Sebelum pensiun, komunikasi Kabid PFM dengan beliau terkait implementasi program e-Warong di Kota Malang kurang baik, hal tersebut disebabkan Kabid PFM yang tidak terlalu memperdulikan implementasi program e-Warong dan berprinsip akan segera pensiun sehingga tidak perlu untuk repot-repot lagi. Informasi dari narasumber juga menyebutkan bahwa sudah pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan Kabid PFM tersebut namun tidak berhasil, sehingga dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang Kabid PFM dan Kasi PFM Dinas Sosial Kota Malang jalan sendiri-sendiri (minim komunikasi dan koordinasi terkait implementasi program).

Narasumber menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi kesulitan dan hambatan bagi Dinas Sosial Kota Malang dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. (Wawancara Ibu Sumarti, 13/November/2018).

Mas Fauzi selaku Korkot PKH (Koordinator Program Keluarga Harapan) juga memberikan penjelasan terkait hambatan dalam pelaksanaan program e-Warong di Kota Malang.

“Kalau menurut saya tantangan kita itu justru malah modal mas jadi modal dan pemodal karena di e-Warong sendiri itu hanya diberikan modal cuman dua puluh juta mas dan itu dikelola oleh kelompok sepuluh orang artinya bagaimana dua puluh juta ini bisa menguntungkan untuk sepuluh orang tersebut dan sepuluh orang tersebut bisa sejahtera tugas berat itu mas hanya dua puluh juta loh mas. Selain itu menurut saya hambatan yang lain itu dari Dinas Sosial Kota Malang sendiri yang kurang greget kali ya kurang berani atau bagaimana ya saya kurang tau juga yang jelas program e-Warong sebenarnya sudah bagus cuman sampai sekarang kita belum pernah melihat orang-orang e-Warong itu mendapatkan pelatihan khusus karena tidak mudah mas mereka para KPM yang pendidikannya rata-rata dibawah itu bisa mengelola seperti itu, dalam hal ini kan harusnya di *support* juga sama dinas dengan pelatihan supaya mereka itu bisa menjalankan bisnis e-Warong itu dengan bagus toh penyelia e-Warong sendiri tidak semuanya mempunyai kemampuan yang sama nah kalau bisa SDM (Sumber Daya Manusia) nya itu juga diberikan modal dulu, artinya modal pengetahuan dulu, modal pelatihan dulu supaya bisa menularkan ke KPM nya kalau tidak ya mana bisa kan gitu a seharusnya seperti itu idealnya lah mas tapi toh kenyataannya di lapangan belum bisa seperti itu”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 08/November/2018, pukul 10.30 WIB, di Kantor Korkot PKH, Dinas Sosial Kota Malang).

Ibu Sumarti selaku Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan penjelasan bahwa Dinas Sosial Kota Malang belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi penyelia dan pengurus e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Tidak tersedianya anggaran menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk penyelia dan pengurus. (Wawancara Ibu Sumarti, 13/November/2018).

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas bahwa hambatan dalam pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH di Dinas Kota Malang adalah kosongnya posisi Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kota Malang, sehingga sulit untuk melakukan koordinasi antar Kabid PFM dan Kasi PFM di Dinas Sosial Kota Malang terkait perumusan anggaran ataupun perumusan kegiatan pengembangan e-Warong di Kota Malang. Belum adanya kegiatan pelatihan dari Dinas Sosial Kota Malang untuk pengurus dan penyelia e-Warong di Kota Malang menjadi masalah yang saling berkaitan dengan masalah sebelumnya. Informasi dari narasumber menyebutkan bahwa tidak adanya anggaran menjadi penyebab belum dilaksanakannya kegiatan pelatihan untuk pengembangan penyelia dan pengurus e-Warong di Kota Malang.

b. Hambatan Dilingkungan Bank BNI

Berkaitan dengan hambatan dari lingkungan kerja Bank BNI terkait implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang peneliti melakukan wawancara dengan Mba Eka Aprilia Hani selaku petugas ABB Bank BNI yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau permasalahan dalam program itu khususnya program yang baru diperkenalkan itu gak mungkin berjalan tanpa ada permasalahan ya mas. Kalau untuk permasalahannya itu paling jaringan yang sifatnya itu lebih ke masalah di sistem mas, selain sistem juga ada masalah di pendekatan hubungan per *person* gitu loh tapi itu juga gak terlalu mas, paling pas awal karena belum kenal dan belum paham lebih ke penyesuaian dari pihak kita dan dari pihak e-Warong-nya juga mas“. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 23/November/2018, pukul 09.29 WIB, di Kantor ABB BNI KCU Malang).

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa sistem jaringan perbankan menjadi hambatan yang dialami oleh Bank BNI dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. Selain itu narasumber juga menjelaskan adanya kondisi tidak saling mengenal secara perorangan antara petugas ABB Bank BNI dengan pengurus e-Warong KUBE PKH pada awal implementasi program, namun menurut narasumber seiring waktu hal tersebut dapat teratasi dengan penyesuaian antara petugas ABB Bank BNI dengan pengurus e-Warong.

c. Hambatan Dilingkungan e-Warong KUBE PKH

Berkaitan dengan hambatan dari lingkungan e-Warong KUBE PKH peneliti melakukan wawancara dengan Mas Rahmat Prayudi selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Saya mungkin kasih contoh hal-hal yang sudah terjadi ya, jadi penerima kartu itu minim sekali sosialisasi. Kalau di PKH itu ada pendampingnya perbulan itu ada pertemuan itu sosialisasi ke KPM yang PKH bisa disosialisasikan disitu itupun seng onok gak ngerti apalagi yang gak dapet sosialisasi. Belum lagi kayak misalkan aturan barang-barang yang bisa dibelanjakan, kalau secara persaingan mas ya persaingan bisnislah istilahnya selama semuanya menerapkan aturan itu persaingan itu jadi sehat, kayak misalkan aturannya beras atau telur tapi di agen atau di tempat lain itu menyalurkan tidak hanya itu bisa minyak, bisa gula, bisa kopi, bisa mie dll. Orang kalau ditanya pasti lebih milih di agen kan, penerima bantuan itu pasti bilang lah saya juga butuh minyak, butuh gula dan butuh yang lain-lain. Padahal programnya kan jelas bantuannya beras sama telur itu kan ada maksud tertentu yang dibuat untuk kenapa kok beras sama telur. Kalau peraturan itu diterapkan sesuai aturan e-Warong punya daya saing ya kita mainnya kan sekedar harga, kita gak mungkin bersaing dengan agen terus kita jual minyak, gula, sama yang lain waktu penyaluran bantuan BPNT kan itu melanggar aturan. Itu permasalahan yang tadi soal sosialisasi. Fakta di lapangan juga ya mas itu orang pemilik kartu itu masih dengan mudahnya mempercayakan kartu itu dipegang orang lain padahal sebetulnya kan gak boleh. Terus

pemanfaatan cara belanja sama cara penggunaannya itu masih minim sosialisasi. Kayak misalkan mungkin yang non PKH kartunya itu saldonya habis tapi mereka ndak tau bahwa itu sudah rekening bisa dibuat nabung, bisa dibuat transfer dll. Terus soal jumlah bantuannya yang seratus sepuluh ribu perbulan BPNT nya belanjanya itu seperti apa, dimana aturannya seperti apa itu kan istilahnya minim sosialisasi. Contoh lain juga ini mas yang saya lihat ya, misalkan ketersediaan beras kan itu susah juga. Kalau misalkan kita cari yang *simple*, gampang, murah itu BULOG tapi kalau kita jual itu gak ada yang mau beli, akhirnya kita cari sendiri dari distributor-distributor. Sebenarnya banyak mas kalau hambatan-hambatannya yang menyulitkan lah untuk mensukseskan program ini biar bener-bener gitu ngenak ke masyarakat”. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 16/November/2018, pukul 13.27 WIB, di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera).

Berdasarkan penjelasan dari narasumber bahwa masih banyak permasalahan ataupun hambatan dilingkungan e-Warong dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. Minimnya sosialisasi bagi masyarakat yang KPM bukan PKH maupun yang bukan pengurus e-Warong menurut narasumber merupakan hambatan yang selama ini dialami pada saat implementasi program e-Warong KUBE PKH. KPM BPNT atau yang bukan pengurus e-Warong tidak mempunyai pendamping seperti KPM PKH maupun pengurus e-Warong sehingga akan sangat sulit bagi KPM BPNT untuk mendapatkan informasi apabila sosialisasi program BPNT dan e-Warong KUBE PKH masih minim.

Seringnya terjadi pelanggaran aturan tentang jenis barang yang bisa dijual kepada penerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Berdasarkan informasi dari narasumber bahwa di Kota Malang sering sekali terjadi pelanggaran aturan tersebut yang mana agen Bank BNI menjual barang diluar peraturan yang ada yakni beras dan telur. Kondisi tersebut

menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara e-Warong dan agen Bank BNI selaku tempat pencairan BPNT.

Kegiatan *collect* ATM yang masih sering terjadi pada implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang, selain mengindikasikan adanya kecurangan baik dari masyarakat maupun agen bank atau e-Warong kegiatan tersebut tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat, karena masyarakat yang mengumpulkan ATM (KKS) tidak lagi datang dan langsung melakukan transaksi untuk mencairkan bantuannya, hal tersebut akan menghambat dalam pemberian edukasi mengenai kegiatan perbankan di e-Warong bagi masyarakat penerima bantuan.

Ibu Sumarti selaku Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat juga memberikan penjelasan berkaitan dengan hambatan implementasi program e-Warong KUBE PKH dari lingkungan e-Warong.

“Kalau waktu pembentukan, itu ndak ada mas karena kan kita sudah milih mas ya kalau waktu pembentukan ya, Tapi kalau waktu berjalan wong namanya berjalan mas ya. Ketok e waktu dipilih ketok e apik tapi di tengah jalan ada masalah, itu pasti ada mas. Ada tapi tidak semua. Jadi kalau memang itu ibaratnya kalau yang sudah salah kalau bisa dibenarkan yo diterusno tapi kalau gak bisa ya diganti. Disini kan sempat ada penggantian untuk pengurus e-Warong, ya karena kan sudah nyalahi aturan mas. Salah satu e-Warong kita di sini pernah bermasalah mas di pengurusnya, jadi salah satu pengurusnya itu menyalahgunakan peralatan elektronik di e-Warong. Kan disitu mereka diberi alat kayak EDC, tablet itu kan untuk menyimpan data-data yang di e-Warong itu mas. Tapi terus mari ngono tablet itu dibuat kuliah sama anak e, ternyata bukan cuman tab itu tok. Ternyata duit yang duit keuntungan e-Warong itu kan disimpan dalam di rekening e-Warongnya mas, itu bisa dibobol karo anak e mas gak kurangajar gitu, ibunya malah gak tau, kejadian gitu mas. Tapi sekarang sudah, sudah diganti. Hambatannya itu paling gitu mas pas pelaksanaan, terus soal data penerima bantuannya itu, kartunya eror, saldonya nol, anggaran kita juga terbatas makanya itu kita belum bisa buat pelatihan buat pengurus sama penyelia, sama permasalahan yang wis tak bilang tadi mas”. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa,

13/November/2018, pukul 12.10 WIB, di Kantor Dinas Sosial Kota Malang).

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat hambatan dalam pelaksanaan program di lingkungan e-Warong berupa penyalahgunaan alat elektronik di e-Warong dan penyelewengan dana keuntungan dari e-Warong. Sebelum adanya perubahan dalam Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan disebutkan pada salah satu pasal bahwa modal kerja yang diterima oleh e-Warong digunakan untuk membeli perangkat elektronik berupa tablet. Pada pelaksanaan program di Kota Malang ditemukan penyalahgunaan perangkat elektronik di e-Warong oleh keluarga dari pengurus dan juga penyelewengan dana keuntungan dari e-Warong oleh orang yang sama. Selain itu adanya kartu dari KPM yang saldonya kosong dan tidak bisa digunakan untuk mencairkan bantuan sosial tunai maupun non tunai di e-Warong menjadi hambatan dalam implementasi program di lingkungan e-Warong.

C. Pembahasan

1. Implementasi Program E-Warong KUBE PKH di Kota Malang (Studi Pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungsrejo Bersatu)

Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 11) menyebutkan, ada tiga elemen model kesesuaian yang menentukan keberhasilan dari suatu

implementasi program. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga apabila terdapat salah satu elemen yang tidak berjalan dengan optimal maka akan berpengaruh terhadap elemen lainnya. Ketiga elemen tersebut, yakni elemen program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Peneliti melakukan pembahasan dengan mengkaitkan model kesesuaian tersebut dengan data yang peneliti dapatkan melalui kegiatan wawancara dan observasi lapangan untuk melihat bagaimana implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang.

a. Elemen Program

Jika ditinjau dari Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 11) yang menyatakan bahwa elemen program sebagai salah satu elemen yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program dimana harus adanya kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat), maka implementasi program e-Warong KUBE PKH sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (KPM dan masyarakat umum).

Program e-Warong menjadi sarana bagi KPM di Kota Malang (kelompok sasaran) dalam meningkatkan kesejahteraan yakni dengan cara menjadi pengurus e-Warong, aktif mengurus dan mengelola e-Warong dan kemudian mendapatkan manfaat-manfaat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari KPM. Kegiatan pencairan bantuan sosial melalui e-Warong memberikan manfaat bagi KPM bukan pengurus. Pencairan bantuan

sosial melalui e-Warong menurunkan resiko diselewengkannya bantuan sosial milik KPM. E-Warong juga menjadi sarana bagi masyarakat umum untuk mendapatkan barang-barang keperluan dengan harga yang lebih murah.

1. Tujuan Program e-Warong KUBE PKH

Tujuan program e-Warong merupakan *output* dari program untuk kelompok sasaran. Program e-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM). Implementasi program tersebut di Kota Malang tentunya juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari KPM yang ada di Kota Malang. Peningkatan kesejahteraan KPM tersebut dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan para KPM dengan mengelola e-Warong. Melalui kegiatan tersebut, KPM mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, pengalaman berwirausaha dan keuntungan lainnya. Keuntungan-keuntungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memacu semangat berwirausaha dari KPM sehingga kesejahteraan serta kemandirian dari para KPM pengelola e-Warong KUBE PKH dapat terwujud. Selain itu e-Warong KUBE PKH bertujuan juga agar pencairan dana Bantuan Sosial non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM lebih tepat sasaran.

2. Sasaran Program e-Warong KUBE PKH

Sasaran implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang yakni masyarakat penerima bantuan sosial yang disebut dengan

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM di Kota Malang terdiri dari KPM penerima Program Keluarga Harapan (KPM PKH), KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT), KPM penerima PKH dan BPNT (KPM PKH BPNT), selain itu sasaran program e-Warong di Kota Malang adalah masyarakat umum.

KPM PKH ataupun KPM BPNT ataupun penerima kedua bantuan sosial tersebut (KPM PKH BPNT) bisa melakukan pencairan uang tunai dan BPNT (beras dan telur) di seluruh e-Warong KUBE PKH yang tersebar di Kota Malang. Pencairan tersebut dengan menggunakan kartu khusus yang sudah diisi dengan uang bantuan sosial dari Kemensos dan disalurkan ke KPM melalui bank BNI sebagai bank yang ditunjuk Kemensos untuk menyalurkan bantuan sosial ke KPM di Kota Malang.

Melalui program e-Warong, KPM di Kota Malang juga bisa membentuk dan ikut menjadi pengurus e-Warong KUBE PKH dengan tetap mengikuti syarat dan ketentuan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sasaran berikutnya dari program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah masyarakat umum bukan penerima bantuan sosial. Masyarakat umum bisa melakukan transaksi pembelian barang-barang di e-Warong KUBE PKH dengan cara tunai maupun non tunai di seluruh e-Warong KUBE PKH yang ada di Kota Malang.

3. Kegiatan e-Warong KUBE PKH

Kegiatan e-Warong di Kota Malang adalah aspek yang dilihat peneliti untuk mengetahui rangkaian kegiatan yang dilakukan kelompok

sasaran untuk mendapatkan hasil dari program. Melalui Wawancara dengan dua pengurus e-Warong di Kota Malang dan observasi langsung yang dilakukan peneliti ke dua e-Warong yang ada di Kota Malang ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan pengurus e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera antara lain:

- a. Melayani pencairan bantuan sosial non tunai bagi warga KPM PKH maupun KPM non PKH.
- b. Menyediakan dan menjual bahan pangan pokok bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur.
- c. Menyediakan dan menjual barang-barang selain beras dan telur bagi penerima bantuan dan masyarakat umum.
- d. Memasarkan produk-produk hasil kerajinan KPM dan KUBE
- e. Melakukan kerjasama dengan bank dalam penyaluran bantuan sosial non tunai yang dibuktikan dengan adanya EDC (*Electronic Data Capture*) di e-Warong tersebut yang digunakan untuk mencaikan bantuan sosial non tunai.

Kegiatan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu antara lain:

- a. Melayani pencairan bantuan sosial non tunai bagi warga KPM PKH maupun KPM non PKH.
- b. Melayani pencairan bantuan sosial PKH.
- c. Menyediakan dan menjual bahan pangan pokok bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur.

- d. Menyediakan dan menjual barang-barang selain beras dan telur bagi penerima bantuan dan masyarakat umum.
- e. Melakukan kerjasama dengan bank dalam penyaluran bantuan sosial non tunai dan tunai yang dibuktikan dengan adanya EDC (*Electronic Data Capture*) di e-Warong tersebut yang digunakan untuk mencairkan bantuan sosial non tunai maupun tunai.
- f. Memasarkan produk KUBE.
- g. Memberikan layanan *delivery order* bagi KPM penerima BPNT yang kediamannya jauh dari e-Warong.
- h. Pengadaan viar (motor box) untuk mendukung layanan *delivery order*.

4. Manfaat Program e-Warong KUBE PKH

Tujuan dari program e-Warong KUBE PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang artinya program ini lebih ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari para KPM yang terlibat langsung menjadi pengurus di e-Warong KUBE PKH yang mana para pengurus tersebut mendapatkan upah dari kegiatan mengelola e-Warong.

Manfaat yang didapatkan pengurus e-Warong KUBE PKH di Kota Malang yakni:

- a. Keuntungan finansial

Terlibat dalam implementasi program, masyarakat KPM PKH di Kota Malang yang menjadi pengurus dan terlibat aktif dalam

implementasi program mendapatkan keuntungan finansial berupa uang. Keuntungan finansial tersebut berasal dari SHU (Sisa Hasil Usaha) dari penjualan barang-barang di e-Warong selain BPNT yang kemudian dibagi kepada pengurus e-Warong sesuai dengan jam kerjanya masing-masing. Jumlah uang yang didapat pengurus setelah terlibat aktif mengelola e-Warong memang tidak banyak namun sudah bisa menambah pendapatan dari para pengurus sehingga bisa membantu keuangan pribadi/ keluarga.

b. Menambah kegiatan pengurus dalam bidang kewirausahaan

Mayoritas pengurus e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah masyarakat KPM PKH, berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang kegiatannya lebih banyak mengurus anak dan mengurus urusan rumah tangga. Menjadi pengurus e-Warong kegiatan dari para KPM PKH di Kota Malang akan bertambah. Penambahan kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan positif yang bisa menambah wawasan dari pengurus tentang berwirausaha. Bertambahnya kegiatan pengurus dalam bidang kewirausahaan akan memacu para pengurus untuk membuka usahanya sendiri.

c. Menambah ilmu kewirausahaan

Menjadi pengurus e-Warong KUBE PKH di Kota Malang secara tidak langsung harus belajar bagaimana manajemen pemasukan, pengeluaran dan pembukuan tentang kesediaan barang-barang di e-Warong. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan ilmu kewirausahaan

yang bisa didapatkan dengan menjadi pengurus e-Warong di Kota Malang. Ilmu kewirausahaan tersebut nantinya bisa digunakan oleh pengurus e-Warong apabila ingin membuka usaha sendiri.

d. Menambah Relasi dari Pengurus e-Warong KUBE PKH

KPM PKH yang menjadi pengurus dan terlibat aktif mengelola e-Warong KUBE PKH dipastikan akan bertemu dengan pribadi-pribadi yang baru yang akan menambah relasi dari para pengurus. Bertambahnya relasi dari para pengurus menjadi modal yang penting di dunia kewirausahaan dan nantinya bisa bermanfaat bagi pengurus yang ingin membuka usaha sendiri.

b. Elemen Pelaksanaan Program

Pada elemen kedua, Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 12) menekankan kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu) maka elemen program dalam implementasi program e-Warong belum sesuai, hal tersebut disebabkan kurangnya intensitas (keberlanjutan) dukungan dari Dinas Sosial Kota Malang terhadap implementasi program. Penyebab kurangnya intensitas tersebut dikarenakan tidak dianggarkannya dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan yang berkaitan dengan implementasi program.

1. Sumberdaya Manusia Pelaksana Program

Sumberdaya manusia pelaksana program e-Warong menjadi aspek yang dilihat peneliti untuk melihat kesesuaian elemen pelaksanaan program e-Warong. Sumberdaya manusia (SDM) pada implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang yakni

a. Dinas Sosial Kota Malang (Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial dengan Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat)

Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah yang menjadi perwakilan Kementerian Sosial dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. Sumber daya manusia di lingkup Dinas Sosial Kota Malang yang bertanggung jawab dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial (Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial) dengan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat (Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat). Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Implementasi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Malang tahun 2017 ditegaskan juga pada salah satu poin bahwa Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas untuk melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan e-Warong bagi (PMKS). Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kota Malang berada dibawah naungan Kabid

PFM dan Pemberdayaan Sosial yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saling berkoordinasi.

b. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH)

Korkot PKH merupakan salah satu sumber daya manusia (SDM) dalam implelementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang hal tersebut dilihat dari keterlibatan Korkot PKH dalam implementasi program. Koordinator Kota PKH menaungi semua KPM PKH yang berada di Kota Malang, dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang KPM PKH menjadi sasaran program yang mana KPM PKH ikut menjadi pengurus di e-Warong. Maka dari itu Korkot PKH keterlibatan dari Korkot PKH dalam implementasi program adalah dengan mengkoordinir KPM PKH untuk membentuk KUBE Jasa. Selain itu Korkot PKH melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap KPM PKH yang menjadi pengurus di e-Warong. Hal-hal tersebut menjadikan Korkot PKH sebagai salah satu SDM dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang.

c. Koordinator Kota Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)

Korteks adalah SDM yang terlibat dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang hal tersebut dilihat dari keterlibatan Korteks dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. E-Warong di Kota Malang merupakan salah satu sarana pencairan BPNT (beras dan telur), Korteks dalam hal ini merupakan

pihak yang mengawasi penyaluran, kualitas, kuantitas dan harga BPNT yang disalurkan ke penerima bantuan melalui KPM ataupun agen bank. Keterlibatan tersebut menjadikan Korteks sebagai salah satu KPM dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang.

d. Petugas ABB (Bank BNI)

Bank BNI bekerjasama dengan Kemensos dalam menyalurkan dana bantuan sosial ke KPM di Kota Malang. Bank BNI mempunyai SDM dalam bentuk tim yang bertanggungjawab dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang, yakni petugas ABB (*Assistance Branchless Banking*). Tim ABB merupakan unit dari Bank BNI yang bertugas di lapangan untuk mengurus bantuan sosial dan keagenan bank dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang.

e. Penyelia e-Warong KUBE PKH (Pendamping PKH)

Penyelia e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah pendamping PKH. Keterlibatan penyelia dalam implementasi program e-Warong adalah dalam melakukan kegiatan pendampingan bagi pengurus di e-Warong yang ada di Kota Malang mulai dari awal pembentukan sampai dengan berjalannya e-Warong yang didampingi. Selain itu penyelia terlibat dalam mengarahkan pengurus e-Warong untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan di e-Warong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selain melakukan pendampingan, penyelia juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengembangan e-Warong yang didampinginya.

f. Pengurus e-Warong KUBE PKH / Kube Jasa

KUBE Jasa adalah Kelompok Usaha Bersama yang melaksanakan ekonomi produktif di bidang jasa untuk mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH (Permensos Nomor 25 Tahun 2016, 2017:4). Sama seperti pengertiannya, KUBE Jasa di Kota Malang adalah KUBE di bidang jasa yang bertujuan untuk mendirikan dan mengelola e-Warong. Kube Jasa di Kota Malang terdiri sepuluh orang anggota KPM PKH dan memiliki struktur organisasi yakni terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota.

2. Kognisi (Pemahaman dan Pengetahuan)

Pemahaman dan pengetahuan organisasai baik secara kelompok maupun perseorangan terkait tugas dan tanggungjawabnya dalam implementasi program akan mempengaruhi kemampuan dan keinginannya untuk melaksanakan suatu implementasi. Dalam implementasi progam e-Warong di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Bersama dan Tanjungrejo Bersatu) ditemukan bahwa SDM yang terlibat dalam implementasi program mendukung program dan implementasinya di Kota Malang hal tersebut dilihat dari pemahaman SDM terkait tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang diisyaratkan program e-Warong dalam Peraturan Dirjen PFM Nomor: 40 /PFM/SK/HK.01/09/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BPSU Melalui E-Warong KUBE PKH, PFM Perkotaan, Dirjen PFM.

a. Dinas Sosial Kota Malang (Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial dengan Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat)

Pemahaman Dinas Sosial Kota Malang melalui Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat terkait tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang sudah baik. Dinas Sosial Kota Malang melalui Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawab dari Dinas Sosial Kota Malang dalam implementasi program e-Warong yang mana tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial Kota Malang pada awal pembentukan e-Warong adalah, mengarahkan KPM PKH untuk ikut dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program e-Warong di Kota Malang yakni dengan memantau dan melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan e-Warong yang sudah beroperasi dan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah di e-Warong yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan atau pergantian anggota e-Warong yang terlibat dalam masalah.

b. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH) dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)

Pemahaman dan pengetahuan Korkot terkait tugas dan tanggungjawabnya dalam implementasi program e-Warong sudah sesuai dengan yang diisyaratkan oleh program. Korkot PKH dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang bertugas sebagai

penanggungjawab dilapangan dan menaungi KPM PKH dan juga bertugas mengkoordinir PKH dalam pembentukan KUBE Jasa, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Malang dan pihak-pihak lain dalam melakukan pengawasan terkait implementasi program e-Warong di Kota Malang.

Pemahaman dan pengetahuan Korteks terkait program dan implementasi program sudah baik dan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh program. Korteks mampu menjabarkan keterkaitannya dan perannya dalam implementasi program e-Warong. Korteks adalah penanggung jawab dilapangan terkait penyaluran BPNT melalui e-Warong atau agen bank. Korteks peran dalam mengawasi persediaan harga barang BPNT (beras dan telur) yang disalurkan melalui e-Warong di Kota Malang. Dalam melakukan perannya, Korteks tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Malang dan pihak terkait lainnya.

c. Petugas ABB (Bank BNI)

Pemahaman petugas ABB terkait peran Bank BNI serta tugas dan tanggungjawab petugas ABB dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang sudah baik dan sesuai dengan tugas yang diisyaratkan oleh program. Peran dari Bank BNI sendiri dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang adalah sebagai instansi perbankan yang bekerjasama dengan Kemensos dalam menyediakan, menginput serta melakukan *maintance* sistem keagenan

di e-Warong yang ada di Kota Malang. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas keagenan⁴⁶ di e-Warong yang mana hal tersebut menjadikan e-Warong sebagai agen bank yang bisa melakukan kegiatan perbankan yang transaksional seperti di mesin ATM di e-Warong. Selanjutnya peran Bank BNI adalah menyediakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang digunakan di e-Warong. Bank BNI juga berperan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai keagenan dan cara transaksi pembelian bantuan sosial melalui mesin EDC di e-Warong kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Bank BNI juga menyediakan papan nama e-Warong KUBE PKH dan agen (Observasi, Abraham CRN, 2018).

Petugas ABB (*Assistance Branchless Banking*) Bank BNI mampu menjabarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang. Tanggung jawab petugas ABB adalah mengurus bantuan sosial dan keagenan dari e-Warong di seluruh Malang Raya.

d. Penyelia e-Warong KUBE PKH (Pendamping PKH)

Pengetahuan dan pemahaman penyelia e-Warong di Kota Malang terkait peran dan tanggung jawabnya dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang sudah baik dan sesuai dengan tugas yang diisyaratkan oleh program. Penyelia e-Warong di Kota Malang adalah pendamping PKH yang juga sebagai penanggung jawab dilapangan terkait dengan implementasi program e-Warong di Kota

Malang. Penyelia e-Warong di Kota Malang berperan mendampingi dan mengarahkan pengurus e-Warong untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Dalam melakukan peran tersebut penyelia e-Warong berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Malang dan pihak terkait lainnya.

e. Pengurus e-Warong KUBE PKH / KUBE Jasa

Pengetahuan dan pemahaman pengurus e-Warong KUBE PKH / KUBE Jasa di Kota Malang yakni pengurus e-Warong KUBE PKH di Tanjungrejo Bersatu dan Maju Sejahtera terkait tugas dan tanggungjawabnya dalam implementasi program e-Warong sudah baik dan sesuai dengan pengertian KUBE Jasa dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2016.

Pengurus e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu dan Maju Sejahtera sudah mengerti dan paham dengan penggunaan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang ada di e-Warong masing-masing. Adanya pemahaman tentang pengoperasian EDC di e-Warong menunjukkan pengurus di dua e-Warong tersebut sudah memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang mengelola e-Warong. Adanya jadwal piket untuk mengurus dan mengelola e-Warong bagi pengurus mewajibkan semua pengurus mengerti dengan penggunaan dari mesin EDC. Pengurus di dua e-Warong tersebut juga memberikan sosialisasi bagi masyarakat umum

maupun penerima bantuan terkait dengan program dan pengimplementasiannya.

3. Arah Respon Pelaksana Terhadap Implementasi Menerima atau Menolak dan Intensitas dari Respon Pelaksana

Arah respon SDM pelaksana dalam implementasi program e-Warong adalah mendukung program dan pengimplementasiannya di Kota Malang. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan SDM terkait dengan program e-Warong. Untuk intensitas (keberlanjutan) dari sikap mendukung tersebut juga sudah dilakukan, namun intensitas dukungan dari Dinas Sosial Kota Malang dirasa kurang optimal. Kurang optimalnya intensitas dukungan dari Dinas Sosial Kota Malang terhadap implementasi program disebabkan belum dianggarkannya dana di Dinas Sosial Kota Malang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan e-Warong di Kota Malang.

a. Dinas Sosial Kota Malang

Sikap Dinas Sosial Kota Malang terkait dengan program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah mendukung karena program tersebut merupakan program Kemensos yang dimana Dinas Sosial Kota Malang adalah perpanjangan tangan dari pihak Kemensos di Kota Malang yang harus ikut serta mengawal implementasi program. Sikap mendukung tersebut sudah diwujudkannyatakan oleh Dinas Sosial Kota Malang melalui beberapa kegiatan namun belum optimal dan

intensitas (keberlanjutannya) tidak rutin, hal tersebut disebabkan belum tersedianya anggaran untuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan e-Warong di Kota Malang.

b. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH)

Sikap dari Korkot PKH terkait program dan implementasinya di Kota Malang adalah mendukung agar para KPM PKH yang ikut program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang tersebut bisa mandiri dan tidak perlu lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Intensitas dukungan dari Korkot PKH terhadap implementasi program sudah rutin dilakukan, yakni, berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam mengkoordinir KPM PKH yang ingin terlibat dalam pelaksanaan program, melakukan monitoring terkait implementasi program dan melakukan komunikasi kepada pengurus dan penyelia e-Warong.

c. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)

Sikap Korteks terkait dengan program dan implementasi e-Warong di Kota Malang adalah mendukung. Intensitas dukungan dari Korteks terkait dengan implementasi program sudah baik. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi khususnya terkait pencairan BPNT melalui e-Warong KUBE PKH, Korteks berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait dalam pemecahan masalah ataupun kendala yang berkaitan dengan penyaluran BPNT melalui e-Warong.

d. Petugas ABB (Bank BNI)

Sikap dari Bank BNI terkait program e-Warong KUBE PKH dan implementasinya di Kota Malang adalah mendukung. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Bank BNI dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang, yaitu: penyediaan sistem keagenan di e-Warong, penyediaan mesin EDC, dan pelatihan bagi pengurus e-Warong di Kota Malang apabila ada fitur-fitur baru pada sistem keagenan.

Sikap dari petugas ABB sendiri terkait implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah mendukung implementasi program. Dukungan tersebut diwujudkannyatakan melalui pendampingan kegiatan perbankan untuk pengurus e-Warong dan membantu menyelesaikan masalah-masalah perbankan yang ada di e-Warong. Intensitas (keberlanjutan) dukungan yang diberikan petugas ABB dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang sudah optimal yakni melalui kegiatan pendampingan perbankan bagi pengurus e-Warong baik itu melalui kunjungan langsung ataupun pendampingan lewat telepon selular.

e. Penyelia e-Warong KUBE PKH (Pendamping PKH)

Penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu mendukung terkait program dan implementasinya. Intensitas dari sikap mendukung itu terwujud melalui pertemuan (rapat rutin) antara penyelia dengan pengurus, penyelia rutin datang ke e-

Warong untuk mengawasi kegiatan di e-Warong, kehadiran penyelia untuk mendampingi pengurus saat pencairan BPNT di e-Warong. Penyelia juga kerap memberikan motivasi ataupun arahan bagi pengurus e-Warong dalam rangka mensukseskan implementasi program e-Warong.

f. Pengurus e-Warong KUBE PKH

Sikap dari pengurus e-Warong KUBE PKH / Kube Jasa di Kota Malang yakni di Tanjungrejo Bersatu dan Maju Sejahtera terkait program e-Warong dan pengimplementasiannya di Kota Malang adalah sangat mendukung. Intensitas dukungan dari dua pengurus e-Warong terkait implementasi juga sudah dilakukan dan rutin, yakni melalui kegiatan mengelola e-Warong secara bergantian dengan pengurus yang lain, mengikuti rapat ataupun pertemuan baik di internal maupun di eksternal e-Warong, mensosialisasikan dan mempromosikan e-Warongnya kepada masyarakat penerima bantuan maupun masyarakat umum, meningkatkan kualitas dan melengkapi kesediaan barang, serta meningkatkan kualitas pelayanan di e-Warong.

c. Elemen Kelompok Sasaran

Pada elemen ketiga, Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 12) menekankan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Artinya, harus ada kesesuaian antara syarat yang

sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana dengan apa yang sudah dilakukan oleh kelompok sasaran program. Maka berdasarkan hal tersebut elemen kelompok sasaran dalam implementasi program e-Warong di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Bersama dan Tanjungrejo Bersatu) sudah sesuai, hal tersebut dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh organisasi pelaksana melalui program e-Warong dengan apa yang dilaksanakan oleh pihak e-Warong KUBE PKH Maju Bersama dan Tanjungrejo Bersatu.

1. Persyaratan Keanggotaan dan Pembentukan e-Warong KUBE PKH

Pengurus e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu sudah melakukan persyaratan seperti yang diisyaratkan program yang mana pengurus di dua e-Warong tersebut adalah penerima bantuan sosial program keluarga harapan (KPM PKH) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, berumur diatas delapan belas tahun dan dibawah enam puluh tahun, masih produktif, memiliki kemampuan dalam mengelola e-Warong dan masuk dalam kelompok KUBE Jasa.

Persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH juga sudah diterapkan oleh pengurus dan penyelia kedua e-Warong tersebut. Pembentukan e-Warong pada dua e-Warong tersebut diawali dengan pendamping PKH menawarkan kepada sepuluh masyarakat KPM PKH untuk ikut bergabung dalam program e-Warong, setelah masyarakat

menerima tawaran tersebut, pendamping PKH memberikan sosialisasi mengenai program e-Warong KUBE PKH dan kemudian membentuk kelompok usaha bersama dalam bidang jasa atau disebut KUBE Jasa yang nantinya akan mendirikan dan mengelola e-Warong. Selanjutnya, KUBE Jasa yang sudah terbentuk tersebut bersama-sama dengan penyelia (pendamping PKH) menentukan tempat berdirinya e-Warong. Pendamping PKH yang menawarkan, mengumpulkan, dan membantu KPM PKH mendirikan e-Warong KUBE PKH akan menjadi penyelia (pendamping e-Warong).

2. Persyaratan Bangunan e-Warong KUBE PKH

Persyaratan bangunan e-Warong KUBE PKH belum bisa sesuai dengan yang dilakukan oleh pengurus e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu sedangkan untuk e-Warong Maju Sejahtera sudah melaksanakan syarat bangunan seperti yang diisyaratkan oleh program.

Bangunan e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera yang berada di Jl. Bandulan 8 K2 No.1 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun sudah sesuai dengan semua kriteria pembentukan e-Warong KUBE PKH. Bangunan e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera adalah milik KPM Pengurus e-Warong Maju Bersama. Dalam implementasi program, bangunan e-Warong Maju Sejahtera memiliki aksesibilitas jalan yang baik, terkoneksi aliran listrik dan internet sehingga memungkinkan dalam penggunaan alat-alat elektronik di e-Warong seperti EDC, sudah melaksanakan kegiatan pencairan bantuan sosial,

dan sudah melayani lima ratus sampai seribu keluarga penerima bantuan sosial.

E-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu yang bangunannya berada di Jl. Puter Utara No.20 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun belum memenuhi semua kriteria bangunan tempat berdirinya e-Warong KUBE PKH yakni tentang kepemilikan bangunan. Bangunan e-Warong tersebut bukan milik KPM pengurus maupun KPM bukan pengurus sehingga pengurus e-Warong tersebut harus membayar sewa kepada pemilik bangunan. Menurut narasumber yakni bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu, ketidaksesuaian tersebut tidak terlalu menghambat pengurus dan penyelia untuk mengimplementasikan program. Dari observasi yang dilakukan peneliti di e-Warong tersebut, benar bahwa implementasi program tetap berjalan. Untuk aksesibilitas jalan sudah baik, bangunan e-Warong berada di lingkungan yang terkoneksi internet dan terdapat aliran listrik sehingga alat-alat elektronik di e-Warong seperti EDC bisa digunakan, sudah melaksanakan kegiatan pencairan bantuan sosial, dan sudah melayani lima ratus sampai dengan seribu keluarga penerima bantuan sosial.

d. Sumberdaya

Sumberdaya atau sumber-sumber lain menjadi faktor yang akan menunjang keberhasilan implementasi suatu program. Dalam menunjang keberhasilan implementasi program e-Warong di Kota Malang, sumber-

sumber lain berupa sumberdaya infrastruktur dan keuangan sudah tersedia, yakni pada e-Warong Maju Bersama dan Tanjungrejo Bersatu.

a. Sumberdaya Infrastruktur

Sumberdaya infrastruktur merupakan salah satu sumber lain penunjang keberhasilan program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang yang sudah tersedia pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu.

1. Rumah atau Tempat Berdirinya e-Warong KUBE PKH

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di dua e-Warong yang ada di Kota Malang, peneliti menemukan bahwa kondisi rumah/ tempat berdirinya bangunan dua e-Warong tersebut sudah baik, hal tersebut dilihat dari bangunan e-Warong yang memiliki aksesibilitas jalan yang luas, terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik yang memungkinkan penggunaan mesin EDC saat pencairan bantuan sosial dan bangunan dua e-Warong tersebut berada di sekitar lingkungan warga baik yang penerima bantuan maupun yang tidak, hal ini tentunya akan mempermudah masyarakat untuk mencairkan bansosnya ataupun berbelanja kebutuhan sehari-hari melalui e-Warong.

2. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) adalah salah satu sumber daya infrastruktur pendukung implementasi program e-

Warong KUBE PKH di Kota Malang. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di dua e-Warong KUBE PKH di Kota Malang bahwa sudah tersedia mesin EDC dan masih berfungsi dengan baik yang mana hal tersebut akan menunjang keberhasilan implementasi program khususnya terkait dengan pencairan bantuan sosial non tunai.

Kartu KKS sebagai sumberdaya infrastruktur juga sudah tersedia, namun peneliti menemukan bahwa kartu KKS milik KPM di Kota Malang belum semuanya berfungsi dengan baik. Ditemukan bahwa terdapat kartu KKS yang eror dan bersalod nol rupiah sehingga KPM tidak bisa menggunakan KKS-nya untuk mencairkan bantuan melalui e-Warong.

b. Sumberdaya Keuangan

Dana merupakan salah satu sumber-sumber yang mendorong memperlancar suatu implementasi yang efektif. Sumber daya keuangan dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dana tersebut berasal dari APBN yang melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia diberikan kepada e-Warong KUBE PKH Maju Bersama dan Tanjungrejo Bersatu. Dana tersebut merupakan gabungan dari dana BPSU dan Bantuan KUBE.

Dana BPSU (Bantuan Pengembangan Sarana Usaha) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk renovasi rumah

atau tempat berdirinya kedua e-Warong KUBE tersebut. Dana Bantuan KUBE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian bahan pangan yang dijual ke KPM dan masyarakat umum serta untuk membeli kebutuhan lain yang mendukung proses implementasi program.

e. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Pemberian Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) dan Bantuan KUBE melalui e-Warong kepada kelompok masyarakat di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu sudah tepat. Dilihat dari kondisi ekonominya kelompok masyarakat penerima BPSU dan Bantuan KUBE melalui dua e-Warong tersebut adalah masyarakat miskin penerima bantuan atau yang disebut dengan KPM. KPM di kedua e-Warong tersebut sebelum ikut dalam implementasi program juga ikut dengan program bantuan sosial pemerintah yakni Program Keluarga Harapan (PKH), hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa pengurus dikedua e-Warong tersebut memang betul masyarakat miskin penerima bantuan sosial. Dari segi profesi, kedua pengurus e-Warong tersebut mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga, ikut bekerja dengan orang lain (buruh) yang mana profesi tersebut penghasilannya tidak tetap. Melalui program e-Warong para KPM PKH di dua e-Warong tersebut bisa menjadi pengurus dan mengelola e-Warong yang nantinya bisa mendapatkan penghasilan tambahan berupa sisa hasil usaha (SHU) dari penjualan barang-barang di e-Warong. Bertambahnya pendapatan tersebut

diharapkan juga bisa membantu KPM pengurus dua e-Warong tersebut dalam mencapai kesejahteraan dan kemandirian sehingga tidak perlu lagi ikut dalam program bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Respon awal dari masyarakat lingkungan sekitar e-Warong Maju Sejahtera dan Tanjungejo Bersatu terkait implementasi program pada dua e-Warong tersebut adalah adanya rasa ketidaknyamanan dengan kegiatan di e-Warong yaitu saat kegiatan menurunkan beras yang akan dipasarkan lewat e-Warong namun ketidaknyamanan tersebut dapat diatasi lewat komunikasi yang baik dari pengurus dan penyelia kedua e-Warong tersebut kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat tersebut dapat mengerti dan memaklumi. Melalui komunikasi yang baik dari pengurus kedua e-Warong tersebut masyarakat sekitar lingkungan e-Warong bisa mendapatkan informasi terkait program sehingga bisa mengerti dengan jalannya program dan memberikan dukungan untuk implementasi program e-Warong KUBE PKH dengan datang berbelanja ke dua e-Warong tersebut.

2. Hambatan Dalam Implementasi Program E-Warong KUBE PKH

Setiap implementasi kebijakan atau program tentunya mempunyai hambatan tersendiri yang dialami oleh para implementornya begitu juga dengan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Hambatan-hambatan tersebut dikategorikan pada tiga medan implementasi program yakni:

a. Hambatan Diingkungan Dinas Sosial Kota Malang

Komunikasi di lingkungan internal Dinas Sosial Kota Malang yang tidak berjalan dengan baik yakni antara Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial dengan Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai SDM pelaksana implementasi program menjadi hambatan implementasi program e-Warong di lingkungan Dinas Sosial Kota Malang. Komunikasi yang tidak berjalan tersebut disebabkan oleh Kabid PFM dan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah pensiun dan sebelum itu selama masih aktif dalam bekerja, Kabid tersebut tidak kooperatif dalam implementasi program. Sampai dengan hari ini posisi Kabid tersebut masih belum digantikan oleh Pemerintah Kota Malang sehingga menyulitkan Kasi PFM melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang.

Hambatan selanjutnya di lingkungan Dinas Sosial Kota Malang adalah belum adanya kegiatan pelatihan dari Dinas Sosial kepada pengurus dan penyelia e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Tidak adanya anggaran di Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan e-Warong juga menjadi hambatan bagi pihak Dinas Sosial.

b. Hambatan Dilingkungan Bank BNI

Hambatan pertama di lingkungan Bank BNI selama implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang adalah permasalahan di sistem jaringan perbankan yang mana hal tersebut bisa menjadi penyebab

adanya permasalahan kartu KKS yang eror dan saldonya Rp 0 (nol rupiah) sehingga tidak bisa digunakan untuk mencairkan bantuan sosial tunai dan non tunai melalui e-Warong.

Hambatan kedua adalah adanya kondisi tidak saling mengenal antara petugas ABB Bank BNI dengan pengurus e-Warong pada awal implementasi program. Kondisi tersebut dikarenakan adanya komunikasi yang kurang baik antara petugas ABB Bank BNI dengan pengurus e-Warong di Kota Malang, namun seiring waktu dapat diatasi dengan penyesuaian dari kedua pelaksana implementasi program.

c. Hambatan Dilingkungan e-Warong KUBE PKH

Hambatan di lingkungan e-Warong KUBE PKH adalah minimnya sosialisasi BPNT dan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang kepada KPM yang bukan PKH atau yang bukan pengurus e-Warong. KPM di Kota Malang yang tidak memiliki pendamping akan berbelanja ke agen bank. Mengacu pada peraturan yang ada hal tersebut sebenarnya sah-sah saja, namun mayoritas KPM yang bukan PKH dan bukan pengurus e-Warong sangat minim pengetahuannya mengenai bantuan BPNT dan program e-Warong. KPM yang berbelanja di agen bank kecil kemungkinan mendapatkan edukasi ataupun informasi mengenai BPNT ataupun mengenai program e-Warong, karena agen bank sendiri lebih mengejar *provit* (keuntungan) dari kegiatan pencairan BPNT.

Hambatan selanjutnya adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh agen BNI tentang aturan barang yang bisa dijual untuk KPM penerima

BPNT hal tersebut menyebabkan persaingan bisnis yang tidak sehat diantara e-Warong dengan agen BNI yang menghambat pengembangan e-Warong. Terhambatnya pengembangan e-Warong akan berpengaruh kepada para KPM yang menjadi pengurus.

Collect ATM menjadi permasalahan lain di lingkungan e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. *Collect* ATM bisa diartikan sebagai kegiatan pengumpulan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan untuk mencairkan BPNT (beras dan telur) di e-Warong atau agen Bank BNI oleh sesama penerima bantuan, pengurus e-Warong, penyelia e-Warong dan pihak-pihak lain. Kondisi ini bisa menimbulkan adanya kecurangan pada pencairan bantuan BPNT yang dilakukan oleh oknum tertentu dan akan menyebabkan penyelewengan bantuan sosial yang akan merugikan KPM. Dengan adanya kegiatan *collect* ATM menyebabkan KPM tidak datang ke e-Warong sehingga informasi terkait e-Warong tidak bisa tersampaikan kepada KPM penerima bantuan. Penyalahgunaan alat-alat elektronik dan penyelewengan *income* (keuntungan) dari e-Warong oleh pengurus menjadi hambatan implementasi program di lingkungan e-Warong KUBE PKH. Hambatan lain di e-Warong dalam implementasi program di lingkungan e-Warong KUBE PKH adalah beberapa kartu KKS milik KPM *error* dan bersaldo nol rupiah sehingga tidak bisa digunakan untuk mencairkan bantuan sosial di e-Warong.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Program E-Warong KUBE PKH merupakan salah satu produk/program aksi dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan dituangkan dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Program ini merupakan upaya dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan memberikan bantuan pengembangan sarana usaha kepada kelompok masyarakat penerima bantuan atau disebut dengan KUBE Jasa. Kelompok masyarakat penerima bantuan (KUBE Jasa) tersebut mendirikan, mengelola serta mengembangkan e-Warong KUBE PKH sebagai bentuk dari upaya pengentasan kemiskinan lewat pemberdayaan masyarakat.

1. Implementasi Program E-Warong KUBE PKH di Kota Malang (Studi Pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungsrejo Bersatu)

Kota Malang merupakan kota pertama di Indonesia dalam penerapan program e-Warong. Peneliti menggunakan elemen-elemen dalam model kesesuaian oleh Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008: 11). Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait implementasi program e-Warong KUBE PKH

di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu), maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

a. Elemen Program

Elemen program dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu) sudah sesuai. Keseuaian tersebut dengan adanya kesesuaian antara program e-Warong dengan KPM di Kota Malang sebagai kelompok sasaran (pemanfaat).

b. Elemen Pelaksanaan Program

Elemen pelaksanaan program dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu) belum sesuai. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan kurangnya intensitas (keberlanjutan) dukungan dari Dinas Sosial terkait implementasi program e-Warong di Kota Malang. Tidak adanya anggaran di Dinas Sosial Kota Malang menjadi penyebab belum optimalnya intensitas (keberlanjutan) dukungan dari Dinas Sosial Kota Malang tersebut.

c. Elemen Kelompok Sasaran

Elemen kelompok sasaran dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang (studi pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu) belum

sesuai. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan belum terpenuhinya persyaratan bangunan pada e-Warong KUBE PKH Tanjugrejo Bersatu.

d. Sumberdaya

Sumberdaya pendukung dalam menunjang keberhasilan implementasi program e-Warong di Kota Malang terdiri dari sumber daya infrastruktur, dan sumber daya keuangan.

1. Sumber Daya Infrastruktur

a. Rumah atau tempat berdirinya e-Warong KUBE PKH.

Kondisi rumah atau tempat berdirinya e-Warong KUBE PKH di Kota Malang sudah bagus dan mampu untuk menunjang keberhasilan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang

b. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Mesin EDC di e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu sudah tersedia dan dalam kondisi yang baik sehingga bisa dioperasikan. Kartu KKS sudah tersedia namun terdapat kartu KKS milik KPM di Kota Malang yang rusak (*error*) dan bersaldo nol rupiah sehingga tidak bisa digunakan saat pencairan bantuan sosial di e-Warong.

2. Sumberdaya Keuangan

Sumberdaya keuangan sudah tersedia pada e-Warong KUBE PKH Maju Bersama dan Tanjungrejo Bersatu, berupa:

- a. Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) sebesar sepuluh juta rupiah digunakan untuk renovasi tempat/ bangunan e-Warong.
- b. Bantuan KUBE sebesar dua puluh juta rupiah digunakan untuk penyediaan bahan pangan (beras dan telur) dan alat alat pendukung kegiatan di e-Warong.

e. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Pemberian Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) melalui program e-Warong KUBE PKH kepada kelompok masyarakat di Kota Malang yakni pada e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu sudah tepat sasaran. Penerima bantuan adalah masyarakat miskin penerima bantuan (KPM) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, mempunyai usaha kecil dan ikut bekerja dengan orang lain, dengan artian bahwa penghasilannya tidak menetap. KPM PKH di Kota Malang yang ikut menjadi pengurus dan mengelola e-Warong mendapatkan penghasilan tambahan berupa sisa hasil usaha (SHU) dan bisa digunakan untuk membantu keuangan pribadi dan keluarga.

Kondisi sosial sekitar lingkungan e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera dan Tanjungrejo Bersatu mendukung implementasi program e-Warong yang diwujudkannyatakan dengan datang berbelanja ke e-Warong serta menjalin komunikasi yang baik dengan para pengurus e-Warong.

2. Hambatan Dalam Implementasi E-Warong KUBE PKH

a. Hambatan Dilingkungan Dinas Sosial Kota Malang

1. Komunikasi antara Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial dengan Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai penanggung jawab program e-Warong KUBE PKH di Dinas Sosial Kota Malang yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan kosongnya jabatan dari Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial.
2. Belum diadakannya kegiatan pelatihan dari Dinas Sosial Kota Malang bagi pengurus dan penyelia e-Warong di Kota Malang, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan bagi pengurus dan penyelia.
3. Tidak adanya anggaran di Dinas Sosial Kota Malang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pengurus dan penyelia e-Warong KUBE PKH di Kota Malang

b. Hambatan Dilingkungan Bank BNI

1. Permasalahan di sistem jaringan perbankan Bank BNI
2. Tidak saling kenal antara petugas ABB Bank BNI dengan pengurus e-Warong KUBE PKH di Kota Malang yang disebabkan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.

c. Hambatan Dilingkungan e-Warong KUBE PKH

1. Minimnya sosialisasi bantuan BPNT dan implementasi program e-Warong KUBE PKH kepada masyarakat KPM yang bukan PKH atau yang bukan pengurus e-Warong.

2. Pelanggaran tentang aturan barang yang bisa dijual untuk KPM penerima BPNT oleh agen bank.
3. Adanya kegiatan *Collect ATM* (pengumpulan kartu KKS) yang rawan menimbulkan kecurangan pada saat pencairan BPNT di e-Warong atau di agen bank.
4. Penyalahgunaan alat-alat elektronik dan penyelewengan dana keuntungan e-Warong KUBE PKH oleh pengurus e-Warong.
5. Kartu KKS milik KPM di Kota Malang yang bersaldo nol rupiah atau eror sehingga tidak bisa mencairkan bantuan BPNT di e-Warong atau di agen bank.

B. SARAN

Sehubungan dengan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang, peneliti menemukan beberapa hambatan dalam implementasi program tersebut. Maka dari itu peneliti memberikan beberapa masukan agar implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang dapat berjalan lebih baik dan dapat mencapai tujuan awal dari program.

1. Pemerintah Kota Malang harus segera melakukan pengangkatan Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kota Malang agar komunikasi dan koordinasi antara Kabid PFM dan Pemberdayaan Sosial dengan Kasi PFM dan Pemberdayaan Masyarakat bisa dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan perumusan dan penyediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pengurus dan penyelia e-

Warong serta kegiatan sosialisasi program e-Warong KUBE PKH dan BPNT baik itu bagi KPM maupun masyarakat umum.

2. Bank BNI yang berada di pusat maupun di Kota Malang harus meningkatkan pengawasan terhadap sistem jaringan perbankannya agar permasalahan kartu eror dan kartu KPM yang bersaldo nol bisa diminimalisir. Intensitas komunikasi antara petugas ABB Bank BNI dengan agen-agen pelaksana program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang khususnya dengan pengurus dan penyelia juga harus ditingkatkan.
3. Perlu dilakukan sosialisasi lanjutan terkait peraturan program e-Warong KUBE PKH kepada pengurus dan penyelia agar permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi selama implementasi program bisa diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono, 2005. *“Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baswir, Revrison. 1999. *“Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Penemuan Hal Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru”*. IDEA dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bersatu, Tanjungrejo. 2017. *“Profil e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu*. Malang: e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media.
- Husain Usman Purnomo.2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hogwood, Brian, W., Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis*, British Journal of Political Science
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi. (e-government)
- Karnadji & Sudarsono (ed). 2005. *Penelitian Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Peran Serta Masyarakat Mampu di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep. Teori dan Isu*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gava Media.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) buku 1*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2004. *SANKRI, Buku III – Landasan dan pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ripley, Randall, and Grace Franklin. 1982. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood : Dorsey Press.
- Setiawan, Guntur. 2004. *"Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan"*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, 1997. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Susilo, Muhammad Joko. 2007. *"Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *"Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edward"*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Usman, Nurdin. 2002. *"Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum"*. Grasindo: Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press: Malang
- Zainun, Buchari. 2004. *Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Jurnal:

- Akib, Haedar., dan Tarigan, Antonius., (2008). *"Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya"*, Jurnal Kebijakan Publik.
- Haloho, T. Elwina. (2017). *"Penerapan E-Service dalam Pelayanan Publik Penerimaan Mahasiswa Baru (BSP) Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016"*. Medan. FISIP USU: Ilmu Administrasi Negara.

Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2017). *“Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai”*. Jakarta: Indonesia

Kementerian Sosial. 2014. *Kebijakan Transformasi PKH: disampaikan pada Seminar Bantuan Sosial dan Penghidupan Berkelanjutan di Jakarta*, 19 Agustus 2014. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial.

DOKUMEN (PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN) :

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA KELUARGA HARAPAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA TUNAI.

INTERNET

Admin. 2016. *“Mensos RI Luncurkan e-warung di Kota Malang”*, diakses tanggal 02 Februari 2017 pukul 13.30 dari <http://dinsos.jatimprov.go.id/index.php/2016-10-26-00-04-58/dayasos/item/93-mensos-ri-luncurkan-e-warung-di-kota-malang/>

Aminudin, Muhammad. 2017. *“September 2017, Inflasi Kota Malang Lebih Rendah Dari Surabaya”*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3702404/september-2017-inflasi-kota-malang-lebih-rendah-dari-surabaya>

Anonimous. 2016. *“Mensos RI Luncurkan e-Warung di Kota Malang”*, diakses pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 15:30 WIB dari <http://dinsos.jatimprov.go.id/index.php/2015-10-26-00-04-58/dayasos/item/93-mensos-ri-luncurkan-e-warung-di-kota-malang/>

Anonimous. 2017. *“Walikota Malang: PPK Soempoerna Expo 2017 Sukses Digelar”*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.30 WIB dari <https://www.jpnn.com/news/ppk-sampoerna-expo-2017-sukses-digelar>

Hartik, Andi. 2016. *“Pacu Perkembangan Ekonomi Kreatif, Kota Malang Gelar Festival Mbois”*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB dari

<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/03/205426826/pacu.perkembangan.ekonomi.kreatif.kota.malang.gelar.festival.mbois>

Kota Malang, BPS. 2017. *"Kota Malang Dalam Angka 2017"*, [pdf], diakses pada tanggal 09 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB dari <https://malangkota.bps.go.id/publication/2017/08/12/af218a8b74d037b3f9d87c85/kota-malang-dalam-angka-2017.html>

MALANG, ADADI. 2016. *"Mensos Resmikan E-Warung Pertama di Kota Malang"*, diakses pada tanggal 29 November 2018 pukul 15.20 WIB dari <http://adadimalang.com/2016/07/01/mensos-resmikan-e-warung-pertama-di-kota-malang/#prettyPhoto>

Malang Kota, Dinsos. 2017. *"Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"*, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 19.30 WIB dari <https://dinsos.malangkota.go.id/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-lakip/>

Mawardi M. Sulton, Ruhmaniyati, dkk. 2017. *"Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warung Kube-PKH"*, [pdf], diakses pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 13.00 WIB dari <http://www.smeru.or.id/id/content/kajian-awal-pelaksanaan-program-e-warung-kube-pkh>

PPK dan PAN, Direktorat PFM Pesisir. 2017. *"Bahan Diskusi Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan"*, diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 10.30 WIB dari <http://simontok.kemsos.go.id/home/book/Bahan%20Diskusi%20E-Warung.%202017.pdf>

Rimadi, Luqman. 2016. *"Mensos Khofifah: e-Warung Hindarkan Penyelewengan Dana Bansos"*, diakses pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 14.30 WIB dari <http://news.liputan6.com/read/2548557/mensos-khofifah-e-warung-hindarkan-penyelewengan-dana-bansos/>

Suryana, Siti Erna Latifi. 2009. *"Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang"*. Thesis Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 10.00 WIB dari <http://repository.usu.ac.id/>

Tasikmalayakota, Dinsos. 2017. *"Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Penanganan Fakir Miskin Perkotaan"* diakses pada tanggal 02 Desember 2023 WIB dari <http://pkh.dinsos.tasikmalayakota.go.id/downloads/20170313180952.pdf>

Tempo.co. *"Kota Malang Menuju Lumbung SDM Ekonomi Kreatif"*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 12.58 WIB dari

<https://nasional.tempo.co/read/758565/kota-malang-menuju-lambung-sdm-ekonomi-kreatif/>

Yuwanto, Endro. "*Wawali Kota Malang: Pariwisata Berperan Dongkrak Ekonomi*", diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.30 WIB dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/02/ox69e2438-wawali-kota-malang-pariwisata-berperan-dongkrak-ekonomi>



LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

1. Apa itu program e-Warong KUBE PKH dan apa keterkaitannya dengan Program BPNT?
2. Sasaran program e-Warong KUBE PKH itu siapa ?
3. Tujuan program e-Warong KUBE PKH itu apa ?
4. Bagaimana proses pembentukan e-Warong KUBE PKH ?
5. Syarat bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam program e-Warong KUBE PKH ini apa ?
6. Bagaimana peran dari agen pelaksana pada proses pembentukan dan pelaksanaan program e-Warong di Kota Malang?
7. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara agen pelaksana dalam implementasi program e-Warong KUBE PKH?
8. Bentuk komunikasi seperti apa yang terjalin ?
9. Di dinas sosial Kota Malang bidang apa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH ?
 - a. Bidang apa saja yang terlibat
 - b. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara pelaksana selama ini ?
 - c. Apa hambatan dalam pelaksanaan komunikasi tersebut ?
 - d. Bagaimana komunikasi antara ibu dengan para pegawai Dinas Sosial Kota Malang terkait program e-Warong KUBE PKH dan bagaimana

sikap pegawai di Dinas Sosial Kota Malang terkait program tersebut ?

10. bagaimana kondisi sosial dan ekonomi penerima bantuan program BPNT dan e-Warong KUBE PKH ini ?
11. Bagaimana respon dari masyarakat terkait program e-Warong KUBE PKH ?
12. Apakah ada dukungan warga sekitar terkait pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH ?
13. Bagaimana komitmen agen-agen pelaksana terkait dengan implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang ?
14. Bagaimana dukungan agen-agen pelaksana terkait pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang
15. Apakah pengurus e-Warong KUBE PKH sudah bisa mengoperasikan alat-alat elektronik di e-Warong KUBE PKH ?
16. Hambatan apa yang dihadapi dalam proses implementasi program e-Warong KUBE PKH di Kota Malang ?

2. Dokumentasi Wawancara



**Wawancara dengan Ibu Sumarti
selaku Kepala Seksi Penanganan
Fakir Miskin dan Pemberdayaan
Masyarakat
&
Wawancara dengan Mba
Labudda MH selaku Koordinator
Kota Tenaga Kesejahteraan Sosial
(Korteks) di Kota Malang**



**Wawancara dengan Mas Fauzi
selaku Koordinator Kota Program
Keluarga Harapan (Korkot PKH)
di Kota Malang**



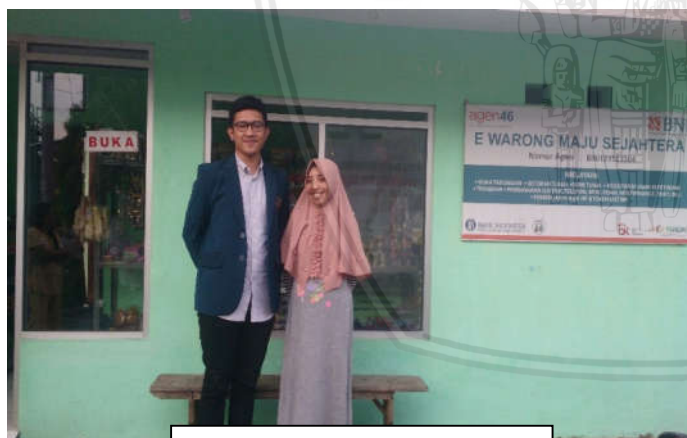
**Wawancara dengan Mas Rahmat
Prayudi selaku Penyelia e-Warong
KUBE PKH Maju Sejahtera**



Wawancara dengan Ibu Sri Widya Y selaku Bendahara e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu



Wawancara dengan Mba Eka Aprilia Hani (Tengah) selaku Petugas ABB Bank BNI didampingi Mas Rahmat Prayudi selaku Penyelia e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera (Kiri)



Wawancara dengan Ibu Widya Puji Astuti selaku bendahara e-Warong KUBE PKH Maju Sejahtera



Wawancara dengan Pak Naisanto selaku penyelia e-Warong KUBE PKH Tanjungrejo Bersatu

3. SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL
Jl. Raya Sulfat No 12 Telp./Fax (0341) 412266
http www.malangkota.go.id
email dinsosmalang@yahoo.com
KodePos : 65123

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 460/4621/35.73.305/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kepala Dinas Sosial Kota Malang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama : ABRAHAM CRN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 125030107111066
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas FIA Universitas Brawijaya Malang

Telah melaksanakan tugas dengan *Baik* dimulai tanggal 18 September 2018 s/d 17 Oktober 2018 sesuai Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian/ Survey/ Research dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perihal Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dengan Nomor : 072/89.09.P/35.73.406/2018 Tanggal 18 September 2018 dengan Judul Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Elektronik Warung (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Desember 2018
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MALANG

Dr. SRI WAHYUNINGTYAS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19581218 198503 2 007

#2/DATA/BIDANG REHSOS/SURAT-SURAT RESOS/REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN

**4. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA MELALUI ELEKTRONIK
WARUNG GOTONG ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA
MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG
KELOMPOK USAHA BERSAMA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, perlu dilakukan pemberian bantuan sarana usaha berupa stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha dari Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik

5. Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

2. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
4. KUBE di bidang jasa yang selanjutnya disebut KUBE Jasa adalah KUBE yang melaksanakan usaha ekonomi produktif di bidang jasa untuk mendirikan dan mengelola Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
5. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat atau *conditional cash transfer* kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH.
6. Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.
7. Bantuan Pengembangan Sarana Usaha yang selanjutnya disingkat BPSU adalah bantuan yang diberikan kepada Fakir Miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang menjadi anggota KUBE.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pembentukan e-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial.

Pasal 3

E-Warong KUBE PKH berfungsi:

- a. tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga;
- b. agen bank penyalur bantuan sosial nontunai;
- c. tempat pemasaran hasil produksi KUBE; dan/atau
- d. tempat layanan koperasi simpan pinjam.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pembentukan E-Warong KUBE PKH

Pasal 4

Kriteria pembentukan e-Warong KUBE PKH meliputi:

- a. lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik;
- b. melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial;
- c. menggunakan tempat/rumah pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE; dan
- d. melaksanakan transaksi Bantuan Sosial secara nontunai.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a. membentuk KUBE Jasa; dan
- b. memiliki tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH.

Pasal 6

- (1) Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan 1 (satu) orang penyelia.

Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

melakukan pendampingan.

Pasal 7

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya;
- b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
- c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan
- d. memiliki potensi dan keterampilan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepengurusan KUBE Jasa dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota KUBE Jasa.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan KUBE Jasa berakhir apabila:
 - a. telah meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah ke kecamatan lain;
 - d. sakit permanen; atau
 - e. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Proses penggantian anggota KUBE Jasa dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara yang

disampaikan kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota melalui pendamping PKH.

- (3) Dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Pasal 10

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH.

Pasal 11

- (1) Tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE Jasa.
- (2) Pemilik rumah/tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan penggunaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kesediaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan; dan
 - b. tidak menuntut biaya sewa dan/atau biaya lainnya atas penggunaan rumah sebagai tempat e-Warong KUBE PKH.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN E-WARONG KUBE PKH

Pasal 12

Dinas sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan e-Warong KUBE PKH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tata cara:

- a. kepala dinas sosial kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang memuat data nama dan alamat peserta KUBE Jasa dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi;
- b. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan dari dinas sosial kabupaten/kota;
- c. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima bantuan e-Warong KUBE PKH;
- d. hasil penetapan lokasi dan penerima bantuan e-Warong KUBE PKH disampaikan kepada dinas sosial kabupaten/kota; dan
- e. dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada KUBE Jasa untuk membentuk e-Warong KUBE PKH.

Pasal 14

- (1) KUBE Jasa yang telah ditetapkan untuk dibentuk e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mengajukan proposal permohonan BPSU dan bantuan KUBE kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui dinas sosial kabupaten/kota.
- (2) Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi atas keberadaan KUBE Jasa dan e-Warong KUBE PKH.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi persyaratan sebagai KUBE Jasa dan e-Warong KUBE PKH ditetapkan sebagai penerima BPSU dan bantuan KUBE.

KUBE Jasa yang telah menerima BPSU dan bantuan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembentukan e-Warong KUBE PKH dan pelaksanaan

- (4) kegiatan e-Warong KUBE PKH.

Pasal 15

BPSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk perbaikan ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan dana BPSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, transport, dan kegiatan politik.

Pasal 17

- (1) Bantuan KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa modal usaha dan modal kerja.
- (2) Modal usaha dan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prosentase 25% (dua puluh lima persen) untuk modal usaha dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja.
- (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembelian bahan pangan pokok.
- (4) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pembelian:
 - a. listrik 2 (dua) titik 900 (sembilan ratus) watt;
 - b. perangkat elektronik berupa tablet dengan spesifikasi paling kecil ukuran layar 8 (delapan) inci, menggunakan sistem operasi Android Lollipop, dan kualitas kamera 5 (lima) megapiksel;
 - c. printer *bluetooth*;
 - d. layanan internet selama 1 (satu) tahun;
 - e. timbangan barang;
 - f. mesin pengemas hampa udara;
 - g. lemari pendingin; dan/atau

- h. alat pengangkut berupa *trolley*.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN E-WARONG KUBE PKH

Pasal 18

E-Warong KUBE PKH melakukan kegiatan:

- a. melayani pencairan Bantuan Sosial nontunai;
- b. melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima Bantuan Sosial;
- c. melayani pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima Bantuan Sosial dan masyarakat umum;
- d. memasarkan hasil produksi KUBE;
- e. menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran Bantuan Sosial nontunai; dan
- f. melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu.

Pasal 19

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, e-Warong KUBE PKH bermitra dengan:

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bank umum milik negara;
- d. badan usaha milik negara yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha; dan/atau
- e. badan usaha yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan usaha kegiatan e-Warong KUBE PKH ditunjuk koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. wakil e-Warong KUBE PKH dalam melakukan kerja sama dengan bank umum milik negara untuk penyaluran Bantuan Sosial nontunai; dan
- b. wakil e-Warong KUBE PKH dalam melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha untuk penyediaan bahan pangan pokok.

- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Penunjukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan KUBE Jasa sebagai pengelola e-Warong KUBE PKH secara sukarela menjadi anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Keanggotaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari keanggotaan e-Warong KUBE PKH dan dapat berasal dari penerima manfaat Bantuan Sosial yang lain.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Anggota e-Warong KUBE PKH mempunyai hak:
 - a. memberikan saran untuk memperbaiki kinerja e- Warong KUBE PKH;
 - b. mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil usaha jasa e-Warong KUBE PKH;
 - c. memperoleh informasi tentang perkembangan usaha e-Warong KUBE PKH;

- d. ikut serta dalam pengambilan keputusan yang terkait e-Warong KUBE PKH;
- e. memperoleh kebutuhan bahan pangan pokok melalui e-Warong KUBE PKH;
- f. menjadi anggota koperasi; dan
- g. memanfaatkan semua fasilitas yang ada di e-Warong KUBE PKH.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 23

Anggota e-Warong KUBE PKH mempunyai kewajiban:

- a. mengikuti dan menaati semua ketentuan yang telah disepakati baik aturan yang ada dalam e-Warong KUBE PKH maupun koperasi;
- b. mewujudkan tujuan bersama yang telah ditetapkan;
- c. membangun kerja sama dengan berbagai pihak;
- d. memanfaatkan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif dengan penuh tanggung jawab;
- e. membayar iuran kesetiakawanan sosial setiap bulan sesuai dengan kesepakatan bersama yang digunakan untuk kepentingan bersama; dan
- f. memelihara aset e-Warong KUBE PKH

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan e-Warong KUBE PKH dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

Pengelolaan sumber pendanaan e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan e-Warong KUBE PKH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan e-Warong KUBE PKH dengan petunjuk pelaksanaan, hambatan, dan perkembangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan e-Warong KUBE PKH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan e-Warong KUBE PKH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Laporan pelaksanaan e-Warong KUBE PKH dibuat oleh pengurus KUBE Jasa dan penyelia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua KUBE Jasa dan penyelia kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Pasal 29

- (1) Laporan oleh pengurus KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:

- a. berita acara serah terima;
 - b. realisasi rencana anggaran biaya;
 - c. kuitansi dan faktur; dan
 - d. foto kopi buku tabungan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

Pasal 30

- (1) Laporan oleh penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
- a. aspek sosial;
 - b. aspek kelembagaan;
 - c. aspek manajemen; dan
 - d. perkembangan usaha.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 9

